

PERAN MODERASI *FRAMING* DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP BIAS EFEK URUTAN BUKTI DALAM KEPUTUSAN PENGANGGARAN

Wulandari Fitri Ekasari
wulandari.fe@feb.unair.ac.id
FEB Universitas Airlangga
Supriyadi
FEB Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This study is aimed to empirically test the moderating roles of information framing and cognitive style on recency effect in budgeting decision, as a part of management accounting decisions. Laboratory experimental method used in this study with a 2x2x2 between-subjects design involving participants of 100 undergraduate accounting students at two universities in Central of Java and Yogyakarta provinces. The results of this study indicate that in the Step-by-Step (sequentially) response mode, the occurrence of recency effects can be mitigated by information framing. In contrast, participants in the End-of-Sequence (simultaneously) response mode did not experience any order effects. Moreover, the interesting finding is that the interaction effect between information order and response modes indicating that the End-of-Sequence response mode alone can reduce the recency effects. However, the prediction of interaction effect between information order, information framing, and cognitive styles in both Step-by-Step and End-of-Sequence was not supported.

Key words: order effects, belief-adjustment model, framing, cognitive style.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh moderasi dari *framing* informasi dan gaya kognitif terhadap efek resensi dalam keputusan anggaran, sebagai bagian dari keputusan akuntansi manajemen. Metode eksperimen laboratorium digunakan dalam penelitian ini dengan desain 2x2x2 *between-subject* dan partisipan yang terdiri atas 100 mahasiswa Strata 1 Akuntansi Universitas di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mode respon *Step-by-Step* (bertahap), munculnya efek resensi dapat dimitigasi oleh *framing* informasi. Sebaliknya, dalam mode respon *End-of-Sequence* (simultan) tidak ditemukan adanya efek urutan. Selain itu, terdapat temuan yang cukup menarik bahwa terdapat efek interaksi antara urutan informasi dan mode respon yang merefleksikan bahwa mode respon *End-of Sequence* dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi efek resensi, namun, penelitian ini tidak menemukan adanya efek interaksi antara urutan, *framing* informasi, dan gaya kognitif, baik dalam mode respon *Step-by-Step* maupun *End-of Sequence*.

Kata kunci: efek urutan, *belief-adjustment model*, *framing*, gaya kognitif.

PENDAHULUAN

Pergeseran perspektif mengenai peran akuntan manajemen dalam suatu perusahaan dijelaskan dalam Brewer (2008) yang menggagas sebuah kerangka baru mengenai perannya dalam menambah nilai pemegang kepentingan yang dituangkan ke dalam empat pilar, yaitu kepemimpinan, manajemen strategik, penyelarasan operasional,

serta perbaikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Rerangka yang dikembangkan oleh Brewer (2008) sejalan dengan penelitian studi kasus oleh Ma dan Tayles (2009) mengenai peran akuntansi manajemen strategik yang memfasilitasi diskusi antar fungsi dalam suatu perusahaan. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan manajemen diharapkan dapat berperan sebagai alat

pengambilan keputusan (*decision tool*) strategis guna menyelaraskan seluruh strategi dalam kegiatan perusahaan.

Akuntan manajemen bertanggungjawab atas tersedianya masukan (*input*) dalam pengambilan keputusan manajemen. Informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen terakumulasi secara berurutan, mulai dari analisis varians, penganggaran modal, hingga evaluasi kinerja karyawan (Lewis *et al.*, 1983; Brown, 1985; Dillard *et al.*, 1991). Pola penyajian informasi yang berurutan dapat memengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh adanya kondisi *bounded rationality* pada manajer sehingga menghasilkan keputusan yang bias dan tidak optimal. *Bounded rationality* adalah kondisi individu yang memiliki keterbatasan dalam memproses informasi secara sistematis dan rasional akibat adanya keterbatasan informasi, waktu, kapasitas memori dan sebagainya.

Pengambilan keputusan yang bias disebabkan oleh penggunaan strategi heuristik oleh individu. Salah satu bias yang dapat terjadi akibat perolehan informasi secara bertahap ialah *order effect* (efek urutan), yaitu manajer melakukan pertimbangan tidak berdasar pada substansi informasi yang ada, tetapi cenderung dipengaruhi oleh urutan penyajian informasi yang diperolehnya secara bertahap. Efek urutan terdiri dari efek primasi (*primacy effect*), yaitu individu memberi bobot yang lebih tinggi terhadap informasi yang paling awal diterimanya sehingga keputusan akhir yang diambil cenderung dipengaruhi oleh informasi awal tersebut, dan (*recency effect*) efek resensi, yaitu individu memberi bobot yang lebih tinggi pada informasi yang paling akhir diterimanya sehingga keputusan akhir yang diambil cenderung dipengaruhi oleh informasi akhir tersebut.

Efek urutan ini sangat dimungkinkan terjadi dalam bidang akuntansi manajemen, salah satunya ialah dalam penyusunan anggaran tahunan perusahaan yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengolah informasi terkait. Penelitian ini

mengacu pada model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992) dengan berasumsi bahwa tugas penyusunan anggaran merupakan tugas yang familiar dilakukan oleh para manajer, serta menggunakan beberapa informasi seri pendek untuk tujuan penyederhanaan kasus eksperimen.

Efek urutan memiliki dampak negatif dalam keputusan manajemen, khususnya penyusunan anggaran. Sebagai contoh, ketika manajer memperoleh informasi dari akuntan manajemen terkait anggaran yang akan disusun, informasi tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif. Proses perolehan informasinya pun dapat secara bertahap maupun simultan yang dapat mengakibatkan terjadinya efek urutan. Pada mulanya manajer menerima beberapa informasi positif, kemudian pada akhir penyusunan diperoleh informasi negatif, apabila terjadi efek resensi, maka manajer akan memberi bobot lebih tinggi terhadap informasi negatif yang terakhir diterimanya tanpa mempertimbangkan substansinya, dan berlaku sebaliknya apabila terjadi efek primasi. Hal tersebut akan menyebabkan pengambilan keputusan yang bias dalam penyusunan anggaran. Angka yang ditargetkan untuk dicapai dalam anggaran menjadi kurang relevan dan berdampak pada ketepatan pencapaian target.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek moderasi pembingkai informasi dan gaya kognitif terhadap efek resensi pada proses pengambilan keputusan akuntansi manajemen. Beberapa penelitian empiris terdahulu secara konsisten mendokumentasikan bukti yang mendukung bias keputusan model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992) di bidang pengauditan (Asare dan Messier, 1991; Pei *et al.*, 1992; Bamber *et al.*, 1997; Krishnamoorthy *et al.*, 1999; dan Nasution dan Supriyadi, 2007), investasi saham (Alvia dan Sulistiana, 2010; Pinsker, 2011; Gunawan dan Yusuf, 2012; dan Armet, 2013), pelaporan keuangan (Theis *et al.*, 2012) dan akuntansi manajemen (Dillard *et al.*, 1991 dan Rutledge, 1995). Penelitian ini memberi bukti empiris

peran pembingkai informasi dalam memitigasi bias efek urutan bukti dalam bidang akuntansi manajemen serta memberikan kajian yang dapat mengarahkan manajer dalam pengambilan keputusan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dillard *et al.* (1991) dan Rutledge (1995), dengan menggunakan skenario eksperimen, menemukan adanya efek resensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi akuntansi manajemen yang disajikan secara bertahap. Beberapa strategi *debiase* terbukti dapat memitigasi efek resensi, misalnya dengan menggunakan *self-review* pada penugasan audit (Ashton dan Kennedy, 2002), *framing* informasi anggaran laba (Rutledge, 1995), serta informasi tambahan dalam keputusan investasi saham (Alvia dan Sulistiawan, 2010).

Rutledge (1995) menyatakan bahwa manajer akan merevisi keyakinannya terkait kemungkinan ketercapaian anggaran laba seiring dengan informasi mengenai aktivitas tak terduga yang disajikan oleh akuntan manajemen yang dapat menimbulkan efek resensi, namun, Ia juga menunjukkan bahwa *framing* dapat memitigasi efek resensi yang terjadi melalui *framing* yang tak konsisten, misalnya ketika disajikan informasi positif-negatif, kemudian diberi *framing* positif, maka efek resensi yang cenderung terjadi akibat pemberian bobot yang lebih tinggi pada informasi yang paling akhir diharapkan dapat menjadi netral karena diberi *frame* yang berlawanan.

Penelitian ini mengembangkan riset Rutledge (1995) dengan menggunakan skenario eksperimen yang lebih realistis. Rutledge (1995) menggunakan skenario anggaran laba perusahaan dengan subyek eksperimen mahasiswa strata satu, sedangkan penelitian ini menggunakan kasus anggaran biaya mahasiswa dengan subyek eksperimen mahasiswa strata satu. Skenario eksperimen ini dapat lebih mudah terinternalisasi dalam representasi mental subyek eksperimen karena terkait dengan pengalaman sehari-harinya. Selain itu, mode

respon yang dijadikan *treatment* dalam penelitian ini tidak hanya *Step-by-Step* (SbS), tetapi juga menambahkan mode respon *End-of-Sequence* (EoS) kepada subyek dan *framing* konsisten dibandingkan Rutledge (1995). Mode respon EoS penting untuk diuji karena mode ini pada beberapa penelitian diindikasikan dapat menjadi alternatif pengurangan bias resensi, sebagaimana didokumentasikan oleh Ashton dan Kennedy (2002).

Di sisi lain, beberapa penelitian efek resensi di bidang pengauditan yang menggunakan *framing* sebagai suatu strategi untuk memitigasi efek resensi tidak terbukti secara signifikan (Asare, 1992; Guiral dan Esteo, 2006). Hal ini dimungkinkan dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang dapat memengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu faktor psikologis individual, seperti gaya kognitif (Chan, 1995; Alvia dan Sulistiawan, 2010). Gaya kognitif diyakini dapat memengaruhi individu dalam memroses informasi yang diperolehnya dalam proses pengambilan keputusan (Chenhall dan Morris, 1991; Chan, 1995).

Dengan menggunakan metode eksperimen antar subyek 2x2x2 yang diikuti oleh 100 mahasiswa program strata-1 dari dua perguruan tinggi di provinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *framing* dapat mengurangi bias efek resensi pada mode respon SbS, tetapi tidak pada mode respon EoS. Kondisi ini didukung dengan efek interaksi antara order informasi dan mode respon mengindikasikan bahwa mode respon EoS sendiri dapat mengurangi efek resensi, namun demikian, efek interaksi antara order informasi, *framing*, dan gaya kognitif pada kedua mode respon tidak terdukung.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori, terutama tentang efek urutan dan efek interaksi urutan dengan *framing* dan gaya kognitif dalam mode respon SbS ataupun EoS di bidang akuntansi manajemen, khususnya penyusunan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi

di dunia praktik terkait petunjuk dalam perancangan sistem informasi akuntansi manajemen dalam hal penyediaan urutan serta *framing* informasi yang mungkin dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan manajemen sehingga dihasilkan kinerja yang optimal.

Secara berurutan, bagian selanjutnya artikel ini akan mendeskripsikan kajian teoretis dan pengembangan hipotesis, diikuti dengan metode penelitian, dan hasil penelitian. Bagian terakhir membahas simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORETIS

Model Belief-Adjustment dan Efek Urutan

Penelitian mengenai efek urutan yang dianalisis menggunakan model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992) terkait dengan perbedaan tipe informasi meliputi kompleksitas dan panjangnya seri informasi, serta cara merespon serangkaian informasi. Penelitian ini menggunakan tipe informasi yang sederhana serta merupakan pekerjaan yang familiar baginya; informasi berseri pendek (antara 2-12 item), yaitu 4 item (seperti pada eksperimen Ashton dan Ashton (1988); dan kedua mode respon, baik *Step-by-Step* (SbS) di mana subjek diminta untuk merevisi keyakinannya secara bertahap setiap informasi diperoleh, dan *End-of-Sequence* (EoS) di mana subjek diminta untuk merevisi keyakinan awalnya pada akhir perolehan informasi secara simultan. Model *belief-adjustment* yang dikembangkan oleh Hogarth dan Einhorn (1992) mengasumsi-

kan bahwa individu menyelesaikan tugas revisi keyakinan secara umum menggunakan proses *anchoring* dan *adjustment* yang bertahap di mana opini awal (*anchor*) disesuaikan dengan dampak dari beberapa item informasi yang diperoleh berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di mana subjek diminta untuk merevisi keyakinannya tentang hipotesis kausal dalam konteks akuntansi manajemen yang tergolong kategori tugas evaluasi. Penelitian ini mengasumsikan penggunaan tugas evaluasi (bukan estimasi) (lihat Hogarth dan Einhorn, 1992) untuk dua alasan: (1) Sifat dari tugas penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer meliputi evaluasi terhadap informasi baru yang diperoleh, apakah berakibat positif/negatif terhadap target kenaikan anggaran; dan (2) penelitian-penelitian sebelumnya mengenai efek urutan dalam bidang akuntansi manajemen menggolongkan tugasnya sebagai tugas evaluasi, bukan estimasi (Dillard *et al.*, 1991; Rutledge, 1995), sehingga pengkodean informasi baru yang diperoleh dapat berupa positif atau negatif.

Studi Hogarth dan Einhorn (1992) terkait tugas evaluasi menunjukkan pengaruh tipe tugas dan mode respon terhadap kecenderungan munculnya efek primasi/resensi yang dirangkum dalam tabel 1 berikut.

Model Hogarth dan Einhorn (1992) mengimplikasikan bahwa evaluasi manajer akan dipengaruhi oleh urutan perolehan informasi yang dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1
Hasil penelitian Hogarth dan Einhorn (1992) terkait efek urutan

Tipe informasi ↓ Mode Respon →	<i>Mixed</i>		<i>Consistent</i>	
	EoS	SbS	EoS	SbS
Seri pendek:				
- Sederhana	Primasi	Resensi	Primasi	Tidak ada efek
- Kompleks	Resensi	Resensi	Tdk ada efek	Tidak ada efek
Seri panjang	Cenderung primasi	Cenderung primasi	Primasi	Primasi

Hal tersebut dapat berkaitan dengan bagaimana sistem informasi manajemen dirancang untuk menghasilkan suatu informasi dan bagaimana informasi digunakan oleh akuntan manajemen (Dillard *et al.*, 1991).

Hasil studi Hogarth dan Einhorn (1992) yang akan diuji kembali dalam penelitian ini (khususnya dalam konteks akuntansi manajemen), yaitu apakah efek resensi terbukti terjadi pada tugas dengan informasi sederhana berseri pendek dan beragam dalam mode respon SbS, serta apakah efek primasi terbukti terjadi pada tugas dengan informasi sederhana berseri pendek dan beragam dalam mode respon EoS, yang dimaksud dengan informasi beragam ialah ketika informasi yang diperoleh memiliki pengkodean/tipe yang berbeda/berlawanan, misalnya informasi positif, kemudian informasi negatif, ataupun sebaliknya.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait efek urutan yang terjadi akibat perolehan informasi beragam telah dilakukan di bidang akuntansi dan audit. Penelitian Ashton dan Ashton (1988) menemukan bahwa dengan disajikannya bukti beragam secara berurutan, revisi keyakinan para auditor dipengaruhi oleh urutan informasi secara signifikan, sehingga penilaian akhir mereka terhadap suatu tugas audit merefleksikan efek resensi. Kemudian, Tubbs *et al.*, (1990) melalui tugas eksperimen mengenai penugasan audit menggunakan mode respon SbS juga menemukan hasil yang konsisten, yaitu terjadinya efek resensi. Penemuan selanjutnya terkait efek resensi yang terjadi dalam revisi keyakinan para auditor juga diperoleh Asare (1992) dalam tugas audit untuk penilaian kelangsungan perusahaan (*going-concern task*). Dalam penilaian tersebut ditemukan adanya bias dalam pengambilan keputusan melalui beberapa pilihan jenis opini audit (Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian). Hasilnya ialah auditor yang mendapatkan bukti konfirmatif yang positif di akhir penyajian, menunjukkan keyakinan akhir yang lebih kuat terkait kelangsungan

perusahaan klien mereka, serta cenderung memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, daripada auditor lain yang mengevaluasi bukti audit secara berlawanan, yaitu bukti negatif disajikan di akhir.

Studi yang dilakukan oleh Dillard *et al.* (1991) memberikan dukungan terhadap prediksi model *belief-adjustment* pada eksperimen Hogarth dan Einhorn (1992) dalam kasus penyajian informasi beragam yang diperoleh dengan menggunakan mode respon SbS mengakibatkan terjadinya efek resensi. Temuan tersebut ialah hasil dari eksperimen yang dilakukan pada mahasiswa MBA yang mengevaluasi beberapa hipotesis dalam berbagai kasus akuntansi dan umum. Selain itu, Rutledge (1995) menggunakan skenario akuntansi manajemen dan memberikan beberapa informasi positif dan negatif terkait kemungkinan seberapa besar tingkat keberhasilan manajer dalam mencapai anggaran laba perusahaan. Temuannya ialah bahwa manajer yang memperoleh informasi negatif-positif akan lebih meningkatkan keyakinannya akan ke tercapaian laba daripada manajer yang memperoleh informasi positif-negatif, namun, dalam penelitian Rutledge (1995) juga menemukan bahwa mbingkai informasi dengan tidak konsisten (berlawanan arah) dapat memitigasi terjadinya efek resensi.

Pinsker (2011) menemukan adanya efek resensi yang kuat pada revisi keyakinan para investor non-profesional, dan lebih kuat secara signifikan ketika informasi disajikan secara berurutan dibanding dengan disajikan secara simultan.

Di sisi lain, penelitian efek urutan terkait mode respon EoS pada informasi beragam yang sederhana dan berseri pendek menghasilkan beberapa temuan yang beragam, seperti munculnya efek primasi pada prediksi model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992), namun Tubbs *et al.* (1990) dengan skenario audit dan Almilia (2012) dengan skenario investasi saham menemukan bahwa tidak terjadi efek urutan pada mode respon EoS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh urutan

informasi terhadap proses revisi keyakinan yang dialami oleh manajer dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan anggaran tahunan perusahaan. Penyusunan anggaran tahunan perusahaan membutuhkan waktu beberapa bulan dalam pengumpulan informasi dari akuntan manajemen yang biasanya diperoleh secara bertahap. Pertama manajer melakukan evaluasi terhadap anggaran tahun berjalan serta informasi-informasi terkait kejadian yang dapat berpengaruh terhadap target anggaran tahun berikutnya, kemudian manajer menetapkan suatu angka yang menjadi target pada anggaran tahun berikutnya. Angka yang ditetapkan oleh manajer menjadi komitmen/tolak ukur dalam penilaian kinerja manajemen, sehingga keputusan manajer dalam penentuan target anggaran diharapkan tidak bias dan relevan.

Untuk tujuan penyederhanaan dan relevansi tugas bagi partisipan, yang dalam hal ini adalah mahasiswa, tugas eksperimen yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah terkait revisi keyakinan terhadap kenaikan anggaran biaya mahasiswa di tahun berikutnya. Skenario anggaran biaya mahasiswa ini dianggap sesuai dengan filosofi proses penyusunan anggaran tahunan perusahaan yang dilakukan oleh manajer, sehingga penilaian yang dilakukan partisipan mahasiswa diharapkan dapat merepresentasikan perilaku manajer perusahaan.

Anggaran biaya yang disusun oleh mahasiswa diasumsikan mengalami kenaikan, sebab suatu anggaran biaya pada umumnya akan mengalami inflasi karena tidak terkait dengan target produksi atau pendapatan yang harus dicapai seperti pada anggaran perusahaan. Keputusan kenaikan anggaran pada tugas eksperimen tersebut berdampak pada respon yang berbeda pada umumnya, yakni perolehan informasi yang bersifat positif justru akan menurunkan keyakinan subjek terhadap kenaikan anggaran, dan sebaliknya informasi yang bersifat negatif justru akan menaikkan keyakinan subjek terhadap kenaikan anggaran.

Berdasar pada prediksi model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992) serta beberapa penelitian sebelumnya terkait penyajian informasi yang berseri pendek, sederhana, dan beragam, yang menghasilkan efek resensi pada mode respon SbS, dan efek primasi pada mode respon EoS, maka dapat dinyatakan dua hipotesis pertama sebagai berikut.

H_{1a} : Subjek yang menerima informasi dengan urutan +++- (positif-negatif) akan meningkatkan keyakinannya terhadap kenaikan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang menerima informasi dengan urutan --++ (negatif-positif) pada mode respon SbS.

H_{1b} : Subjek yang menerima informasi dengan urutan +++- (positif-negatif) akan meningkatkan keyakinannya terhadap kenaikan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan subjek yang menerima informasi dengan urutan --++ (negatif-positif) pada mode respon EoS.

Framing Informasi dan Efek Urutan

Framing mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah hipotesis dapat dievaluasi dalam beberapa alternatif (Kahneman dan Tversky, 1981). Riset psikologi yang menguji efek *framing* menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam susunan kata ataupun penyajian sebuah tugas dapat mengubah kecenderungan seorang individu, sehingga memengaruhi alternatif keputusan yang dipilihnya (Gorman, 1986, dalam Guiral dan Esteo, 2006).

Pengambilan keputusan individu dapat dipengaruhi oleh bagaimana informasi tersebut di-*frame*, baik *frame* negatif ataupun positif. Tingkat keyakinan akan menurun apabila diperoleh informasi positif kemudian negatif akibat adanya efek resensi kemungkinan dapat dimoderasi oleh *framing* informasi yang relevan dengan keputusan yang akan diambil (Fischhoff, 1983). Akuntan manajemen berperan sebagai penyedia informasi untuk menunjang pengambilan

keputusan manajer yang mana informasi tersebut dapat di-frame positif ataupun negatif. Terdapat kemungkinan bahwa pengambilan keputusan yang tidak optimal dapat dihindari dengan membingkai informasi yang relevan dengan keputusan yang sedang dipertimbangkan. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa pembedaan positif dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh yang tidak semestinya dari informasi negatif, dan pembedaan negatif dapat digunakan untuk menetralkan pengaruh yang tidak semestinya dari informasi positif (Rutledge, 1995).

Dalam studi yang dilakukan oleh Asare (1992) terkait keputusan auditor mengenai asumsi *going-concern* kliennya, ditemukan bahwa *framing* hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi efek resensi, sedangkan, Rutledge (1995) menemukan bahwa *framing* informasi anggaran terbukti memoderasi efek resensi. Penemuan yang kontras ini membuat peneliti ingin menguji kembali apakah *framing* memang dapat memoderasi efek urutan yang terjadi akibat penyajian informasi yang beragam.

Logika pemikiran untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini mengacu pada Rutledge (1995), yaitu ketika perolehan informasi positif, kemudian negatif, efek resensi yang terjadi seharusnya berkurang ketika informasi di-frame positif (inkonsisten), dan ketika perolehan informasi negatif, kemudian positif, efek resensi yang terjadi seharusnya berkurang ketika informasi di-frame negatif (inkonsisten). Peneliti menduga bahwa logika tersebut juga dapat berlaku pada efek primasi yang terjadi dalam penggunaan mode respon EoS, sehingga hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut.

H_{2a}: *Framing* akan memoderasi efek urutan yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi beragam (positif-negatif; negatif-positif) dalam mode respon SbS.

H_{2b}: *Framing* akan memoderasi efek urutan yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi beragam (positif-negatif;

negatif-positif) dalam mode respon EoS.

Interaksi Urutan, Framing Informasi dan Gaya Kognitif

Gaya kognitif merupakan suatu pilihan cara seseorang dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data yang berpengaruh terhadap bagaimana individu menganalisis lingkungan sekitarnya terkait informasi, bagaimana individu mengorganisir dan menginterpretasikannya, serta bagaimana individu mengintegrasikannya ke dalam suatu model, yang pada akhirnya dapat memberi arahan terhadap perilaku yang akan diambilnya (Allinson dan Hayes, 2012).

Terdapat beberapa instrumen gaya kognitif yang digunakan dalam penelitian terkait akuntansi, seperti Field Dependent-Field Independent (Witkin *et al.*, 1977) yang digunakan Chan (1995) untuk menganalisis pengaruh moderasi terhadap efek resensi dalam tugas audit, MBTI (*Myers-Briggs Type Indicator*) *Sensing-Intuition* yang digunakan Chenhall dan Morris (1991) dalam menganalisa *opportunity cost* dalam suatu keputusan penganggaran modal, serta *the Cognitive Style Index* (CSI) oleh Allinson dan Hayes (1996) yang telah digunakan Nasution dan Supriyadi (2007) serta Alvia dan Sulistiawan (2010) dalam kaitannya dengan efek resensi.

Studi empiris yang dilakukan Allinson dan Hayes dengan menggunakan CSI mengkonfirmasi dimensi generik gaya kognitif, yaitu intuitif dan analitis (Nasution dan Supriyadi, 2007). Gaya kognitif intuitif lebih mengandalkan otak belahan kanan yang memiliki karakteristik intuitif, integratif, cara berpikir non-linier, pertimbangan berdasarkan perasaan, dan perspektif luas, sedangkan, gaya kognitif analitis lebih mengandalkan fungsi otak belahan kiri yang memiliki karakteristik analitis, logikal, pemrosesan informasi sekuensial/bertahap, pertimbangan berdasarkan penalaran, dan fokus pada detail. Peneliti memilih menggunakan dimensi gaya kognitif dari *the*

Cognitive Style Index (CSI) karena telah terbukti reliabilitas dan validitasnya (Allinson dan Hayes, 2012) sebagai suatu gaya kognitif yang memengaruhi individu dalam menelaah informasi yang diperolehnya, khususnya dalam hal ini ialah informasi yang didapat secara bertahap, sehingga diharapkan individu dengan gaya kognitif tertentu akan memoderasi efek urutan, baik meningkatkan atau mengurangi efek urutan.

Studi mengenai keterkaitan antara gaya kognitif dengan efek urutan, dalam hal ini efek resensi, telah dilakukan dalam bidang pengauditan (Chan, 1995; Nasution dan Supriyadi, 2007) dan investasi saham (Alvia dan Sulistyawan, 2010), dan mungkin saja hal ini yang mengakibatkan beberapa penemuan beragam terkait interaksi efek urutan dan *framing*, oleh karena itu, diduga efek urutan dan *framing* informasi akuntansi manajemen pun berinteraksi dengan gaya kognitif yang dapat dinyatakan dalam hipotesis ketiga sebagai berikut.

H_{3a} : *Framing* dan gaya kognitif akan memoderasi efek urutan yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi beragam (positif-negatif; negatif-positif) dalam mode respon SbS.

H_{3b} : *Framing* dan gaya kognitif akan memoderasi efek urutan yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi beragam (positif-negatif; negatif-positif) dalam mode respon EoS.

METODE PENELITIAN

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Akuntansi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dan Mahasiswa PPAk Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta. Mahasiswa akuntansi dipilih menjadi sampel penelitian oleh karena instrumen eksperimen yang berupa suatu kasus penganggaran, sehingga partisipan setidaknya diharapkan memahami istilah-istilah serta tujuan dari pertanyaan dalam kasus yang diberikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil partisipan niscaya menyerupai

keputusan manajer (Nahartyo, 2012). Untuk mengetahui bahwa mahasiswa memahami tugas dan peran yang diberikan dengan baik maka dilakukan cek manipulasi. Tiap-tiap partisipan akan ditugaskan secara acak pada tiap kelompok eksperimen. Dalam eksperimen ini partisipasi partisipan bersifat sukarela.

Keseluruhan subjek yang ikut berpartisipasi dalam eksperimen ini berjumlah 137 orang dengan rata-rata usia partisipan 19,69 tahun. Dari 137 data subjek yang berpartisipasi, terdapat 37 orang yang tidak lolos cek manipulasi, sehingga hanya 100 data subjek (73%) yang akan diolah dan dianalisis lebih lanjut. Karakteristik demografi partisipan adalah 27 pria (27%) dan 73 wanita (73%), 86 Mahasiswa S1 Akuntansi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah (86%) dan 14 Mahasiswa PPAk Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta (14%). Uji-t menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan ($p > 0,05$) antar variabel demografi (jenis kelamin nilai $Sig.=0,625$ dan tingkat pendidikan nilai $Sig.=0,106$), dan antara partisipan yang lolos cek manipulasi dengan yang tidak lolos cek manipulasi (nilai $Sig.=0,161$).

Desain Penelitian

Suatu eksperimen laboratorium 2x2x2 *between-subject* dengan faktor urutan penyajian informasi (dua level: positif-negatif; negatif-positif), mode respon (dua level: SbS; EoS), dan *framing* informasi (konsisten; inkonsisten) dirancang untuk menginvestigasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Pemilihan metoda ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: (1) konsisten dengan penelitian-penelitian mengenai efek resensi, (2) mampu menguji pengaruh interaksi dari variabel independen terhadap variabel dependen, (3) menghindari terjadinya *demand effect*, yaitu partisipan mengetahui arah dari kondisi yang diberikan (Nasution dan Supriyadi, 2007). Desain eksperimen dalam penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Desain Eksperimen

Desain 2 x 2 x 2 ANOVA				
Framing	Step-by-Step (SbS)		End-of-Sequence (EoS)	
	++--	--++	++--	--++
Konsisten	Sel 1	Sel 2	Sel 5	Sel 6
Inkonsisten	Sel 3	Sel 4	Sel 7	Sel 8

Prosedur dan Skenario Eksperimen

Penelitian ini menggunakan eksperimen tulen (*true experiment*) di mana variabel independen dimanipulasi oleh eksperimenter dan manipulasi tersebut diaplikasikan secara acak (*random*) kepada grup-grup subjek guna meningkatkan kemungkinan kesamaan atau homogenitas antar grup dalam eksperimen (Nahartyo, 2012). Eksperimen dalam riset ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu *pilot test*, pelaksanaan eksperimen inti, *manipulation check*, dan *demography test*. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan cara *paper and pencil test*, yaitu cara eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh subjek secara manual. Seluruh penugasan untuk masing-masing *treatment* (urutan, mode respon dan *framing* informasi) dilakukan secara acak/*random*.

Tugas eksperimen dalam penelitian ini mengadaptasi teknik *framing* seperti pada skenario Rutledge (1995) yang tergolong *framing* atribut dengan menggunakan kasus penganggaran, dalam hal ini anggaran biaya hidup dan biaya pendidikan mahasiswa. Semua partisipan diberi instruksi untuk tetap berperan sebagai mahasiswa yang sedang mememikirkan kenaikan anggaran biaya hidup serta biaya pendidikan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait kasus anggaran. Subjek disajikan informasi mengenai latar belakang serta beberapa informasi terkait anggaran tahun berjalan (tahun ajaran 2013/ 2014). Rincian anggaran biaya hidup dan biaya pendidikan tahunan dengan total Rp24.015.000,- menjadi informasi awal yang diterima oleh subjek. Kemudian, subjek diminta untuk menentu-

kan keyakinan awal terkait kemungkinan kenaikan anggaran tahun berikutnya (tahun ajaran 2014/2015) sebagai *initial anchor*.

Berikutnya informasi tambahan diberikan secara bertahap untuk mode respon SbS dan secara simultan untuk mode respon EoS. Subjek diberi informasi positif kemudian negatif (P1-P2-N1-N2), atau informasi negatif kemudian positif (N1-N2-P1-P2), dengan *framing* positif/negatif. Informasi tambahan yang diperoleh partisipan ialah sebagai berikut.

Informasi Positif I (P1):

Pemerintah berencana memberi subsidi biaya pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun ajaran 2014/2015 melalui bantuan operasional yang bersumber dari APBN. Hal tersebut dimungkinkan akan berdampak pada penurunan biaya pendidikan/kuliah tahunan sebesar 20%.

Informasi Positif II (P2):

Pemerintah Daerah berencana mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif angkutan umum untuk pelajar dan mahasiswa di mana tarif tersebut akan lebih rendah dibandingkan penumpang pada umumnya. Peraturan ini rencananya dikeluarkan sekitar bulan Oktober 2014. Hal ini dimungkinkan berdampak pada penurunan biaya transportasi sebesar 27%."

Informasi Negatif I (N1):

Pemerintah berencana mengurangi subsidi listrik di bulan Oktober 2014 yang berdampak pada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15%. Hal ini dimungkinkan

berdampak pada kenaikan biaya akomodasi (kost) sebesar 8-10%.

Informasi Negatif II (N2):

Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar di bulan September 2014 yang berdampak pada kenaikan BBM sebesar 30%. Hal ini dimungkinkan berdampak pada kenaikan biaya transportasi sebesar 23-25%.

Pada setiap informasi positif yang disajikan ditambahkan *framing* atribut, salah satu contohnya sebagai berikut.

Framing positif : terdapat kemungkinan sebesar 70% bahwa penurunan biaya tersebut akan terjadi.

Framing negatif : terdapat kemungkinan sebesar 30% bahwa penurunan biaya tersebut tidak akan terjadi.

Sedangkan *framing* yang disajikan pada setiap informasi negatif, salah satu contohnya ialah sebagai berikut.

Framing positif : terdapat kemungkinan sebesar 25% bahwa kenaikan TDL *tidak akan* terjadi.

Framing negatif : terdapat kemungkinan sebesar 75% bahwa kenaikan TDL *akan* terjadi.

Setiap kali menerima informasi tambahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, subjek diminta memberikan revisi keyakinan terkait kenaikan anggaran dengan skala 100 poin (0%-100%) untuk kelompok mode respon SbS, sedangkan, untuk kelompok mode respon EoS hanya merevisi keyakinannya di akhir sesi setelah keseluruhan informasi disajikan secara simultan. Setelah sesi ini, partisipan melengkapi prosedur untuk cek manipulasi, kemudian mengisi kuesioner terkait gaya kognitif dan informasi terkait karakteristik demografi, lalu pada akhir sesi subjek diberi *debriefing* terkait penelitian.

Pengukuran Variabel

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah urutan informasi yang diberikan, yaitu be-

rupa dua informasi positif dan dua informasi negatif. Kemudian, variabel pemoderasi yang diteliti ialah mode respon SbS dan EoS; *framing* informasi konsisten, yaitu urutan informasi positif-negatif, *di-frame* negatif dan urutan informasi negatif-positif yang *di-frame* positif, atau inkonsisten, yaitu urutan informasi positif-negatif, *di-frame* positif dan urutan informasi negatif-positif yang *di-frame* negatif dalam mode respon SbS untuk mengantisipasi efek resensi, dan berlaku sebaliknya dalam mode respon EoS untuk mengantisipasi efek primasi.

Variabel pemoderasi lainnya ialah gaya kognitif yang menggunakan instrumen CSI (*the Cognitive Style Index*) dari Allinson dan Hayes (1996) yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Allinson dan Hayes, 1996, 2012; Nasution dan Supriyadi, 2007; Alvia dan Sulistiawan, 2010). CSI terdiri dari 38 item pertanyaan dan subjek diminta untuk memilih satu dari tiga jenis jawaban, yaitu sesuai-netral-tak sesuai. Arah penskoran tergantung pada polaritas item pertanyaan (17 *reversed item* untuk menghindari efek bias). Variabel terikat dalam penelitian ini ialah revisi keyakinan dari partisipan yang mungkin menimbulkan efek urutan. Efek urutan diperoleh dari perubahan dari penilaian tingkat keyakinan awal partisipan menjadi penilaian terhadap tingkat keyakinan akhir partisipan (S_4-S_0). Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pada S_0 .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Cek Manipulasi

Pengujian manipulasi dilakukan dengan memberikan tiga pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Setiap subjek harus menentukan dengan benar arah dari informasi yang mereka peroleh, yaitu apakah informasi yang didapatkan bermuatan positif dan negatif, semua positif, ataukah semua negatif. Subjek yang menjawab semua negatif atau semua positif, serta menyatakan bahwa tidak ada informasi yang memengaruhi keyakinannya, akan dikeluarkan dari analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan Uji-t pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata subjek yang menerima urutan informasi ++-- dan --++ (nilai Sig. = 0,000) pada mode respon SbS. Selain itu, rata-rata subjek yang menerima urutan informasi ++-- mengalami peningkatan keyakinan yang lebih tinggi akan kenaikan anggaran dari- pada subjek yang menerima urutan informasi --++. Hal tersebut mencerminkan terjadinya efek resensi karena keyakinan akhir subjek cenderung lebih dipengaruhi oleh informasi terakhir yang diterimanya. Dengan demikian, H_{1a} yang diajukan dalam penelitian ini terdukung oleh data.

Lain halnya dengan pengujian H_{1b}, hasil Uji-t pada tabel 3 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata subjek yang menerima urutan informasi +++ dan --- (nilai Sig. = 0,343) pada mode respon EoS. Hal tersebut merefleksikan bahwa tidak terjadi efek urutan, baik primasi maupun resensi, sehingga H_{1b} yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung oleh data. Hasil ANOVA pada tabel 4 menunjukkan bahwa efek interaksi antara urutan dan *framing* signifikan pada $\alpha=.10$, dengan nilai Sig.=0,065, kemudian dilakukan uji kontras dan ditemukan perbedaan signifikan antara rata-rata sel 1 dan 2 (*framing* konsisten) dengan nilai Sig.=0,000, dan antara rata-rata sel 3 dan 4 yang tidak berbeda secara signifikan (*framing* inkonsisten) dengan nilai Sig.=0,191. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memberi *framing* yang inkonsisten terhadap suatu

penyajian urutan informasi yang beragam dapat mengurangi terjadinya efek urutan, dalam hal ini efek resensi pada mode respon *Step-by-Step* (SbS). Dengan demikian, dari keseluruhan analisis dapat dinyatakan bahwa H_{2a} yang diajukan dalam penelitian ini terdukung oleh data. Gambar 1 menggambarkan *means plot* revisi keyakinan pada mode respon SbS yang menunjukkan bahwa *framing* yang inkonsisten dapat meminimalisir terjadinya efek resensi.

Hipotesis H_{2b} juga diuji dengan menggunakan ANOVA, namun hasil analisis menunjukkan bahwa efek interaksi antara urutan dan *framing* tidak signifikan (Sig.=.280), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efek interaksi antara urutan dan *framing* dalam mode respon EoS. Dengan demikian, H_{2b} yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung oleh data.

Hipotesis penelitian yang ketiga (H_{3a} dan H_{3b}) dianalisis menggunakan *three-way* ANOVA yang dapat menunjukkan efek interaksi antara urutan dan *framing* informasi, serta gaya kognitif pada masing-masing mode respon (SbS/EoS).

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa interaksi antara ketiga variabel tersebut tidak signifikan dengan nilai Sig.=0,415 pada mode respon SbS. Dengan demikian, H_{3a} yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung oleh data. Kemudian, hasil uji ANOVA untuk mode respon *End-of-Sequence* (EoS) juga menunjukkan bahwa interaksi antara ketiga variabel tersebut juga tidak signifikan dengan nilai Sig.=0,289. Dengan demikian, H_{3b} yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung oleh data.

Tabel 3
Hasil Uji-t
Pengujian Hipotesis Pertama

Mode Respon	Urutan	Mean	t-Stat.	Sig.
<i>Step-by-Step</i> (SbS)	++--	9.23	4.221	.000*
<i>Step-by-Step</i> (SbS)	--++	-14.44		
<i>End-of-Sequence</i> (EoS)	++--	-3.91	.958	.343
<i>End-of-Sequence</i> (EoS)	--++	-10.00		

*signifikan pada $\alpha=.01$

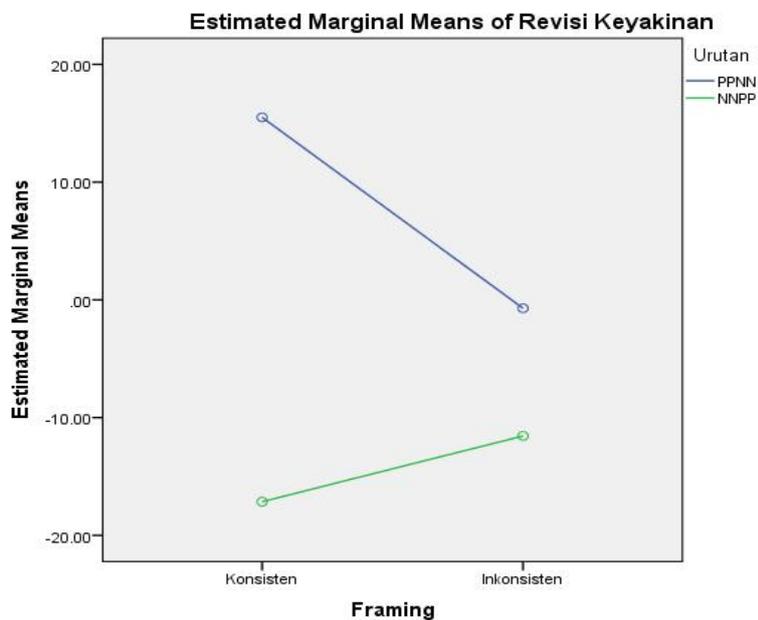
Tabel 4
Hasil ANOVA (Data SbS)

Test of Between-Subjects

Dependent variable: Revisi Keyakinan

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	10479.440 ^a	7	1497.063	3.702	.003
Intercept	589.461	1	589.461	1.458	.234
Urutan	5758.297	1	5758.297	14.241	.000
Framing	343.916	1	343.916	.851	.361
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Gaya_Kognitif	34.647	1	34.647	.086	.771
Urutan*Framing	1447.467	1	1447.467	3.580	.065
Urutan*Gaya_Kognitif	424.144	1	424.144	1.049	.311
Framing*Gaya_Kognitif	46.621	1	46.621	.115	.736
Urutan*Framing*	273.922	1	273.922	.677	.415
Gaya_Kognitif					
Error	18196.032	45	404.356		
Total	29100.000	53			
Corrected Total	28675.472	52			

R squared = .365 (Adjusted R Squared = .267)



Gambar 1
Means Plot Revisi Keyakinan Mode Respon SbS

Analisis Tambahan

Analisis tambahan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui analisis dari keseluruhan data hasil penelitian dengan mode

respon SbS dan EoS dengan menggunakan ANOVA yang menunjukkan bahwa terdapat suatu temuan tambahan yang cukup menarik, yaitu adanya efek interaksi yang

signifikan (pada $\alpha=0,10$) antara urutan dan mode respon ($Sig.=0,051$). Kemudian, analisis kontras menunjukkan bahwa rata-rata urutan ++- dan --+ pada mode respon SbS berbeda secara signifikan ($Sig.=0,000$), sedangkan rata-rata urutan ++- dan --+ pada mode respon EoS tidak berbeda secara signifikan ($Sig.=0,325$), sehingga dapat dikatakan bahwa efek urutan hanya terjadi pada mode respon SbS saja.

Pembahasan

Hipotesis 1a dan hipotesis 1b bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian urutan informasi terhadap revisi keyakinan. Menurut prediksi dari model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992), subjek yang memperoleh informasi berseri pendek (dalam kasus ini 4 item), bersifat sederhana, dan beragam (bersifat positif dan negatif) akan mengalami suatu efek urutan berupa efek resensi pada mode respon *Step-by-Step* (SbS) dan efek primasi pada mode respon *End-of-Sequence* (EoS).

Hipotesis 1a yang menguji data penelitian pada mode respon *Step-by-Step* (SbS) menghasilkan efek urutan berupa efek resensi. Hal ini memvalidasi prediksi model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992), bahwa ketika subjek disajikan informasi bertahap yang berseri pendek, sederhana, dan beragam, maka akan terjadi efek resensi di mana subjek akan cenderung memberi bobot lebih terhadap informasi yang paling akhir diterimanya.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa subjek yang dihadapkan pada tugas penyusunan anggaran, dalam hal ini terkait keyakinannya terhadap kenaikan anggaran tahun berikutnya, ketika diberi informasi positif kemudian negatif memiliki rata-rata revisi keyakinan lebih tinggi daripada subjek yang diberi informasi negatif kemudian positif. Logika berpikir dalam tugas eksperimen yang diberikan ialah ketika subjek menerima informasi yang bersifat positif (misalnya, penurunan biaya), maka subjek akan menurunkan keyakinannya akan kemungkinan kenaikan anggaran tahun

berikutnya. Di sisi lain, ketika subjek menerima informasi yang bersifat negatif (misalnya, kenaikan biaya), maka subjek justru akan menaikkan keyakinannya akan kemungkinan kenaikan anggaran tahun berikutnya. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi beberapa penelitian sebelumnya terkait efek resensi dalam akuntansi manajemen (Dillard *et al.*, 1991; Rutledge, 1995).

Hipotesis 1b dalam penelitian ini menguji data penelitian pada mode respon *End-of-Sequence* (EoS) dan ditemukan tidak terjadi efek urutan, baik efek resensi, maupun primasi, sehingga hipotesis yang diajukan tidak terdukung. Hal ini tidak sesuai dengan prediksi model *belief-adjustment* (Hogarth dan Einhorn, 1992) yang menduga terjadinya efek primasi pada mode respon EoS, namun, beberapa penelitian juga menemukan bahwa informasi beragam yang menggunakan mode respon EoS tidak mengakibatkan terjadinya efek urutan (Tubbs *et al.*, 1990; Almilia, 2012). Terkait dengan hasil analisis tambahan yang menunjukkan bahwa terdapat efek interaksi antara urutan dan mode respon, maka dapat dikatakan bahwa EoS dapat mengurangi terjadinya efek resensi yang terjadi dalam penyajian informasi yang bertahap seperti pada penelitian Hogarth dan Einhorn (1987) dalam Tubbs *et al.* (1990), serta penelitian oleh Ashton dan Kennedy (2002). Hal ini dimungkinkan karena pengaruh berkebalikan yang muncul dari informasi yang disajikan secara bertahap dapat dihilangkan dengan menggabungkan pengaruh informasi positif dan negatif, sehingga akan menghilangkan pengaruh individual informasi negatif dan positif itu sendiri (Almilia, 2012).

Hipotesis 2a dan 2b bertujuan untuk menguji pengaruh moderasi dari *framing* informasi terhadap efek urutan yang terjadi. Hipotesis 2a menguji pengaruh moderasi *framing* informasi ketika subjek dihadapkan pada mode respon *Step-by-Step* (SbS). Tujuan dari pengujian hipotesis ini ialah *framing* informasi dapat dijadikan salah satu solusi untuk memitigasi terjadinya efek resensi dalam penyajian informasi yang bertahap.

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa terdapat efek interaksi yang signifikan antara urutan dan *framing* informasi terhadap revisi keyakinan subjek. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketika informasi yang bertahap di-*frame* secara inkonsisten, yaitu ketika penyajian informasi positif-negatif diberi *framing* positif dan ketika penyajian informasi negatif-positif diberi *framing* negatif, maka efek resensi yang terjadi akan berkurang (menuju ke 0). Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Rutledge (1995) yang menyatakan bahwa teknik *framing* informasi dapat mengurangi terjadinya efek resensi.

Selain itu, Gambar 1 juga menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, yang terkait dengan skenario penyusunan anggaran, *framing* inkonsisten lebih berdampak pada urutan informasi PPNN (++--) dibanding dengan NNPP (--++). Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya *contrast effect* (Hogarth dan Einhorn, 1992) yang menyatakan bahwa *anchor* tinggi lebih sensitif terhadap bukti yang berlawanan (*disconfirmation*) dibandingkan *anchor* rendah.

Penelitian ini tidak mempertimbangkan tinggi-rendahnya *anchor*, namun dapat dikatakan bahwa pada urutan informasi NNPP memiliki *anchor* tinggi. Hal ini disebabkan oleh asumsi skenario yang berupa kenaikan anggaran, sehingga *initial anchor* yang diberikan kepada partisipan tergolong bersifat negatif, kemudian diikuti oleh pemberian informasi tambahan negatif yang berdampak pada *anchor* negatif yang terbentuk semakin tinggi. Informasi tambahan positif yang diperoleh setelahnya, bersifat berlawanan terhadap keyakinan awal, cenderung lebih sensitif terhadap *anchor* yang tinggi, sehingga efek resensi lebih terasa pada urutan NNPP ini. Oleh karena itu, *framing* inkonsisten tidak begitu berdampak seperti pada urutan PPNN. *Contrast effect* ini juga telah diuji dalam penelitian Ashton dan Ashton (1988) dengan skenario audit, dan Almilia (2012) dengan skenario investasi saham. Lain halnya dengan hipotesis 2b yang tidak didukung oleh data

penelitian. Ketika subjek dihadapkan pada mode respon *End-of-Sequence* (EoS), hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat efek utama yang signifikan dari urutan serta *framing* terhadap revisi keyakinan, maupun efek interaksi antara kedua variabel tersebut. Tidak ada-nya efek interaksi antara urutan dan *framing* dalam mode respon EoS ini dimungkinkan karena tidak adanya efek utama yang signifikan dari urutan, baik resensi maupun primasi.

Hipotesis 3a dan 3b bertujuan untuk menguji efek interaksi tiga arah antara variabel urutan, *framing*, dan gaya kognitif terhadap revisi keyakinan, namun, baik hipotesis 3a maupun 3b tidak didukung oleh data penelitian. Jadi, dapat dikatakan bahwa *framing* dan gaya kognitif tidak memoderasi efek urutan secara bersama-sama. Beberapa penelitian terkait efek urutan, khususnya efek resensi, menemukan bahwa urutan dan gaya kognitif berpengaruh signifikan terhadap efek resensi (Chan, 1995; Alvia dan Sulistiawan, 2010). Namun, penelitian yang dilakukan Nasution dan Supriyadi (2007) juga tidak menemukan pengaruh signifikan antara urutan dan gaya kognitif terhadap efek resensi. Kemungkinan terdapat faktor selain *framing* yang berinteraksi signifikan dengan urutan dan gaya kognitif, seperti toleransi ambiguitas (Nasution dan Supriyadi, 2007), terhadap revisi keyakinan, serta terdapat faktor selain gaya kognitif yang berinteraksi signifikan dengan urutan dan *framing* terhadap revisi keyakinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, efek urutan hanya terjadi pada mode respon *Step-by-Step* (SbS) berupa efek resensi, namun tidak terjadi efek urutan pada mode respon *End-of-Sequence* (EoS), sehingga mode respon *Step-by-Step* (SbS) dalam proses penyusunan anggaran tahunan perusahaan perlu mendapatkan perhatian khusus agar pengambilan keputusan manajemen tidak bias karena efek urutan. Kedua, *framing* informasi

anggaran yang inkonsisten dapat mengurangi efek resensi yang terjadi pada mode respon *Step-by-Step* (SbS), sehingga akuntan manajemen dapat menyediakan informasi terakhir terkait anggaran dengan dibingkai secara tak konsisten untuk mengantisipasi terjadinya efek resensi. Ketiga, *framing* informasi anggaran dan gaya kognitif manajer tidak berinteraksi secara signifikan dalam memoderasi efek urutan yang disebabkan oleh penyajian urutan informasi anggaran. Keempat, mode respon *End-of-Sequence* (EoS) dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi efek resensi yang terjadi pada penyajian informasi anggaran yang bertahap, berseri pendek, sederhana, dan beragam, sehingga apabila dimungkinkan akuntan manajemen menyediakan informasi terkait anggaran secara simultan.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoretis dan praktis. Pertama, mode respon SbS memerlukan perhatian yang lebih dalam merespon penyajian informasi beragam terkait pengambilan keputusan anggaran agar efek urutan dapat diminimalisir. Kedua, teknik *framing* dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi bias yang disebabkan oleh efek resensi dalam pengambilan keputusan manajer. Ketiga, mode respon EoS dapat menjadi salah satu solusi, selain teknik *framing*, dalam mengurangi terjadinya efek resensi.

Implikasi bagi dunia praktik, yaitu penelitian ini dapat menjadi petunjuk dalam perancangan sistem informasi akuntansi manajemen dalam hal penyediaan urutan serta *framing* informasi yang dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan manajemen sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Substansi informasi yang penting dapat disajikan paling akhir guna mengantisipasi terjadinya efek urutan dalam penyajian informasi bertahap yang beragam. Selain itu, apabila memungkinkan informasi terkait penyusunan anggaran juga lebih baik disajikan secara simultan sehingga tidak menimbulkan efek urutan yang mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan manajer.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen laboratorium dengan partisipan mahasiswa. Untuk itu, dibutuhkan kehati-hatian untuk mengeneralisasi penelitian ini ke dalam dunia praktik. Kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan efek kekuatan *anchor* yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Ketiga, sebaran data yang tidak seimbang di antara semua sel, akibat hasil cek manipulasi, sehingga kemungkinan akan berdampak pada *robustness* hasil penelitian.

Penelitian selanjutnya diharapkan memverifikasi hasil penelitian ini di dunia praktik, yaitu dengan melakukan eksperimen laboratorium atau *field experiment* dengan menggunakan partisipan manajer yang memang kesehariannya bertugas dalam penyusunan anggaran perusahaan. Dengan demikian, akan memperkuat validitas eksternal penelitian. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan partisipan berbentuk kelompok, tidak hanya individual, karena pada kenyataannya penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan bersifat partisipatif yang menggabungkan beberapa pendapat individu yang terkait. Terakhir, penelitian berikutnya dapat mengikutsertakan variabel berupa kekuatan *anchor* untuk lebih memvalidasi kegunaan *framing* dalam memitigasi efek resensi baik dalam keadaan *anchor* rendah maupun tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allinson, C. dan J. Hayes. 1996. The Cognitive Style Index: A Measure of Intuition-Analysis For Organizational Research. *Journal of Management Studies* 33(1): 119-135.
- Allinson, C. dan J. Hayes. 2012. *The Cognitive Style Index: Technical Manual and User Guide*. Pearson Education. United Kingdom.
- Almilia, L. S. 2012. Model Belief Adjustment dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Doctoral Colloquium & Conference FEB UGM, Yogyakarta, 28-29 November 2012*.

- Alvia, L. dan D. Sulistiawan. 2010. The Impact of Cognitive Style to Recency Effect in Stock Investment: An Experimental Study. *SSRN Working Paper*.
- Armet, N. 2013. How Investors Can Avoid Dangers of Recency Bias. <http://www.moneymanagement.com.au/features/editorial/how-investors-can-avoid-dangers-recency-bias>. Diakses tanggal 7 Mei 2014.
- Asare, S. K. dan W. F. Messier, Jr. 1991. A Review of Audit Research Using the Belief-Adjustment Model. In: L. Ponemon & C.R. Gebhart, *Auditing: Advances in Behavioral Research*. Springer-Verlag. New York.
- Asare, S. K. 1992. The Auditor's Going-Concern Decision: Interaction of Task Variables and the Sequential Processing of Evidence. *The Accounting Review* 67(2): 379-393.
- Ashton, A. H. dan R. H. Ashton. 1988. Sequential belief revision in auditing. *The Accounting Review* 63: 623-641.
- Ashton, R. H. dan J. Kennedy. 2002. Eliminating Recency with Self-Review: The Case of Auditors' 'Going Concern' Judgments. *Journal of Behavioral Decision Making* 3: 221-231.
- Bamber, E. M., R. J. Ramsay, dan R. M. Tubbs. 1997. An Examination of the Descriptive Validity of the Belief-Adjustment Model and Alternative Attitudes to Evidence in Auditing. *Accounting, Organizations and Society* 22(3/4): 249-268.
- Brewer, P. C. 2008. Redefining Management Accounting: Promoting the Four Pillars of Our Profession. *Strategic Finance*.
- Brown, C. 1985. Causal Reasoning in Performance Assessment: Effects of Cause and Effect Temporal Order and Covariation. *Accounting Organizations and Society* 10(3): 255-266.
- Chan, M. K. Mike. 1995. The Moderating Effect of Cognitive Style and Recency Effect on the Auditor Belief Revision Process. *Managerial Auditing Journal* 10(9): 22-28.
- Chenhall, R. dan D. Morris. 1991. The Effect of Cognitive Style and Sponsorship Bias on the Treatment of Opportunity Costs in Resource Allocation Decisions. *Accounting, Organizations and Society* 16(1): 27-46.
- Dillard, J. F., N. L. Kauffman, dan E. E. Spires. 1991. Evidence Order and Belief Revision in Management Accounting Decisions. *Accounting, Organizations and Society* 16(7): 619-633.
- Fischhoff, B. 1983. Predicting Frames. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 9: 103-116.
- Guiral, A. dan F. Esteo. 2006. Are Spanish auditors skeptical in going concern evaluations?. *Managerial Auditing Journal* 21(6): 598-620.
- Gunawan, B. dan M. H. Yusuf. 2012. Pengaruh Order Effect dan Pola Pengungkapan dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal InFestasi* 8(2): 123-136.
- Hogarth, M. R. dan H. Einhorn. 1992. Order Effects in Belief Updating: The Belief-Adjustment Model. *Cognitive Psychology* 24: 1-55.
- Kahneman, D. dan A. Tversky. 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. *Science* 211(4481): 453-458.
- Krishnamoorthy, G., T. J. Mock dan M. T. Washington. 1999. A Comparative Evaluation of Belief Revision Models in Auditing. *Auditing* 18(2): 105.
- Lewis, B., M. Shields, dan S. M. Young. 1983. Evaluating Human Judgments and Decision Aids. *Journal of Accounting Research* 21(1): 271-285.
- Ma, Y. dan M. Tayles. 2009. On The Emergence of Strategic Management Accounting: an Institutional Perspective. *Accounting and Business Research* 39(5): 473-495.
- Nahartyo, E. 2012. *Desain dan Implementasi Riset Eksperimen*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nasution, D. dan Supriyadi. 2007. Pengaruh Urutan Bukti, Gaya Kognitif, dan

- Personalitas terhadap Proses Revisi Keyakinan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007*.
- Pei, B. K. W., S. A. Reed, dan B. S. Koch. 1992. Auditor Belief Revisions in A Performance Auditing Setting: An Application of the Belief-Adjustment Model. *Accounting, Organizations and Society* 17(2): 169-183.
- Pinsker, R. 2011. Primacy or Recency? A Study of Order Effects When Non-professional Investors are Provided a Long Series of Disclosures. *Behavioral Research in Accounting* 23(1): 161-183.
- Rutledge, R. W. 1995. The Ability To Moderate Recency Effects Through Framing Of Management Accounting Information. *Journal of Managerial Issues* 7(1): 27-40.
- Theis, J. C., K. Yankova, dan M. Eulerich. 2012. Information order effects in the context of management commentary: initial experiment evidence. *Journal Management Control* 23: 133-150.
- Tubbs, R. M., W. F. Messier, Jr., dan W. R. Knechel. 1990. Recency Effects in the Auditor's Belief-Revision Process. *The Accounting Review* 65(2): 452-460.

PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, TEKANAN ANGGARAN WAKTU KOMITMEN PROFESIONAL, TERHADAP PERILAKU *DISFUNGSIONAL AUDITOR*

Ongky Hartanto

ongky.hartanto@gmail.com,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

ABSTRACT

Dysfunctional audit behavior is any action taken in the implementation of the auditor's audit program that can reduce or degrade the quality of the audit directly or indirectly. Researchers wanted to determine the effect Effect of locus of control, time budget pressure, and professional commitment to the dysfunctional behavior of auditors. This research is a quantitative research. In this study, the population is one hundred twenty three Auditor of KAP in Surabaya. Auditor sample are ninety four, which will be drawn at random from a population. The sampling technique used in this research is proportional sampling. Professional Commitment, Locus of Control and time budget pressure influence Dysfunctional AuditorBehavior. Professional Commitment, Locus of Control and time budget pressure significantly influence Dysfunctional Behavior Auditor with significant value less than standard. KAP can conduct training arrangements Locus of Control, control time budget pressure, increased professional commitments in order to suppress the dysfunctional behavior of auditors.

Key words: locus of control, time budget pressure, professional commitment, dysfunctional behavior auditors

ABSTRAK

Perilaku audit *disfungsional* adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak. Peneliti ingin mengetahui Pengaruh *Locus of Control*, Tekanan Anggaran Waktu, dan Komitmen Profesional terhadap Perilaku *disfungsional* auditor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seratus dua puluh tiga Auditor dari KAP di Surabaya. Jumlah sampel sembilan puluh empat Auditor, yang akan diambil secara acak dari total populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel proporsional. Komitmen Profesional, *Locus of Control*, dan Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh 99,8% terhadap Perilaku *Disfungsional Auditor*. Komitmen Profesional, *Locus of Control*, dan Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh signifikan terhadap Perilaku *Disfungsional Auditor* dengan nilai signifikansi lebih kecil dari standar. KAP dapat mengadakan pelatihan pengaturan *Locus of Control*, pengendalian tekanan anggaran waktu, peningkatan komitmen profesional, agar menekan perilaku *disfungsional* auditor.

Kata kunci: *locus of control*, tekanan anggaran waktu, komitmen profesional, perilaku *disfungsional* auditor

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit ber

dasarkan atas evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan serangkaian prosedur audit. Hal ini sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (Triono, 2012). Dalam melakukan prosedur audit tidak jarang auditor melakukan perilaku yang menyimpang atau disebut juga perilaku disfungsi. Perilaku menyimpang atau perilaku audit disfungsi adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan suatu program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahardini, 2014).

Seseorang dari bidang akuntansi yang berprofesi sebagai auditor dapat menerapkan ilmu dan teori yang didapat di perguruan tinggi ke dunia nyata, namun selain hal positif di atas, banyak orang yang mempunyai persepsi yang negatif tentang profesi tersebut. Selain kompleks, pekerjaan auditor tidak kenal waktu, selalu dengan tingkat kesibukan waktu yang sangat tinggi. Hal ini dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi auditor. Auditor dituntut harus memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan ini, dan menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dalam waktu terbatas (Marfuah, 2011). Hal yang paling menonjol tentang profesi auditor adalah tingkat stress yang tinggi karena bekerja di bawah tekanan. Saat tingkat stress terlalu rendah maka efektivitas kerja juga cenderung rendah karena tidak adanya faktor pendorong semangat kerja.

Pada umumnya struktur organisasi KAP disusun secara hirarkis dengan susunan sebagai berikut: junior, senior, supervisor, manajer, dan partner. Bila diperbandingkan dengan posisi individual pada struktur organisasi bisnis, auditor junior dan senior setara dengan karyawan yang menduduki posisi level bawah, sedangkan auditor supervisor, manajer, dan partner setara dengan manajer level menengah dan puncak (Marfuah, 2011). Posisi auditor pada hirarki organisasi KAP menggambarkan tugas, kewenangan dan tanggungjawab individu auditor di KAP. Auditor junior dan senior melaksanakan sebagian besar prosedur audit, dan kinerja mereka di-

supervisi oleh auditor pada posisi yang lebih tinggi.

Locus of control merupakan karakteristik auditor yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya. Auditor yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control* internal, pada pihak auditor yang meyakini keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh faktor eksternal (di luar kontrolnya) disebut memiliki *locus of control* eksternal (Triono, 2012).

Perilaku audit *disfungsi* adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak. Tindakan-tindakan yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung disebut sebagai perilaku reduksi kualitas audit (*audit quality reduction behaviors*), sedangkan yang dapat mereduksi kualitas audit secara tidak langsung disebut perilaku *under-reporting of time*. Kedua perilaku tersebut dapat juga dikategorikan sebagai perilaku tidak etis, karena auditor memalsukan laporan pekerjaan mereka dan melanggar standar profesional dan kebijakan KAP (Silaban, 2011).

Komitmen profesional merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi isu-isu etis. Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi (Silaban, 2011). Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut: (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk melakukan usaha sekuat tenaga demi kepentingan profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi. Oleh karena itu, perilaku *disfungsi* auditor dalam pelaksanaan

program audit dapat juga dipengaruhi komitmen profesional mereka. Bukti empiris pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku audit *disfungsional* masih terbatas (Silaban, 2011).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku *disfungsional* auditor?, (2) Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku *disfungsional* auditor?, (3) Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku *disfungsional* auditor?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap perilaku *disfungsional* auditor, (2) Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku *disfungsional* auditor, (3) Untuk mengetahui ada pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku *disfungsional* auditor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat antara lain dapat memberikan sumbangan aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menjadi bahan referensi studi akuntansi khususnya tentang *locus of control*, tekanan anggaran waktu, dan komitmen profesional terhadap perilaku *disfungsional* auditor.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terkait dengan persepsi mahasiswa tentang *locus of control*, tekanan anggaran waktu, dan komitmen profesional terhadap perilaku *disfungsional* auditor. Mahasiswa dapat lebih mengendalikan persepsinya dalam *locus of control*, tekanan anggaran waktu, dan komitmen profesional terhadap perilaku *disfungsional* auditor.

TINJAUAN TEORETIS

Locus of control merupakan karakteristik individual yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang tentang faktor-faktor yang berpengaruh atas keberhasilan

atau kegagalan yang mereka alami (Triono, 2012). Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control internal*, sebaliknya individu yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dihadapinya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (di luar kontrolnya) disebut memiliki *locus of control eksternal*. Setiap individu memiliki *locus of control* tertentu yang berada diantara kedua ekstrim tersebut. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Rotter mengenai *locus of control*, terdapat dua tipe *locus of control*, yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*. Menurut Crider (Ghufron, 2010) terdapat perbedaan karakteristik diantara dua tipe tersebut, yaitu: (1) *Locus of control internal* yang meliputi: suka bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan suatu masalah, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin, mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin meraih kesuksesan, (2) *Locus of control eksternal*: kurang memiliki inisiatif, mempunyai persepsi bahwa hanya ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan, kurang suka berusaha, karena percaya bahwa kesuksesan dikontrol oleh faktor luar, kurang mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah (Dewi, 2014). Samaei *et al.* (2012) menjelaskan bahwa individu dengan *locus of control eksternal* memiliki kontrol yang kurang terhadap kehidupan mereka dan mereka percaya bahwa apa yang terjadi bagi mereka adalah hasil dari faktor eksternal. Seseorang yang memiliki *locus of control eksternal* percaya bahwa hasil dan perilaku mereka disebabkan faktor dari luar dirinya. Menurut Wuryaningsih (2013), individu dengan *locus of control eksternal* yang rendah memiliki persepsi terhadap kejadian baik positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan diri sendiri dan berada di bawah pengendalian dirinya.

Pengertian Anggaran Waktu menurut

McGuy (Marfuah, 2011) adalah waktu yang dialokasikan untuk melakukan langkah-langkah dalam program audit. Penyusunan anggaran waktu dilakukan pada tahap awal dari audit, yaitu pada tahap perencanaan. Walaupun banyak penelitian yang mengatakan bahwa anggaran waktu sebagian besar memberikan pengaruh terhadap kualitas audit, namun berguna tidaknya anggaran waktu bergantung kepada profesionalisme auditor yang bersangkutan ketika melakukan audit. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Jemada, 2013). Tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh klien merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbang tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Fonda, 2014).

Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit (Silaban, 2011). Komitmen profesional didasarkan pada premis bahwa individu membentuk suatu kesetiaan (*attachment*) terhadap profesi selama proses sosialisasi ketika profesi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma profesi. Setiap tindakan individu pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, setelah berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman pribadi dan sistem nilai individu, akan menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam setiap perilakunya, sebelum akhirnya individu tersebut menentukan

tindakan apa yang akan dilakukan (Sulistiyawati, 2014). Komitmen Profesional Kontinu (KPK) berhubungan dengan pada sejauh mana individual tetap berada pada suatu profesi. Komitmen profesional kontinyu merupakan bentuk komitmen seseorang terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika seseorang meninggalkan profesi.

Komitmen profesional kontinu berargumen bahwa individu mempertahankan komitmen dengan suatu entitas berkaitan dengan akumulasi investasi pada suatu entitas atau tidak adanya alternatif yang sebanding dengan entitas tersebut (Nisa, 2013). Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering pula disebut auditor eksternal atau auditor independen. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan akuntan publik semakin meningkat pada masa globalisasi seperti saat ini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin meningkat pula jumlah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia, sehingga jasa akuntan publik semakin dibutuhkan. Meningkatkan kepercayaan akan akuntan publik bukanlah hal yang mudah (Mahardini, 2014).

Dalam melakukan prosedur audit tidak jarang auditor melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang atau disebut juga perilaku disfungsional. Perilaku menyimpang atau perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan suatu program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahardini, 2014). Perilaku disfungsional yang umumnya dilakukan oleh seorang auditor menurut Donnelly (dalam Saputri, 2015) diantaranya (1) *under-reporting of time*, (2) *premature sign-off*, dan

(3) *altering/replacing of audit procedures*. Penyimpangan perilaku auditor dalam melakukan audit dapat mempengaruhi reliabilitas laporan audit sehingga perilaku disfungsi ini akan mengancam keyakinan publik pada profesi akuntan publik. Perilaku Reduksi Kualitas Audit menurut Pierce (dalam Tanjung, 2013) dapat dilakukan dengan berbagai tindakan seperti: (1) penghentian prematur prosedur audit (*pre-mature sign-off*), (2) review yang dangkal atas dokumen klien, (3) tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien, (4) penerimaan atas penjelasan klien yang tidak memadai, (5) mengurangi pekerjaan audit dari yang seharusnya dilakukan dan tidak memperluas *scope* pengauditan ketika terdeteksi transaksi atau pos yang meragukan. Dan tambahan dari Donnelly (dalam Tanjung, 2013) adalah (6) merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan audit di lapangan (*replacing and altering original audit procedures*).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Triono (2012) Pengaruh *Locus Control*, Komitmen Organisasional, dan Posisi Terhadap Penerimaan Perilaku *Disfungsi* Audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *locus of control*, organisasi komitmen, dan posisi auditor mempengaruhi penerimaan audit *disfungsi* perilaku. Penelitian lain dilakukan oleh Marfuah (2011) dengan judul Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku *Disfungsi* Auditor dalam Perspektif Teoretis Sress Kerja. Penelitian ini menguji bagaimana indikator-indikator berupa Tipe KAP, Posisi Auditor, Fee Audit, Program Audit, Partisipasi Auditor dan Waktu Aktual Audit Tahun Lalu berpengaruh terhadap Pencapaian Anggaran Waktu, dan selanjutnya menguji bagaimana Pencapaian Anggaran Waktu berpengaruh terhadap perilaku *disfungsi* auditor berupa *Reduced Audit Quality Practices* (RAQPs), dan *Under Reporting of Time* (URT). Peneliti yang lain yaitu Silaban (2011) telah melakukan penelitian Pengaruh Multidimensi Komitmen Profesional terhadap Perilaku

Audit *Disfungsi*.

Perilaku *disfungsi* auditor dalam pelaksanaan program audit dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah masalah perilaku *disfungsi* auditor, namun karena luasnya ruang lingkup masalah utama maka peneliti membatasi hanya masalah pengaruh *locus of control*, tekanan anggaran waktu, dan komitmen profesional terhadap perilaku auditor *disfungsi*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi auditor.

H₂ : Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi auditor.

H₃ : Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi auditor.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif atau jenis penelitian lapangan dengan maksud untuk menguji hipotesis yaitu mengungkap situasi atau variabel sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Populasi yang menjadi target penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP di Surabaya. Auditor dipilih sebagai populasi karena auditor langsung terjun kelapangan sehingga lebih rentan untuk melakukan perilaku disfungsi. Jumlah seluruh auditor adalah 123 orang.

Kriteria sampel adalah auditor yang terlibat dalam pelaksanaan program audit

atas audit umum (*general audit*) laporan keuangan perusahaan yang dilakukan KAP dengan pengalaman audit minimal selama 2 (dua) tahun. Kriteria ini didasarkan karena pada umumnya auditor yang memiliki pengalaman audit minimal 2 (dua) tahun di KAP telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program audit. Sampel adalah sebagian atau perwakilan populasi yang diteliti dengan menggunakan cara tertentu.

Teknik pengambilan sampel adalah dengan Probability sampling jenis *simple random sampling*, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dikatakan simpel karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak. Pada dasarnya prosedur pengambilan sampel diperlukan untuk menekan sejauh mungkin terjadinya bias dan variabilitas. Teknik pengambilan sampel yang memenuhi persyaratan ini ialah *simple random sampling*, yaitu suatu metode yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel (Wijayanti, 2013). Biasanya dengan bantuan daftar random kemudian memilihnya secara acak (dengan mengocok) kita akan mendapatkan sampel yang representatif. Pada penelitian ini, pemilihan sampel didasarkan pada random sampling dan dilakukan dengan cara undian. Sampel menurut Arikunto (2012) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel proporsional. Penentuan ukuran sampel diambil sampel sebesar 94 auditor, yang diambil secara acak dari 123 orang populasi. Lokasi penelitian adalah di Kota Surabaya. Waktu penelitian Juni-Nopember 2015. Regresi merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sebuah variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sunarto, 2010: 1).

Locus of control merupakan karakteristik yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang tentang faktor-faktor yang

berpengaruh atas keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami (Triono, 2012). Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control internal*, sebaliknya individu yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dihadapinya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (di luar kontrolnya) disebut memiliki *locus of control eksternal*. Setiap individu memiliki *locus of control* tertentu yang berada diantara kedua ekstrim tersebut. Variabel ini dioperasionalkan sebagai konstruk internal-eksternal yang mengukur keyakinan individual atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya. Pengukuran *locus of control* individu auditor dilakukan dengan mengadopsi instrument *locus of control* dari Donnelly (Triono, 2012) Instrumen ini dipilih karena menurut peneliti terdahulu skala ini sesuai digunakan untuk mengukur *locus of control* individu dalam konteks lingkungan pekerjaan. Instrumen ini juga telah digunakan Donnelly dan Sapheero (Triono, 2012) untuk mengukur *locus of control* auditor dalam lingkungan audit, dan menghasilkan *internal consistency* pada level yang dapat diterima yaitu dengan *Cronbach alpha*. Instrumen ini terdiri atas 16 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari poin 1 (sangat tidak setuju) sampai poin 5 (sangat setuju). Delapan butir pertanyaan disusun dengan skor terbalik yaitu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, dan 15.

Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Jemada, 2013). Variabel ini dioperasionalkan dengan mengukur seberapa sering responden merasakan terdapat tekanan dalam pelaksanaan suatu prosedur audit tertentu yang ditimbulkan anggaran waktu audit. Instrumen untuk mengukur variabel ini diadopsi

dari item-item pertanyaan yang digunakan pada studi-studi yang dilakukan oleh Kelley dan Seiler, Willet dan Page, Malone dan Robert, Otley dan Pierce, Coram dan Pierce dan Sweeney (Marfuah, 2011). Instrumen yang digunakan mengukur tekanan anggaran waktu yang dirasakan terdiri atas 6 (enam) item pertanyaan dengan skala likert 5 poin mulai dari poin 1 (hampir tidak pernah) sampai poin 5 (hampir selalu). Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas 6 (enam) pertanyaan yang mengindikasikan keadaan dimana responden merasakan terdapat tekanan anggaran waktu pada pelaksanaan program audit. Skor yang tinggi pada skala likert mengindikasikan auditor merasakan tekanan anggaran waktu pada level yang lebih tinggi, sebaliknya skor yang rendah mengindikasikan auditor merasakan tekanan anggaran waktu pada level yang lebih rendah.

Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi. Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut: (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk melakukan usaha sekuat tenaga demi kepentingan profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi. Pada penelitian ini komitmen profesional dipandang sebagai konstruk multidimensi yang terdiri atas komitmen profesional afektif (KPA), komitmen profesional kontinu (KPK), dan komitmen profesional normative (KPN). Konstruk ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Meyer (Silaban, 2011). Instrumen ini telah digunakan Smith dan Hall (Silaban, 2011) mengukur komitmen akuntan terhadap profesinya pada profesi akuntan di Australia. Hasil penelitian Smith dan Hall menunjukkan instrumen ini merupakan model pengukuran yang dapat diandalkan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai loading faktor, *constructreliability*, dan

varians yang diekstraksi dari masing-masing dimensi komitmen profesional yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan (*discriminant validity*) yang baik (Silaban, 2011). Instrumen ini terdiri atas 18 (delapan belas) item pertanyaan, masing-masing 6 (enam) pertanyaan untuk setiap dimensi. Responden diminta pendapatnya untuk setiap item pertanyaan dengan skala Likert 5 poin mulai dari poin 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai poin 5 (Sangat Setuju). Skor yang tinggi pada skala pengukuran mengindikasikan komitmen pada level yang lebih tinggi, sebaliknya skor yang rendah mengindikasikan komitmen pada level yang lebih rendah.

Dalam melakukan prosedur audit tidak jarang auditor melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang atau disebut juga perilaku disfungsi. Perilaku menyimpang atau perilaku audit disfungsi adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan suatu program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahardini, 2014). Perilaku disfungsi yang umumnya dilakukan oleh seorang auditor menurut Donnelly (dalam Saputri, 2015) diantaranya: (1) *underreporting of time*, (2) *premature sign-off*, dan (3) *altering/replacing of audit procedures*. Penyimpangan perilaku auditor dalam melakukan audit dapat memengaruhi reliabilitas laporan audit sehingga perilaku disfungsi ini akan mengancam keyakinan publik pada profesi akuntan publik. Instrumen ini terdiri atas 13 (tiga belas) item pertanyaan. Responden diminta pendapatnya untuk setiap item pertanyaan dengan skala Likert 5 poin mulai dari poin 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai poin 5 (Sangat Setuju). Skor yang tinggi pada skala pengukuran mengindikasikan perilaku disfungsi pada level yang lebih rendah, sebaliknya skor yang rendah mengindikasikan perilaku disfungsi pada level yang lebih tinggi.

Seperti yang diuraikan sebelumnya,

variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini diukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang diadopsi dari instrumen-instrumen yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun instrumen yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik pada penelitian-penelitian terdahulu, namun beberapa kelemahan yang melekat pada penelitian survey menjadi pertimbangan dalam perancangan instrumen penelitian ini. Secara khusus, ada dua kelemahan yang mendapat perhatian yaitu: (1) kemungkinan terjadinya respon bias, dan (2) tingkat pengembalian kuesioner yang rendah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Usia responden antara 20-30 tahun sebanyak 3 orang responden (3,19%), responden yang berusia 31-40 tahun terdapat sebanyak 20 orang responden (21,28%). Untuk responden berusia 41-50 tahun merupakan responden dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 47 orang responden (50,00%), usia 51-60 tahun sebanyak 24 orang responden (25,53%), dan tidak ada responden yang usianya lebih dari 60 tahun. Banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 78 orang responden laki-laki (82,98%), dan 16 orang responden perempuan (17,02%). Data tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh laki-laki. Sejumlah 83 orang responden (88,30%) responden berpendidikan Strata 1, 11 orang responden (11,70%) berpendidikan Strata 2, dan tidak ada responden yang berpendidikan SMA, dan Strata 3.

Terdapat 18 responden (19,15%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 75, 16 responden (17,02%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 65,15 responden (15,96%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 27, 14 responden (14,89%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 26,9 responden (9,57%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 25,4 responden (4,26%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 28, terdapat masing-masing 3 responden (3,19%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 23, 71, dan 72, terdapat

masing-masing 2 responden (2,13%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 68 dan 76, dan masing-masing 1 responden (1,06%) memiliki skor *Locus of control* sebesar 67, 69, 70, 74, dan 77,

Terdapat 39 responden (41,49%) yang memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 26, 24 responden (25,53%) yang memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 9, 10 responden (10,64%) memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 10,5 responden (5,32%) memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 8,4 responden (4,26%) memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 7, terdapat masing-masing 3 responden (3,19%) memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 24, 27, dan 28, terdapat 2 responden (2,13%) yang memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 11, dan 1 responden (1,06%) memiliki skor tekanan anggaran waktu sebesar 25.

Terdapat 22 responden (23,40%) memiliki skor 82, terdapat masing-masing 20 responden (21,28%) memiliki skor 29 dan 79, 8 responden (8,51%) memiliki skor 31, 6 responden (6,38%) memiliki skor 25, terdapat masing-masing 4 responden (4,26%) memiliki skor 28 dan 30, terdapat masing-masing 3 responden (3,19%) memiliki skor 27 dan 72, 2 responden (2,13%) memiliki skor 81, dan ada masing-masing 1 responden (1,06%) yang memiliki skor 77 dan 80.

Terdapat 27 responden (28,72%) yang memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 22, 22 responden (23,40%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 60, 19 responden (20,21%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 61, 9 responden (9,57%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 20, 7 responden (7,45%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 21, 3 responden (3,19%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 57, masing-masing 2 responden (2,13%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 24 dan 58, dan terdapat masing-masing 1 responden (1,06%) memiliki skor perilaku disfungsi auditor sebesar 59, 62, dan 63.

Tabel 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.998	.998	.843

a. Predictors: (Constant), Komitmen Profesional, Locus Of Control, Tekanan Anggaran Waktu

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Komitmen Profesional, *Locus of Control* dan tekanan anggaran waktu berpengaruh 99,8% terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. Penyimpangan perilaku auditor yang dikarenakan komitmen profesional, *Locus of Control* dan tekanan ang-

garan waktu berpengaruh dalam melakukan audit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi reliabilitas laporan audit sehingga perilaku disfungsional ini akan mengancam keyakinan publik pada profesi akuntan publik.

Tabel 2
Anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35122.070	3	11707.357	1.647E4	.000 ^a
	Residual	63.984	90	.711		
	Total	35186.053	93			

a. Predictors: (Constant), Komitmen Profesional, Locus Of Control, Tekanan Anggaran Waktu

b. Dependent Variable: Perilaku Disfungsional Audit

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Komitmen Profesional, *Locus of Control* dan tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perilaku disfungsional auditor yang dipengaruhi oleh komitmen profesional, *Locus of Control* dan tekanan anggaran waktu merupakan ancaman serius terhadap kualitas audit karena bukti-bukti audit yang dikumpulkan selama pelaksanaan prosedur audit tidak kompeten dan cukup sebagai dasar memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien yang diaudit (Tanjung, 2013).

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah *Locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa

locus of control berpengaruh positif terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memiliki suatu keyakinan mengenai penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya terjadi karena adanya faktor dalam diri auditor sendiri. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor suka bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan suatu masalah, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin, mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin meraih kesuksesan (Ghufroon, 2010). *Locus of control* merupakan karakteristik individual yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang tentang faktor-faktor yang berpengaruh atas keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami (Triono, 2012).

Tabel 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.557	.230		-2.425	.017
	Locus Of Control	.303	.024	.353	12.877	.000
	Tekanan Anggaran Waktu	-.322	.157	-.142	-2.049	.043
	Komitmen Profesional	.597	.045	.793	13.248	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Disfungsional Audit

Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control internal*, sebaliknya individu yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dihadapinya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (di luar kontrolnya) disebut memiliki *locus of control eksternal*. Setiap individu memiliki *locus of control* tertentu yang berada diantara kedua ekstrim tersebut.

Locus of control ialah pemikiran seseorang mengenai sebab sesuatu terjadi atau kekuatan yang dapat mendorong aksinya. (*Perception of why thing happens or what drives the behavior*). *Locus of control* berdampak pada perilaku disfungsional audit, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan turnover intention (Donnelly *et al.*, 2003). Auditor sebagai individu dengan faktor bawahan juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Faktor bawahan berupa *locus of control*, pengalaman dan kemampuan yang dirasakan, sedangkan faktor lingkungan berupa struktur tugas, sistem otoritas formal dan kelompok kerja (Soros dalam Engko dan Gudono, 2007:3).

Auditor dengan *locus of control internal* akan mempunyai kontribusi positif pada kinerja melaksanakan tugas audit,

oleh karena itu mereka memandang *locus of control internal* sebagai usaha yang harus dilakukan jika ingin berhasil sedangkan *locus of control eksternal* dilakukan pada orang yang kurang suka berusaha. *Locus of control eksternal* disebabkan oleh faktor luar yang mengontrol dan sedikit korelasi antara usaha dengan kesuksesan

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Rotter mengenai *locus of control*, terdapat dua tipe *locus of control*, yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*. Menurut Crider (Ghufron, 2010) terdapat perbedaan karakteristik diantara dua tipe tersebut, yaitu: 1) *Locus of control internal* yang meliputi: suka bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan suatu masalah, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin, mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin meraih kesuksesan. 2) *Locus of control eksternal*: kurang memiliki inisiatif, mempunyai persepsi bahwa hanya ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan, kurang suka berusaha, karena percaya bahwa kesuksesan dikontrol oleh faktor luar, kurang mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah (Dewi, 2014).

Samaei *et al.* (2012) menjelaskan bahwa individu dengan *locus of control* eksternal memiliki kontrol yang kurang terhadap kehidupan mereka dan mereka percaya bahwa apa yang terjadi bagi mereka adalah hasil dari faktor eksternal seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal percaya bahwa hasil dan perilaku mereka disebabkan faktor dari luar dirinya.

Menurut Wuryaningsih (2013), individu dengan *locus of control* eksternal yang rendah memiliki persepsi terhadap kejadian baik positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan diri sendiri dan berada di bawah pengendalian dirinya.

Locus of control merupakan hasil pemikiran seseorang mengenai sebab sesuatu terjadi atau kekuatan yang mendorong aksinya. (*Perception of why thing happens or what drives the behavior*). Hyatt dan Prawitt (2001) telah membuktikan bahwa internal *locus of control* memiliki kaitan dalam peningkatan kinerja dan *locus of control* internal harusnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding *locus of control* eksternal dalam sebuah lingkungan audit. Kartika dan Wijayanti (2007) menghasilkan *locus of control* sebagai anteseden hubungan kinerja dengan penerimaan perilaku disfungsi audit. Penelitian Oktarina (2007) yang menunjukkan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Jika individu memiliki *locus of control* internal berarti individu tersebut lebih meyakini bahwa diri mereka sebagai penentu nasib mereka. Individu yang lebih meyakini bahwa sesuatu yang terjadi pada diri mereka karena disebabkan oleh kekuatan di luar dirinya menandakan individu tersebut memiliki *locus of control* eksternal (Wintari, 2015).

Locus of control merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit. *Locus of control* merupakan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya (Rotter,

1966). Dengan mengetahui *locus of control* dari karakteristik seorang auditor dapat diperkirakan apakah seorang auditor lebih cenderung melakukan tindakan penurunan kualitas audit atau tidak pada suatu kondisi tertentu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku penurunan kualitas audit (Ratna, 2013; Andika, 2008). Tetapi hasil penelitian yang berbeda menemukan bahwa pengaruh *locus of control* terhadap perilaku penurunan kualitas audit secara statistik tidak signifikan (Malone & Robert, 1996).

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi auditor. Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh negatif terhadap Perilaku Disfungsi Auditor dengan nilai signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Jemada, 2013).

Hal ini menunjukkan auditor menyikapi tekanan waktu yakni dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya guna memaksimalkan kinerja dan mencapai sasaran waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa auditor tidak terpengaruh walaupun auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Jemada, 2013).

Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor

(Fonda, 2014).

Tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Dimana dengan tekanan anggaran waktu yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kualitas audit, karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut (Primastuti, 2014).

Tekanan anggaran waktu yang ketat akan meningkatkan tingkat stress auditor karena auditor harus melakukan pekerjaan audit dengan waktu yang ketat, bahkan dalam anggaran waktu tidak dapat menyelesaikan audit dengan prosedur audit yang seharusnya. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional (Aisyah, 2015).

Tekanan anggaran waktu secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional, dimana merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit karena tekanan anggaran waktu merupakan keadaan di mana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan kaku.

Penelitian (Prasito dan Priyo, 2007) menunjukkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Tekanan anggaran waktu yang dihadapi oleh profesional dalam bidang pengauditan dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor.

Tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Dimana dengan

tekanan anggaran waktu yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kualitas audit, karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

Tekanan anggaran waktu menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Pentingnya *time budget pressure* terhadap kualitas audit adalah dengan rendahnya tekanan anggaran waktu akan mampu mengurangi tekanan waktu pelaksanaan dalam melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan baik (Primastuti, 2014).

Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut melakukan efisiensi terhadap anggaran yang sangat ketat dan kaku (Raghunatan, 1991). Anggaran waktu audit yang ketat dapat mengakibatkan auditor merasakan tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dalam pelaksanaan program audit akibat ketidakseimbangan antara anggaran waktu audit yang tersedia dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian program audit.

Ini sesuai dengan penelitian Simanjutak (2008) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dimana auditor cenderung untuk lebih memilih informasi yang dianggap paling penting dibawah tekanan anggaran waktu, hal ini akan menyebabkan pengujian yang telah direncanakan tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap independensi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Weningtyas (2006) yang menyatakan bahwa *time budget pressure*

berpengaruh terhadap independensi.

Tekanan anggaran waktu menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Pentingnya *time budget pressure* terhadap kualitas audit adalah dengan rendahnya *time budget pressure* akan mampu mengurangi tekanan waktu pelaksanaan dalam melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan baik (Primastuti, 2014).

Tekanan anggaran waktu merupakan satu tipe tekanan yang menunjukkan potensial mengurangi lingkungan pengendalian auditor. Dengan kata lain, ketika auditor berhadapan dengan anggaran waktu yang dirasakan memberikan tekanan karena meningkatnya kompleksitas tugas, masalah yang berasal dari klien, ketidak efisienan auditor itu sendiri dan anggaran waktu yang tidak realistis mendorong auditor melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan perilaku dan kepercayaan yang diyakini sebelumnya (Gasperz, 2014).

Lord (Jemada, 2013) menyatakan bahwa cara respon auditor terhadap tekanan anggaran waktu dibedakan menjadi dua yakni fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional dalam menyikapi tekanan waktu yakni dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya guna memaksimalkan kinerja dan mencapai sasaran waktu yang telah ditetapkan, berbeda dengan tipe disfungsional yang memandang tekanan waktu tidak lebih dari sebuah keadaan yang menekan auditor secara psikologis agar sesegera mungkin menyelesaikan penugasan sekalipun kualitas audit yang dihasilkan rendah.

Anggaran waktu yang digunakan secara tidak benar dapat merugikan. Anggaran waktu merupakan suatu pedoman, tetapi tidak absolut. Jika auditor menyimpang dari program audit apabila terjadi perubahan kondisi, auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari anggaran waktu. Auditor kadang merasa

mendapat tekanan untuk memenuhi anggaran waktu guna menunjukkan efisiensinya sebagai auditor dan membantu mengevaluasi kinerjanya, akan tetapi begitu saja mengikuti anggaran waktu juga tidak tepat. Tujuan utama dari audit adalah untuk menyatakan pendapat sesuai dengan standar auditing yang diterima umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu (Marfuah, 2011).

Tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh klien merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit. Tekanan anggaran waktu menyebabkan *stress* individual yang muncul akibat tidak seimbang tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Fonda, 2014).

Alokasi waktu audit yang tidak tepat akan dapat mengakibatkan munculnya perilaku yang mengancam kualitas audit. Penetapan anggaran waktu audit yang terlalu pendek maupun terlalu panjang akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan audit. Berkurangnya anggaran waktu menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit meningkat secara signifikan (Wintari, 2015).

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa auditor memiliki sikap yang berdasarkan pendirian atau keyakinan pada profesi yang dilakukan dan dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuan dan keahlian profesional yang berpedoman pada kode etik profesi (Suhakim, 2013).

Komitmen auditor terhadap profesinya

merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit (Silaban, 2011). Komitmen profesional didasarkan pada premis bahwa individu membentuk suatu kesetiaan (*attachment*) terhadap profesi selama proses sosialisasi ketika profesi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma profesi.

Komitmen profesional merupakan kekuatan relatif terhadap keterlibatan individu dalam profesi tertentu, kemauan untuk mengerahkan usaha atas nama profesi serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalamnya (Wintari, 2015).

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggota dalam menjalankan praktek profesi bagi masyarakat. Setiap profesi yang menyediakan jasa, memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, sehingga komitmen profesional merupakan sikap yang berdasarkan pendirian atau keyakinan pada profesi yang dilakukan dan dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuan dan keahlian profesional yang berpedoman pada kode etik profesi (Suhakim, 2013).

Komitmen profesional afektif (KPA) berhubungan pada sejauh mana individu ingin berada pada suatu profesi. Komitmen profesional afektif merupakan keterikatan emosional individu terhadap profesinya yang didasarkan pada identifikasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi dan suatu keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Komitmen auditor terhadap profesinya dalam bentuk afektif dapat timbul sebagai akibat pertukaran pengalaman positif yang dirasakan dari profesi atau pengembangan keahlian profesional (Silaban, 2011).

Komitmen profesional kontinyu (KPK) berhubungan dengan pada sejauh mana individual tetap berada pada suatu profesi. Komitmen profesional kontinyu merupakan bentuk komitmen seseorang terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika seseorang

meninggalkan profesi. Komitmen profesional kontinyu didasarkan pada *Theory of Side Bets Becker's*, yang berargumen bahwa individu mempertahankan komitmen dengan suatu entitas berkaitan dengan akumulasi investasi pada suatu entitas atau tidak adanya alternatif yang sebanding dengan entitas tersebut (Nisa, 2013).

Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit harus didasarkan pada evaluasi atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan serangkaian prosedur audit. Tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat atau pengguna laporan keuangan terhadap akuntan publik sangat bergantung pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Mahardini, 2014).

Meluasnya kebutuhan jasa akuntan publik yang merupakan pihak independen, menuntut profesi akuntan publik untuk melakukan peningkatan kinerja, agar output yang dihasilkan dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Kinerja auditor ialah wujud kerja yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik atau ke arah tercapainya tujuan organisasi (Kusnadi, 2015).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat (Primastuti, 2014). Seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Kurnia, 2014).

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi (Manullang, 2010). Auditor dalam menyusun laporan keuangan dituntut untuk dapat menyampaikan informasi apa adanya (Aisyah, 2015).

Optimalisasi kegiatan audit menjadi salah satu upaya strategis yang dapat ditempuh dalam mencegah dan memberantas korupsi. Peranan auditor pemerintah menjadi sangat penting untuk mendukung upaya ini. Auditor pemerintah harus memelihara dan meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus agar mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Seorang auditor harus selalu berusaha menghasilkan audit yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan auditor memiliki tanggung jawab yang besar terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit (Wintari, 2015).

Laporan audit yang dihasilkan oleh seorang auditor haruslah berkualitas karena laporan audit tersebut dibagikan kepada para pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham dan investor sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang diberikan kepada akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan mereka memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, namun pada praktiknya masih banyak kasus yang melibatkan profesi akuntan publik terkait fee audit dan independensi auditor yang berdampak pada diragukannya kualitas laporan audit yang dihasilkannya (Zam, 2014).

Kegiatan audit tidak terlepas dari masalah keperilakuan, seperti adanya kemungkinan seorang auditor melakukan penyimpangan perilaku (*dysfunctional behavior*) sehingga akan dapat menurunkan kualitas audit (Wintari, 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Aisyah, 2015).

Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan jika auditor dalam menjalankan profesinya berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas, bertindak jujur dan tegas, sehingga dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Gasperz, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan simpulan sebagai berikut: 1) *Locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi-*ional auditor*. Hal ini menunjukkan *locus of control* ini memiliki peranan bagi seseorang untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan, 2) Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi-*ional auditor*. Hal ini menunjukkan auditor menyikapi tekanan waktu yakni dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya guna memaksimalkan kinerja dan mencapai sasaran waktu yang telah ditetapkan, 3) Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi-*ional auditor*. Artinya komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit.

Dari hasil penelitian, maka dapat disarankan: 1) Auditor dapat mengendalikan *locus of control*nya untuk menekan perilaku disfungsi-*ional auditor*. Auditor dapat mengatur tekanan anggaran waktunya untuk menekan perilaku disfungsi-*ional auditor*. Auditor dapat meningkatkan komitmen profesionalnya untuk menekan perilaku disfungsi-*ional auditor*, 2) KAP dapat mengadakan pelatihan pengaturan *locus of control* agar menekan perilaku disfungsi-*ional auditor*. KAP dapat mengadakan pelatihan pengendalian tekanan anggaran waktu agar menekan perilaku disfungsi-*ional auditor*. KAP dapat mengadakan pelatihan peningkatan komitmen profesional agar mene-

kan perilaku disfungsional auditor, 3) Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan penelitian lanjutan. Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai data untuk penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. A. 2015. Hubungan Pengalaman, Time Budget Pressure, dan Kompensasi terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. *Accounting Analysis Journal* 4(1).
- Andika, C. E. G. 2008. Pengaruh Tekanan Waktu, Locus Of Control Dan Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Penurunan Kualitas Audit. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.
- Arikunto, S. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dewi. 2014. Pengaruh *Locus of Control* dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sleman Tahun Ajaran 2013/2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Donnelly, D. P., J. J. and Quirin, D. O'Bryan 2003. Auditor Acceptance of Dysfunctional Auditor Behavior: An Explanatory Model Using Auditor's Personal Characteristic. *Behavioral Research in Accounting* 15.
- Engko, C dan Gundono. Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control Terhadap Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor, *Simposium Nasional Akuntansi X, AMKP-08, Makassar*, 2007.
- Fonda, A J. 2014. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Tipe Kepribadian Auditor, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (Studi pada Auditor KAP di Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Gasperz. J. 2014. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu sebagai Variabel Moderasi terhadap Hubungan antara Faktor Individu dan Kualitas Audit. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 3(1): 33-45.
- Ghufuron. 2010. *Teori-teori Psikologi*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Hyatt, T. A. and D. F. Prawitt. 2001. Does congruence between audit structure and employee locus-of-control affect job performance? *The Accounting Review*. 76 (2): 263-274.
- Jemada, M. 2013. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Kompleksitas Tugas dan Reputasi Auditor terhadap Fee Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali. *E-Jurnal Akuntansi* 3(3): 132-146.
- Kartika, I. and P. Wijayanti. 2007. Locus of Cotrol Sebagai Antecedent hubungan Kinerja dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. *SNA X. Makassar*.
- Kurnia, W. 2014. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. *e-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi* 1(2): 49-67
- Kusnadi, I. M. G. 2015. Pengaruh Profesionalisme dan Locus of Control terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *E-jurnal Akuntansi*. 13(1): 276-291.
- Mahardini, N. M. 2014. Pengaruh Etika profesi dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali). *e-Journal. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1).
- Malone, C. F., and R. W. Robert. 1996. Factors Associated With the Incidence of Reduced Audit Quality Behavior. *Auditing: A Journal of Practice an Theory*. 15(2): 49-64.
- Manullang, A. 2010. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu dan Resiko Kesalahan terhadap Penurunan Kualitas Audit. *Jurnal Fokus Ekonomi* 5(1): 81-94.
- Marfuah, S. 2011. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dalam Perspektif Teori Stress Kerja. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Nisa, F. F. 2013. Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada KAP di Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oktarina, E. 2007. Pengaruh Komitmen Organisasi, Locus of Control Terhadap Kinerja Audit. *Skripsi*. FISE UNY Yogyakarta.
- Prasita, A, dan P. H. Adi. 2007. Pengaruh Kompleksitas Audit dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman terhadap Sistem Informasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis XIII*(1): 54-78.
- Primastuti, F. D. 2014. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas audit dengan Independensi sebagai Variabel Intervening. *Accounting Analysis Journal* 3(4).
- Raghunathan, B. 1991. Premature Signing-Off of Auditor Procedure an Analysis. *Accounting Horizon* 5(2): 71-79.
- Ratna, P. H. 2013. Pengaruh Tekanan Waktu, Locus Of Control Dan Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Penurunan Kualitas Audit. *Tesis*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rotter, J. 1966. *Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement*. Psychological Monographs: General and Applied.
- Samaei, L., Z. N. Ramezani., & A. S. H. Semnani. 2012. Relationship between Locus of Control (Internal-External) and a Feeling of The Loneliness between Athletic and Non Athletic Girls. *E-Jurnal* diunduh 2 Juni 2015 dari <http://search.proquest.com>.
- Saputri, I. G, dan A. Yuli. 2015. Pengaruh Sifat Machiavellian dan Tipe Kepribadian pada Perilaku Disfungsional Auditor. *e-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 4(02): 70-86.
- Silaban, A. 2011. Pengaruh Multidimensi Komitmen Profesional terhadap Perilaku Audit Disfungsional. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(1): 1-94.
- Simanjutak, P. 2008. Pengaruh Time Budget Pressure Dan Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality) (Study Empiris Pada Auditor KAP Di Jakarta). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Slovin. 2012. Rumus Menentukan Jumlah Sampel, http://repository.upi.edu/operator/upload/s_10451_0607089_chapter3.pdf Diunduh tanggal 21 September 2013.
- Suhakim, A. I. 2013. Pengaruh gender, Locus of Control, komitmen profesi dan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengaruh-gender-locus-of-control.html> Diunduh tanggal 21 September 2013
- Sulistyawati, A I. 2014. Pengembangan Model Perilaku Auditor Melalui Etika Auditor. *Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA 2014*. Universitas Semarang. Semarang.
- Sunarto, G. W. 2010. *Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK*. Jakarta.
- Tanjung, R. 2013. Pengaruh Karakteristik Personal Auditor dan Time Budget Pressure terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. (Studi Empiris pada KAP di Kota Padang dan Pekanbaru). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Triono, H. 2012. Pengaruh Locus of Control, Komitmen Organisasional, dan Posisi terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang). *Prosiding Seminar Nasional. Forum Bisnis & Keuangan I*, Th. 2012 halaman 152. Semarang: Forum Bisnis & Keuangan
- Weningtyas, S., D. Setiawan., dan H. Triatmoko. 2006. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. *Jurnal Simposium Nasional IX. Padang, 23-26 Agustus 2006*.
- Wijayanti. 2013. Pengambilan Sampel Berdasarkan Peringkat pada Analisis Regresi Linear Sederhana. *Jurnal Gaussian* 2(3): 209-218.

- Wintari, N. W. W. I. 2015. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Locus of Control, dan Komitmen Profesional pada Perilaku Penurunan Kualitas Audit. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 20(2).
- Wuryaningsih. 2013. Analisis Pengaruh Locus of Control Pada Kinerja Karyawan. *Jurnal Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Zam, D. 2014. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu (Time Budget Pressure) Fee Audit dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit *Jurnal Eproc. Telkom University*

PENGUKURAN KINERJA BISNIS MELALUI PENDEKATAN *BALANCED SCORECARD* DAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)*

Sumani

sumanisumani69@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRACT

The aim of this study is Analyzing the business performance using balanced scorecard approach and Analytical Hierarchy Process (AHP). The population in this study were all employees and members of BMT-UGT Sidogiri. The sampling technique was Stratified Random Sampling for employees and convenience random sampling for BMT-UGT members Sidogiri. level positions (positions) of employees at BMT-UGT Sidogiri be the foundation of a random sample and tiered. The research sample used in this study were 42 employees and 212 members of BMT-UGT Sidogiri. The results showed: (1). balanced scorecard approach, showed the financial perspective (BMT-UGT Sidogiri conditions were good); perspective of satisfaction (satisfied with the services Sidogiri BMT-UGT); internal business perspective (increasing the number of business units); learning and growth perspective (employee productivity has increased); (2). The analysis perspective Balanced Scorecard using AHP Analysis of the individual perspective Balanced Scorecard by using AHP shows that the perspective is considered the most influential on the performance of the company is customer perspective that has the highest weight value, while the factor most considered to have the highest influence on the customer's perspective is the growing number of members. In other hand, internal business perspective has lowest value as a result of AHP analysis.

Key words : *balanced scorecard, AHP, performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui kinerja bisnis dengan pendekatan *balanced scorecard* dan mengetahui perspektif yang lebih berpengaruh terhadap kinerja bisnis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan anggota BMT-UGT Sidogiri Pasuruan. Teknik pengambilan sampel adalah *Stratified Random Sampling* untuk karyawan dan *convenience random sampling* untuk anggota BMT-UGT Sidogiri. Dasar yang digunakan dalam pengambilan sampel secara random dan berjenjang adalah level jabatan (posisi) karyawan pada BMT-UGT Sidogiri. Sampel penelitian yang digunakan 42 orang karyawan dan sebanyak 212 orang anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) dengan pendekatan *balanced scorecard*, pada perspektif keuangan (kondisi BMT-UGT Sidogiri adalah baik); prespektif kepuasan (puas dengan pelayanan jasa BMT-UGT Sidogiri); prespektif bisnis internal (mengalami peningkatan jumlah unit bisnis); prespektif pertumbuhan dan pembelajaran (produktivitas karyawan mengalami peningkatan); (2) analisis terhadap masing-masing perspektif *Balanced Scorecard* dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* menunjukkan bahwa perspektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap kinerja bisnis adalah perspektif pelanggan, sedangkan faktor yang paling dianggap memiliki pengaruh tertinggi dari perspektif pelanggan adalah penambahan jumlah anggota, namun, perspektif bisnis internal memiliki bobot penilaian terkecil pada hasil analisis AHP.

Kata Kunci: *balanced scorecard, AHP, kinerja*

PENDAHULUAN

Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup penekanan-penekanan pada kualitas produk,

kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika dan bentuk-bentuk kualitas lain yang terus berkembang guna mem-

berikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan agar tercipta pelanggan yang loyal (Hansen dan Mowen, 2009:59). Kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan kompetitif ini akan memperkuat posisi persaingan dalam persaingan bisnis dalam jangka panjang.

Perkembangan dunia bisnis jasa keuangan berbasis syariah seperti perbankan dan koperasi juga berkembang pesat dan semakin kompetitif yang menyebabkan perubahan besar dalam persaingan, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia dan penanganan transaksi antara perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan juga *cost effective* (Mulyadi, 2011).

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan tentunya pemilik perusahaan harus memulai memperbaiki perusahaan, baik itu dari segi produksi, pelayanan, strategi, struktur organisasi serta sistem kinerja dari organisasi tersebut. Kesuksesan dan perkembangan pada setiap aktivitas bisnis dari manufaktur hingga jasa pelayanan bergantung pada bagaimana sebuah organisasi memanfaatkan data penting yang dipunyai. Metode pengelolaan data ini lah yang sedang dipelajari dan dipelajari kembali oleh perusahaan kecil maupun besar dimanapun untuk dapat mengukur kinerja perusahaan masing-masing. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan penggunaan bukti secara statistik untuk memutuskan kemajuan yang sudah ditentukan dalam tujuan organisasi.

Selama ini, aspek keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam mengukur kinerja perusahaan. Terfokusnya pada aspek *financial* inilah yang sering membuat perusahaan hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan dalam jangka waktu pendek. Kondisi semacam ini menjadikan perusahaan kurang mampu menuntun dan

mengevaluasi perjalanan perusahaan melalui lingkungan yang kompetitif. Selain itu juga membuat perusahaan kurang mendayagunakan asset lain seperti sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan lain sebagainya. Adanya kepentingan perusahaan dalam meningkatkan performansi kerja selain aspek keuangan, mengharuskan perusahaan untuk mengadakan sistem pengukuran kinerja yang dapat merepresentasikan seluruh aktivitas perusahaan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, oleh Karena itu, diterapkan sistem pengukuran kinerja dengan metode *balanced scorecard* yang dilihat dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, proses pembelajaran dan pertumbuhan (Susetyo dan Sabakula, 2014).

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (Vanany, 2009:74). Pengukuran kinerja yang paling mudah dan sering digunakan oleh perusahaan adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan perusahaan saja. Pengukuran kinerja yang hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak dan harta-harta intelektual perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini juga kurang mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik (Kaplan dan Norton, 2000; Radithya, 2011).

Menurut Lipe dan Salterio (2000); Moisawa (2002); Garrison dan Noreen (2006); *balanced scorecard* merupakan kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan.

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Hansen dan Mowen, 2009; Susetyo dan Sabakula, 2014).

Menurut Wardhani (1999), Ciptani (2000), dan Mulyadi (2011) konsep *balanced scorecard* adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang sebenarnya memberikan rerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. Sasaran-sasaran strategik tersebut akan terfokus pada satu tujuan umum perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Selanjutnya menurut Safirin (2010) bahwa strategi perusahaan yang telah didapatkan dari empat perspektif *Balanced Scorecard* dapat difokuskan dengan menentukan prioritas melalui pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi syariah yang berkembang cukup pesat, setiap tahunnya BMT-UGT Sidogiri mampu berkembang dengan baik dan dapat membuka beberapa cabang unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Perkembangan ini menjadi pemicu agar perusahaan terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik agar mampu bertahan dalam persaingan usaha yang membutuhkan pengukuran kinerja yang komprehensif baik dari segi *financial* dan *non financial*.

Baitul Maal Wat Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau biasa disebut BMT-UGT Sidogiri adalah salah satu koperasi berbasis syariah yang berpusat di kota Pasuruan. BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi syariah yang berkembang cukup pesat, setiap tahunnya BMT-UGT Sidogiri mampu berkembang dengan baik dan dapat membuka beberapa cabang unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Hingga saat ini diusianya yang telah mencapai 14 tahun lebih BMT-UGT SIDOGIRI telah

membuka 257 cabang unit layanan BMT atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah. BMT-UGT Sidogiri telah mencatatkan sebagai koperasi terbesar ke-3 se-Indonesia dan koperasi syariah terbesar nomor satu secara nasional (<http://www.hidayatullah.com>, 2015).

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui kinerja BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dengan pendekatan *balanced scorecard*?; (2) untuk mengetahui Perspektif yang lebih berpengaruh terhadap kinerja BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Dasar Koperasi Syariah

Koperasi dalam Islam tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal, maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah di kemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana ditulis oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Saibin Syarik di Madinah (Syafi'i, 1999).

Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi ini bekerja berdasarkan syariat-syariat Islam. Sama halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah juga melayani berbagai kepentingan anggotanya seperti unit simpan pinjam.

Koperasi syariah tidak mengenal bentuk ribawi, oleh karena itu bunga atas

modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara, namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah.

Simpanan pokok, wajib, dan sukarela, pada koperasi syariah didirikan atas dasar prinsip *syirkah mufawadhah* dan *syirkatulinnan*. *Syirkah mufawadhah* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (simpanan pokok dan wajib) yang sama, sedangkan simpanan sukarela tergantung pada masing-masing anggota. Bentuk lain adalah *syirkatulinnan* yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan kontribusi dana dari masing-masing anggota kongsi bervariasi.

Penilaian Kinerja Dengan Pengukuran Tradisional

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan, karena ukuran keuangan ini mudah dilakukan. Kinerja lain, seperti peningkatan kepercayaan *customer* terhadap layanan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen personal, kedekatan hubungan kemitraan perusahaan dengan pemasok, dan peningkatan *cost effectiveness* proses bisnis digunakan untuk melayani *customer*, diabaikan oleh manajemen karena sulit pengukurannya. Sehingga banyak kesalahan berpikir didalam manajemen tradisional. Penilaian dengan pengukuran kinerja tradisional berdasarkan kinerja keuangan atau yang biasa disebut pengukuran kinerja tradisional menekankan pengukuran kinerja perusahaan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan (Horne *et al.*, 2009). Hal ini juga dipertegas oleh Anthony dan Govindarajan (2003), mengandalkan aspek finansial saja tidak cukup, bahkan bisa jadi tidak berguna.

Selanjutnya Kaplan dan Norton (2000), menunjukkan beberapa kelemahan penilaian kinerja tradisional, yaitu: (a) tidak mampu mengukur harta-harta yang tidak tampak (*intangible assets*) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan; (b) pengukuran kinerja yang hanya memperhatikan aspek keuangan tidak hanya mampu bercerita mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah lebih baik.

Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan *Balanced Scorecard*

Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif nonkeuangan. Kaplan dan Norton (2000); Lee *et al.* (2010); Danaei dan Amer (2013), dan Yi-Hui (2013), menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif, meliputi:

Pertama, Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*). Pengukuran perspektif keuangan dalam penelitian ini diukur melalui rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Rasio-rasio keuangan (Ayvaz dan Pehlivanl, 2011) yang dimaksud, meliputi: (a) rasio modal sendiri terhadap total modal; (b) rasio efisiensi; (c) rasio likuiditas; (d) rasio rentabilitas aset; (e) rasio rentabilitas modal sendiri; dan (f) rasio partisipasi bruto.

Selanjutnya juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, bahwa koperasi dikatakan sehat dari perspektif keuangan apabila: (a) rasio modal sendiri (> 15%); (b) rasio efisiensi (1% - 84%); (c) rasio likuiditas (26%-34%); (d)

rentabilitas asset (>10%); (e) rentabilitas modal sendiri (>10%); dan (f) rasio partisipasi bruto (>75%).

Keua, Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*). Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasil tujuan keuangan perusahaan. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasil tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini, Kaplan dan Norton (2000); Julianto (2000) menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama, yaitu: (a) Pengukuran pangsa pasar. Pengukuran terhadap besarnya pangsa pasar perusahaan mencerminkan proporsi bisnis dalam satu area bisnis tertentu yang diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah pelanggan, atau volume yang terjual atas unit produk yang terjual; (b) Retensi pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang saat ini dimiliki perusahaan; (c) Akuisisi pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase jumlah penambahan pelanggan baru yang perbandingan total penjualan dengan jumlah pelanggan baru yang ada; (d) Kepuasan pelanggan. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik diantaranya: survei melalui surat (pos), wawancara melalui telepon atau personal *interview*.

Ketiga, Perspektif Proses Bisnis Internal (*Bisnis Internal Perspective*). Didalam perspektif proses bisnis internal ini ada tiga tahap yang harus dilakukan yaitu: (a) Tahap Inovasi. Proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektivitas serta ketetapan waktu dari proses ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi *customer*; (b) Tahap Operasi. Pada tahapan ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan *order* dari *customer*, pembuatan

produk/jasa sampai dengan pengiriman produk/jasa tersebut kepada pelanggan. Pada tahap ini pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: kualitas, biaya, dan waktu; (c) Tahap Purna Jual. Perusahaan pada tahap ini berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar para *customer* mempunyai loyalitas terhadap perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000).

Keempat, Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (*Growth and Learning Perspective*). Perspektif ini mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan didalam perspektif ini yaitu: (a) Kemampuan Karyawan. Pengukuran dilakukan atas tiga hal pokok yaitu pengukuran terhadap kepuasan karyawan, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan, dan pengukuran terhadap produktivitas karyawan; (b) Kemampuan Sistem Informasi. Pengukuran perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur prosentase ketersediaan informasi yang diperlukan oleh karyawan mengenai pelanggannya, persentase ketersediaan informasi mengenai biaya produksi dan lain-lain; (c) Motivasi, Pemberian Wewenang, dan Pembatasan Karyawan. Pengukuran dapat dilakukan melalui beberapa dimensi, yaitu: (1) Pengukuran terhadap saran yang diberikan kepada perusahaan dan diimplementasikan; (2) Pengukuran atas perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan; (3) Pengukuran terhadap keterbatasan individu dalam organisasi (Kaplan dan Norton, 2000:139; Rangkuti, 2011).

Menentukan tujuan dan ukuran yang berkaitan dengan kemampuan karyawan ada tiga hal yang dipertimbangkan pada penelitian ini yaitu: (a) Produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan adalah suatu ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha peningkatan moral dan keahlian karyawan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Tujuan-

nya adalah membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para karyawan dengan jumlah yang dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas kerja dan salah satu ukuran produktivitas yang paling sederhana adalah pendapatan per kapita; (b) Persentase Pelatihan Karyawan yang Terampil. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola manajemen, sehingga karyawan dapat terus berkembang dan terampil dimasing-masing unit kerja; (c) Kepuasan karyawan. Kepuasan kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat penting oleh sebagian besar perusahaan dan hal ini merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, daya tanggap mutu, dan layanan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan karyawan, maka pihak manajer dapat melakukan survey secara rutin.

Menurut Lasdi (2002), beberapa elemen *employee satisfaction* tentang keterlibatan dalam pengambilan keputusan, meliputi: (a) Pengakuan; (b) Akses untuk memperoleh informasi; (c) Dorongan aktif untuk melakukan kreativitas dan inisiatif; (d) Dukungan atasan. Kesenjangan dalam aspek finansial, pelanggan, dan proses intern perusahaan dapat dideteksi dengan menggunakan *Balanced Scorecard*.

Kesenjangan dalam aspek finansial, pelanggan, dan proses internal perusahaan dapat dideteksi dengan menggunakan *balanced scorecard*. Perusahaan dapat melakukan perbaikan kinerja dan mengurangi kesenjangan tersebut dengan melaksanakan program pelatihan karyawan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan yang diselaraskan dengan prosedur (Wardhani, 1999; Khusna *et al.*, 2016). *Balanced Scorecard* menekankan pada upaya perusahaan investasi untuk kepentingan dimasa datang, meliputi investasi manusia, sistem dan prosedur. Manusia atau karyawan perusahaan perlu diberikan pelatihan secara rutin untuk

menambah keahlian atau kemampuan dalam rangka memenuhi perubahan tuntutan pelanggan dan lingkungan. Sistem perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perspektif ini mengukur betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil tujuan perusahaan (Pratiwi, 2010; Gunawan, 2015).

Menurut Mulyadi (2011), keunggulan konsep *balanced scorecard* dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik; (a) komprehensif, yaitu *balance scorecard* memperluas prespektif yang dicakup dalam perencanaan strategik. Perluasan perspektif rencana strategik ke prespektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat, antara lain kemampuan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang komplek; (b) Koheren, yaitu *balanced scorecard* mewajibkan personil untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik; (c) Berimbang, yaitu keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang; (d) Terukur, yaitu keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Hubungan Keempat Prespektif Penilaian dalam Balanced Scorecard Dalam Penilaian Kinerja

Organisasi yang baik wajib memiliki sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dan sistematis. Pengembangan sistem komprehensif sangat bermanfaat dalam membantu manajer untuk menterjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam

ukuran-ukuran kinerja yang saling terkait. Sistem tersebut dinamakan *balanced scorecard*, yang mengkombinasikan ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran-ukuran pemicu kinerja. *Balanced Scorecard* mengukur kinerja bisnis berdasarkan empat perspektif utama, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000; Giannopoulos, 2013).

Balanced Scorecard menyediakan suatu jalur yang memperlihatkan kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Tentu saja hal ini dapat memotivasi manajemen dan karyawan untuk mengukut kinerja mereka dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Konsep hubungan sebab akibat memegang peranan penting dalam *balanced scorecard* terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran masing-masing perspektif. Empat perspektif tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya yang penjabarannya merupakan suatu *strategic objectives* yang menyeluruh dan saling berhubungan.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dimana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan komitmen personal. Akibat dari peningkatan produktivitas dan komitmen dari personal akan meningkatkan pula kualitas proses layanan pelanggan dan proses layanan pelanggan akan terintegrasi. Kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan meningkat pula yang terlihat dari perspektif pelanggan. Tiga perspektif sebelumnya akan bermuara pada perspektif keuangan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan penjualan, peningkatan *cost effectiveness*, dan peningkatan return.

Meningkatnya komitmen dan produktivitas dalam perusahaan akan mampu meningkatkan kualitas proses layanan pelanggan dan akhirnya akan menciptakan kepercayaan terhadap pelanggan. Kepercayaan merupakan modal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menunjang keberhasilan dimasa yang akan datang.

Tanpa adanya dukungan dari pelanggan perusahaan akan mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena pelanggan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting. Pada akhirnya semua itu bermuara pada perspektif keuangan yang berdampak pada peningkatan return perusahaan yang ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan (Denton dan White, 2000).

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan dalam menyederhanakan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, strategis dan dinamik menjadi bagian-bagian, serta menjadikan variabel dalam suatu tingkatan hirarki. Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi kedalam satu cara yang logis. Masalah yang kompleks terdiri dari lebih dari satu masalah, struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, serta ketidakakuratan data yang tersedia (Chan dan Lilian, 2006; Chu dan Cheng, 2007; Cebeci, 2009; Lee *et al.*, 2010)

Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi basil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagai mana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 2008; Yi-Hui, 2013). Menurut Chu dan Cheng (2007); Atmanti, (2008); Cebeci (2009); Lee *et al.* (2010); Wakchaure dan Neeraj (2012), Ohdar dan Kumar, (2012) dalam menyelesaikan persoalan dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain: (1) *decomposition*; (2)

comparative judgement; (3) *comparative judgement*; (4) *synthesis of priority*; dan (5) *logical consistency*.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot kinerja berdasarkan bagaimana preferensi dari pengambilan keputusan terhadap tingkat kepentingan dari masing-masing perspektif, kelompok metrik dan KPI'S. Kriteria dan sub kriteria dalam konteks system pengukuran kinerja dengan menggunakan model *Balanced Scorecard* adalah berupa perspektif, kelompok metrik dan indikator kinerja kunci (Chu dan Cheng, 2007; Vanany, 2009; Lee *et al.*, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menganalisis kinerja Koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* dan *AHP*. Langkah-langkah dalam penerapan metode *AHP*, yaitu: (a) mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan; (b) membuat struktur hirarki; (c) membuat matrik perbandingan

berpasangan; (d) menghitung nilai *eigen* dan menguji konsistensinya; (e) mengulangi langkah (c) dan (d) untuk seluruh tingkat hirarki; (f) menghitung *eigen vector* dari setiap matrik perbandingan berpasangan; (g) memeriksa konsistensi hirarki, jika nilai *Consistency Ratio* (CR) lebih dari 10%, maka penilaian data harus diperbaiki.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan anggota BMT-UGT Sidogiri yang berlokasi di Pasuruan, yaitu sebanyak 2.262 orang, dengan rinci: 2.121 orang anggota dan 141 orang karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan dan anggota BMT-UGT Sidogiri Pasuruan. Teknik pengambilan sampel adalah *Stratified Random Sampling* untuk karyawan dan *convenience random sampling* untuk anggota BMT-UGT Sidogiri. Dasar yang digunakan dalam pengambilan sampel secara random dan berjenjang adalah level jabatan (posisi) karyawan pada BMT-UGT Sidogiri. Penentuan jumlah sampel menurut Neuman (2000) sebagai berikut:

Tabel 1
Rasio Jumlah Sampel Penelitian

Jumlah Populasi	Rasio Sampel
Kurang dari 1.000	30%
1.000 – 10.000	10%
Lebih dari 150.000	1%
Lebih dari 10.000.000	0,025%

Sumber : Neuman (2000 : 208)

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 212 anggota koperasi dan 42 karyawan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dengan teknik *convenience random sampling*. Pendekatan *Balanced Scorecard* menggunakan 4 perspektif untuk mengukur kinerja BMT-UGT Sidogiri Pasuruan, dimana definisi operasional variabel penelitian dari masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

Pertama, Perspektif keuangan, meliputi variabel: (1) rasio modal sendiri adalah rasio

yang mengukur kemampuan koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dalam menghimpun modal sendiri atas total modal yang dimiliki; (2) rasio efisiensi adalah kemampuan koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotannya atas penggunaan asset yang dimiliki. Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional; (3) likuiditas adalah kemampuan koperasi BMT-UGT Sidogiri

Pasuruan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; (4) rentabilitas asset adalah kemampuan koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan menghasilkan laba atas total asset yang digunakan; (5) rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan; (6) rasio partisipasi bruto adalah jumlah partisipasi bruto terhadap total partisipasi dan transaksi non anggota koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan

Kedua, Perspektif pelanggan, meliputi variabel: (1) penguasaan pasar (*market share*) adalah kemampuan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dalam menguasai pasar dalam periode tertentu, yaitu dengan melihat jumlah anggota yang dimiliki; (2) tingkat kepuasan anggota adalah sejauh mana tingkat kualitas pelayanan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan kepada anggotanya; (3) profitabilitas anggota adalah seberapa besar keuntungan yang berhasil dicapai BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dari pendapatan jasa yang ditawarkan kepada anggotanya.

Ketiga, Perspektif bisnis internal, meliputi variabel: (1) inovasi melalui pengembangan produk dan jasa, adalah sejauh mana peningkatan jaringan unit kerja. Variabel ini diproksikan dengan rasio *Network Growth Ratio (NGR)*, yaitu perbandingan antara delta unit kerja dengan

total unit kerja; (2) Proses operasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada anggota BMT-UGT Sidogiri Pasuruan. Variabel ini diproksikan dengan rasio *Administrative Expense to Total Revenue (AETR)*, yaitu perbandingan antara biaya administrasi dengan total pendapatan.

Keempat, Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, meliputi variabel: (1) produktivitas karyawan adalah produktivitas karyawan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dalam periode tertentu. Produktivitas karyawan diukur dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah karyawan BMT-UGT Sidogiri; (2) kepuasan karyawan adalah tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem dan kebijakan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan (Rangkuti, 2011; Kaplan dan Norton, 2000: 138; Hannabarger *et al.*, 2007 Lee *et al.*, 2010).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penilaian Kinerja Pada Perspektif Keuangan. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal BMT UGT Sidogiri pada tahun 2012, 2013, dan 2014 secara berturut-turut adalah 14,71%; 17,52%; 22,79%. Hal ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan total modal yang dimiliki, pada tahun 2012 dan 2013 kemampuan koperasi dalam menghimpun modal berada dalam

Tabel 2
Hasil Perhitungan Rasio Keuangan BMT UGT Sidogiri

RASIO	2012	2013	2014	Rata-rata
Modal Sendiri Terhadap Total Modal (%)	14,71	17,52	22,79	18,34
Efisiensi (%)	77,54	69,49	71,09	72,71
Likiuiditas (%)	26,89	30,54	27,08	28,17
Rentabilitas Asset (%)	5,83	6,16	5,13	16,67
Rentabilitas Modal Sendiri (%)	38,15	36,68	28,03	34,28
Partisipasi Bruto (%)	83,27	83,22	87,45	84,65

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012 - 2014

kondisi sehat yaitu berada dikisaran 15%-19%, sedangkan 2014 kemampuan koperasi dalam menghimpun modal dapat dikatakan

sangat sehat karena berada diatas 20%. Rasio Efisiensi Modal BMT UGT Sidogiri pada tahun 2012, 2013, dan 2014 secara

berturut-turut adalah 77,54%; 69,49%; 71,09% dimana hal ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghemat biaya pelayanan terhadap partisipasi bruto. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 kemampuan BMT UGT Sidogiri dalam menghemat biaya operasional usaha terhadap partisipasi bruto dapat dikatakan cukup baik karena berada pada kisaran 69-84%.

Rasio Likuiditas Modal BMT UGT Sidogiri pada tahun 2012, 2013, 2014 secara berturut-turut adalah 26,89; 30,54; 27,08. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi hutang jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 BMT UGT Sidogiri dapat dikatakan berada dalam kondisi likuid karena tingkat rasio likuiditasnya berada 26%-31%.

Rasio Rentabilitas Aset BMT UGT Sidogiri pada tahun 2012, 2013, dan 2014 secara berturut-turut adalah 5,38%; 6,16%; 5,13%. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba terhadap total modal. pada tahun 2012, 2013 dan 2014 kemampuan BMT UGT Sidogiri dalam menghasilkan laba terhadap total modal

dapat dikatakan cukup baik masih karena berada dibawah 5%-7,4%.

Rasio Partisipasi Bruto BMT UGT Sidogiri pada tahun 2012, 2013, 2014 secara berturut-turut adalah 83,27%; 83,22%; 87,45%. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani kebutuhan anggotanya. Pada tahun 2012, 2013, 2014 dapat dikatakan BMT UGT Sidogiri sangat mampu untuk melayani kebutuhan anggota karena berada diatas 75%.

Hasil Penilaian Kinerja Pada Perspektif Pelanggan

Pertama, Pangsa Pasar BMT-UGT. Pengukuran pangsa pasar digunakan untuk mengetahui sejauh mana BMT-UGT sidogiri mampu meningkatkan pangsa pasar yang mampu dikuasai dalam suatu periode tertentu. Peningkatan pangsa pasar BMT-UGT Sidogiri dapat ditandai dengan mengukur pertambahan jumlah anggota BMT-UGT Sidogiri dalam suatu periode tertentu. Hasil analisis terhadap pangsa pasar BMT-UGT Sidogiri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan perubahan jumlah anggota BMT-UGT Sidogiri.

Tabel 3
Penguasaan Pangsa Pasar BMT-UGT Sidogiri

Data Jumlah Anggota BMT-UGT Sidogiri				
Tahun	2012	2013	2014	Rata-rata (%)
Jumlah Anggota	5.552	8.871	11.902	31,4
Pangsa Pasar		37,4%	25,4%	

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012 - 2014

Jumlah anggota BMT-UGT Sidogiri terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Hal ini menunjukkan peningkatan penguasaan pangsa pasar BMT-UGT Sidogiri yaitu meningkat sebesar 37,4% pada tahun 2013 dan sebesar 25,4% pada tahun 2014. Pertambahan jumlah anggota menunjukkan semakin besar pangsa pasarnya.

Kedua, Kepuasan Anggota. Rata-rata tingkat kepuasan anggota BMT-UGT Sidogiri yang diukur dengan menggunakan

skala likert 1-7 diketahui adalah sebesar 6,55. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan anggota dapat dikatakan sangat puas karena memiliki nilai rata-rata di atas 6. Uji validitas terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada masing-masing pertanyaan berada di bawah 5%, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* 0,727, sehingga hasil penelitian tersebut

masih dapat dikatakan cukup *reliable* dalam penelitian ini.

Ketiga, Profitabilitas Anggota. Profitabilitas Anggota digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang mampu dihasilkan oleh BMT-UGT Sidogiri

terhadap jasa yang diberikan terhadap anggotanya. Semakin tinggi nilai profitabilitas anggota artinya semakin besar pula keuntungan yang mampu dihasilkan perusahaan dari anggota. Hasil perhitungan profitabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Profitabilitas Anggota BMT-UGT Sidogiri

Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Penjualan Bersih	Profitabilitas Anggota (%)
2012	Rp 32.716.977.345	Rp 75.832.760.114	43,14
2013	Rp 60.315.433.636	Rp 118.888.270.944	50,73
2014	Rp 68.730.685.880	Rp 119.779.571.413	57,38
Rerata (%)			50,41

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012-2014

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan profitabilitas anggota dapat terlihat bahwa keuntungan yang dihasilkan BMT-UGT Sidogiri sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 tarus mengalami peningkatan, yaitu 43,14% pada tahun 2012, 50,73% pada tahun 2013 dan 57,38% pada tahun 2014.

Hal ini menunjukkan kinerja BMT-UGT Sidogiri dalam menghasilkan keuntungan pada periode penelitian terus mengalami peningkatan.

Hasil Penilaian Kinerja Pada Perspektif Proses Bisnis Internal

Pertama, Rasio NGR (*Network Growth Ratio*). Semakin tinggi nilai rasio NGR maka tingkat pengembangan bisnis BMT-UGT Sidogiri juga semakin meningkat. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil Rasio NGR menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertambahan jumlah unit kerja BMT-UGT Sidogiri yaitu sebesar 15,95%

pada tahun 2012, 15,17% pada tahun 2013 dan 10,89%, walaupun terjadi penurunan pertambahan unit kerja akan tetapi jumlah unit kerja BMT-UGT Sidogiri terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar 190 unit pada tahun 2012; 229 unit pada tahun 2013, dan 257 unit pada tahun 2014.

Kedua, Rasio AETR (*Administrative Expense to Total Revenue*). Hasil pengukuran kinerja BMT-UGT Sidogiri dengan menggunakan rasio AETR dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 menunjukkan tingkat efisiensi dan efektifitas operasional pelayanan BMT-UGT Sidogiri. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan tingkat efisiensi yaitu sebesar 23,83% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,71%, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu sebesar 29%.

Tabel 5
Rasio NGR BMT-UGT Sidogiri

Tahun	Delta Unit kerja	Total unit kerja	Rasio NGR (%)
2012	41	190	15,95
2013	39	229	15,17
2014	28	257	10,89
Rata-rata (%)			14,00

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012-2014

Tabel 6
Rasio AETR BMT-UGT Sidogiri

Tahun	Biaya Administrasi	Total Pendapatan	Rasio AETR (%)
2012	Rp 24.901.429.965	Rp 100.734.190.079	24,71
2013	Rp 37.213.606.206	Rp 156.101.877.150	23,83
2014	Rp 59.440.155.445	Rp 204.928.229.995	29,00
Rerata (%)	25,84		

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012 - 2014

Hasil Penilaian Kinerja Pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Pertama, Produktifitas Karyawan. Pengukuran tingkat produktifitas karyawan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keuntungan yang dihasilkan masing-masing karyawan terhadap perusahaan dalam periode tertentu. Semakin tinggi nilai produktifitas karyawan maka semakin besar karyawan BMT-UGT Sidogiri dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan tingkat produktifitas karyawan BMT-UGT Sidogiri.

BMT-UGT Sidogiri adalah sebesar Rp 35.913.257 artinya rata-rata masing-masing karyawan BMT-UGT Sidogiri memberikan kontribusi keuntungan terhadap perusahaan sebesar Rp 35.913.257, begitu pula pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing karyawan memberikan kontribusi keuntungan terhadap perusahaan sebesar Rp53.376.489 dan Rp51.253.307. Tahun 2013 tingkat

produktifitas karyawan BMT-UGT Sidogiri meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya atau naik sebesar 32,71% sedangkan pada tahun 2014 tingkat produktifitas karyawan BMT-UGT Sidogiri sedikit mengalami penurunan sebesar 4,1%.

Kedua, Kepuasan karyawan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepuasan karyawan BMT-UGT Sidogiri, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan karyawan BMT-UGT Sidogiri yang diukur dengan menggunakan skala likert 1-7 adalah sebesar 6,04. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem kerja dan kebijakan BMT-UGT Sidogiri dapat dikatakan sangat puas karena memiliki nilai rata-rata di atas 6.

Uji validitas terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada masing-masing pertanyaan berada di bawah 5%, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat dikatakan valid.

Tabel 7
Produktifitas Karyawan BMT-UGT Sidogiri

Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Jumlah Karyawan	Produktivitas Karyawan
2012	Rp 32.716.977.345	911	Rp 35.913.257
2013	Rp 60.315.433.636	1.130	Rp 53.376.489
2014	Rp 68.730.685.880	1.341	Rp 51.253.307
Rata-rata (%)			Rp 46.847.684

Sumber: diolah berdasarkan laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri, 2012 - 2014

Uji reliabilitas terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* 0,738, sehingga hasil penelitian tersebut masih dapat dikatakan *reliable* digunakan dalam penelitian ini.

BMT-UGT Sidogiri Pasuruan pada saat ini berada dalam tahap bertumbuh (*growth*) menuju ke tahap bertahan (*sustain*). Peningkatan pertumbuhan usaha yang dilakukan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan sejak ber-

diri hingga saat ini telah hampir mencapai puncak pertumbuhan bisnisnya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian BMT-UGT Sidogiri yang mencatatkan sebagai Koperasi terbesar ke-tiga (3) se-Indonesia dan Koperasi syariah terbesar nomor 1 nasional. Peningkatan kepuasan kinerja karyawan yang dicapai dengan menerapkan sistem kepemimpinan, motivasi dan semangat kerja yang optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan BMT-UGT Sidogiri Serta mendukung peningkatan kinerja BMT-UGT Sidogiri secara keseluruhan.

Hasil Analisis Dengan Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Hasil analisis dari masing-masing perspektif *Balanced Scorecard* menunjukkan bobot masing-masing perspektif yaitu perspektif keuangan 27%, perspektif pelanggan 59%, perspektif bisnis internal 5%, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 8%. Hasil pembobotan tersebut menunjukkan bahwa perspektif pelanggan memiliki nilai tertinggi artinya BMT-UGT Sidogiri lebih memprioritaskan terhadap pelayanan pelanggan dalam pencapaian kinerja dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain.

Hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* terhadap faktor-faktor perspektif keuangan menunjukkan bobot masing-masing faktor yaitu Rasio Modal 61%, rasio likuiditas 13%, rasio profitabilitas 6%, rasio efisiensi 19%. Hasil pembobotan pada faktor-faktor perspektif keuangan tersebut menunjukkan bahwa rasio modal memiliki nilai tertinggi artinya BMT-UGT Sidogiri menganggap bahwa rasio keuangan lebih berperan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Secara umum besar kecilnya suatu usaha dapat diukur melalui besarnya skala usaha perusahaan tersebut. Modal usaha merupakan faktor penting dalam menentukan peningkatan skala usaha, semakin besar yang digunakan maka akan semakin besar pula skala usaha tersebut. Selain itu besarnya modal pihak ketiga juga menjadi faktor yang cukup pen-

ting untuk diperhatikan, semakin besar hutang suatu perusahaan maka beban bunga perusahaan juga akan semakin besar sehingga akan mengganggu tingkat likuiditas perusahaan.

Hasil penelitian terhadap faktor-faktor perspektif pelanggan menunjukkan bobot masing-masing faktor yaitu Jumlah anggota 66%; kepuasan anggota 5%, loyalitas anggota 17%, kepercayaan anggota 11%. Hasil pembobotan pada faktor-faktor perspektif pelanggan menunjukkan bahwa Jumlah anggota memiliki bobot skor tertinggi artinya BMT-UGT Sidogiri menganggap bahwa jumlah anggota lebih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Salah satu kekuatan dari koperasi adalah dari jumlah anggotanya karena dari sanalah modal usaha dapat dihimpun dan memperbesar pangsa pasar dari koperasi tersebut.

Hasil penelitian terhadap faktor-faktor perspektif bisnis internal menunjukkan bobot masing-masing faktor yaitu pertumbuhan usaha 2%, kualitas layanan jasa 6%, jangkauan layanan 6%, citra perusahaan 12%. Hasil pembobotan pada faktor-faktor perspektif bisnis internal menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan jasa memiliki bobot skor tertinggi artinya BMT-UGT Sidogiri menganggap faktor kualitas layanan jasa lebih berperan pada aspek bisnis internal. Kualitas layanan jasa menjadi faktor yang lebih berperan dalam mempertahankan loyalitas anggota semakin baik kualitas layanan jasa maka akan semakin meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bobot masing-masing faktor yaitu loyalitas karyawan 9,9%, kepuasan karyawan 58%, keterampilan karyawan 5%, produktivitas karyawan 26%. Hasil pembobotan pada faktor-faktor perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bahwa faktor kepuasan karyawan memiliki bobot skor paling tinggi artinya BMT-UGT Sidogiri menganggap faktor kepuasan karyawan menjadi cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Hasil Analisis perspektif *Balanced Scorecard* dengan Metode AHP

Metode analisis dengan menggunakan AHP merupakan suatu metode pembobotan untuk menentukan prioritas atau pemilihan suatu alternatif pilihan. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagian, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki.

Hasil analisis pembobotan keempat perspektif dalam *balanced scorecard* dengan metode AHP menunjukkan bahwa perspektif pelanggan memiliki bobot nilai tertinggi dibandingkan dengan ketiga perspektif lainnya. Faktor utama dalam penentuan kesuksesan sebuah koperasi dapat dilihat dari bagaimana loyalitas anggota koperasi tersebut terhadap perusahaan. Berbeda dengan jenis usaha lain, salah satu kekuatan dari koperasi terletak pada anggota koperasi tersebut dimana anggota koperasi memiliki dua peran yaitu sebagai pemilik usaha dan juga sebagai pelanggan.

Meningkatnya komitmen dan produktivitas dalam perusahaan akan mampu meningkatkan kualitas proses layanan pelanggan dan akhirnya akan menciptakan kepercayaan terhadap pelanggan. Kepercayaan merupakan modal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menunjang keberhasilan dimasa yang akan datang. Tanpa adanya dukungan dari pelanggan perusahaan akan mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena pelanggan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting (Denton dan White, 2000).

Menurut Julianto (2000), Atmanti (2008), Zeithaml *et al.*, (2009), Yi-Hui (2013) bahwa sifat jasa itu adalah *customization*, artinya jasa itu tidak terstandar karena didesain khusus untuk kebutuhan itu, oleh karena itulah pelanggan menjadi fokus utama untuk mencapai keunggulan kompetitif pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

Selanjutnya Al-Najjar dan Sabah, (2012), Navaratnaseelana dan Elangkumaran (2014) dalam kajiannya membuktikan bahwa kepuasan nasabah Bank Komersial sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas produk dan harga produk dalam produk jasa berupa biaya dalam mendapatkan layanan jasa (Jahanshasi *et al.*, 2011; Malik *et al.*, 2012). Menjaga kualitas layanan yang prima terutama dalam perusahaan jasa sangatlah penting yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan akan berimplikasi terhadap berpindah pelanggan kepada penyedia jasa lainnya. Dengan demikian, keunggulan dalam kualitas layanan merupakan kunci untuk mencapai kepuasan pelanggan. Perubahan akan tingkat pendidikan konsumen menyebabkan tuntutan yang tinggi terutama dalam industri perbankan maupun lembaga keuangan termasuk koperasi khususnya BMT-UGT Sidogiri.

Sejalan dengan kajian Navaratnaseelana dan Elangkumaran (2014), hasil penelitian yang dilakukan oleh Malik *et al.* (2012) juga menegaskan bahwa kepuasan pelanggan dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih tinggi. Mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru merupakan prestasi bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. Kepuasan pelanggan dapat mencegah terjadinya perpindahan pelanggan. Sementara itu, Jahanshasi *et al.* (2011) memberikan gambaran bahwa kepuasan pelanggan dapat menciptakan loyalitas pelanggan, namun, Almsalam (2014) mengungkapkan bahwa anteseden dari kepuasan pelanggan adalah harapan pelanggan dan kualitas layanan. Berdasarkan berbagai komparasi empiris ini, fenomena yang ada pada BMT-UGT Sidogiri memberikan gambaran yang sejalan dengan beberapa kajian terdahulu, dimana perspektif pelanggan merupakan unsur yang memiliki bobot paling tinggi dalam menentukan kinerjanya.

Menurut Mittal dan Kamakura (2001);

Mosahab *et al.* (2010) bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam perusahaan. Selain itu, pelanggan yang puas akan mengungkapkan kepuasannya kepada orang lain tentang pengalaman mereka baik. Fakta ini, terutama di negara-negara berkembang, di mana kehidupan sosial telah berbentuk melalui komunikasi sosial masyarakat (Jamal dan Naser, 2002). Meskipun kepuasan telah didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kinerja, temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil pelayanan kualitas menentukan kepuasan pelanggan.

Merujuk semua kajian terdahulu, harapan BMT-UGT Sidogiri harus terus berupaya untuk fokus pada perspektif pelanggan terutama dalam menciptakan persepsi positif berdasarkan pengalaman anggota. Pengalaman dan persepsi positif akan membangun citra dan kepuasan anggota sehingga harapannya adalah terjadi *word of mouth* (WOM) positif. WOM yang positif inilah yang tidak saja akan mencegah perpindahan pelanggan namun juga akan menyebabkan masuknya pelanggan-pelanggan baru.

Perspektif bisnis internal memiliki bobot penilaian terkecil pada hasil analisis AHP. Perspektif bisnis internal dianggap memiliki pengaruh paling rendah terhadap kinerja dari BMT-UGT Sidogiri. Hal ini dikarenakan produk BMT-UGT Sidogiri yang berupa pelayanan jasa, sehingga produk yang dihasilkan melekat pada pelayanan karyawan terhadap anggotanya. Anggota sebagai pelanggan lebih berfokus pada pelayanan yang dirasakan dibandingkan dengan perspektif bisnis BMT Sidogiri yang diukur oleh dua indikator, yaitu inovasi yang diproksikan dengan rasio NGR (*Network Growth Ratio*); dan proses operasi yang diproksikan dengan rasio AETR (*Administrative Expense to Total Revenue*) (Chu dan Cheng, 2007; Cebeci, 2009; Erbas *et al.*, 2012).

Selain itu, perspektif bisnis internal merupakan proses bisnis yang harus dilakukan perusahaan, dalam jangka pendek

maupun jangka panjang guna mencapai tujuan finansial dan persepsi pelanggan yang baik. Sasaran strategis dari perspektif bisnis internal bagi BMT-UGT Sidogiri seharusnya, yaitu: (1) adanya pengembangan produk-produk baru yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah akan layanan keuangan sehingga anggota/pelanggan lama dapat dipertahankan dan anggota/pelanggan baru dapat diperoleh (memperluas pangsa pasar), dan (2). Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para anggota dan untuk memperlancar bergulirnya proses diseluruh bagian BMT-UGT Sidogiri. Pemanfaatan teknologi bagi karyawan dalam memberikan layanan kepada anggota/pelanggan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemberian layanan di BMT-UGT Sidogiri. Sedangkan hal lain dalam pemanfaatan teknologi yang terkait dengan pihak ketiga sebagai misal kerjasama penggunaan ATM bersama atau kerjasama terkait dengan SSKOHAT. Strategi ini dapat digunakan sejalan dengan sasaran strategis dalam perspektif keuangan maupun perspektif pelanggan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa para pelanggan tidak begitu memperhatikan perspektif bisnis internal terutama yang terkait dengan perkembangan jumlah unit kerja dan efisiensi BMT-UGT Sidogiri, tetapi pelanggan/anggota lebih mementingkan pada kualitas layanan yang dirasakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khusna *et al.* (2016).

SIMPULAN

Analisis Kinerja BMT-UGT Sidogiri dengan Pendekatan *Balanced Scorecard*; (a) Hasil analisis perspektif keuangan BMT-UGT Sidogiri Pasuruan secara umum berada dalam kondisi baik; (b) Hasil analisis perspektif kepuasan pelanggan BMT-UGT Sidogiri menunjukkan bahwa anggota BMT-UGT Sidogiri puas dengan kinerja pelayanan jasa BMT-UGT Sidogiri; (c) Hasil

analisis perspektif bisnis internal BMT-UGT Sidogiri menunjukkan peningkatan jumlah unit bisnis BMT-UGT Sidogiri sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, walaupun persentase peningkatan unit bisnis mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi jumlah unit bisnis BMT-UGT Sidogiri terus mengalami pertumbuhan unit; d) Hasil analisis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bahwa tingkat produktifitas karyawan BMT-UGT Sidogiri pada tahun 2012 hingga 2014 terus mengalami peningkatan. Selain itu hasil analisis terhadap tingkat kepuasan karyawan menunjukkan bahwa karyawan BMT-UGT Sidogiri cukup puas terhadap kebijakan manajemen.

Analisis perspektif *Balanced Scorecard* dengan menggunakan metode *AHP*. Hasil analisis terhadap masing-masing perspektif *Balanced Scorecard* dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (*AHP*) menunjukkan bahwa perspektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah perspektif pelanggan, sedangkan faktor yang paling dianggap memiliki pengaruh tertinggi dari perspektif pelanggan adalah pertumbuhan jumlah anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Najjar, dan M. Sabah. 2012. Designing a Balanced Scorecard to Measure a Bank's Performance: A Case Study. *International Journal of Business Administration* 3(4): 44-53.
- Almsalam, S. 2014. The Effects of Customer Expectation and Perceived Service Quality on Customer Satisfaction. *International Journal of Business and Management Invention* 8(3): 79-84.
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta
- Atmanti, D. H. 2008. Analytical Hierarchy Process Sebagai Model yang Luwes. *Prosiding INSAHP5*: C 17-1–C 17-9.
- Ayvaz, E. dan D. Pehlivanl. 2011. The Use of Time Driven Activity Based Costing and Analytic Hierarchy Process Method in the Balanced Scorecard Implementation. *International Journal of Business and Management* 3(6): 56-67).
- Cebeci., U. 2009. Fuzzy AHP-Based Decision Support System for Selecting ERP Systems in Textile Industry by Using Balanced Scorecard. *Expert Systems with Applications, An International Journal* (36): 8900-8909.
- Chan dan Y. C. Lilian. 2006. An Analytic Hierarchy Framework for Evaluating Balanced Scorecard of Healthcare Organizations. *Revue Canadienne des Sciences de L'administration* 23(2): 85-104.
- Chu, H. L. dan C. J. Cheng. 2007. An Empirical Investigation of the Governmental Performance Management System: Using the Balanced Scorecard and the Analytic Hierarchy Process. *Journal of Management* 24(5): 689-705.
- Ciptani, M. K. 2000. *Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 37-48
- Danaei, A. dan H. Amer. 2013. Performance Measurement Using Balanced Scorecard: A Case Study of Pipe Industry. *Management Science* 3(8): 1433-1438.
- Denton, A. dan B. White. 2000. Implementing a Balanced Scorecard Approach to Managing Hotel Operations. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly* 41(1): 94-107
- Erbasi, A., V. Parlakhaya dan T. Raiif. 2012. The Use of Analytic Hierarchy Process in The Balanced Scorecard: an Approach in a Hotel firm. *Business and Management Review* 2(2): 23-37.
- Garrison, R. H. dan E. W. Noreen. 2006. *Akuntansi Manajerial*. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta
- Giannopoulos, G. 2013. The Use of the Balanced Scorecard in Small Companies. *International Journal of Business and Management* 8(14): 145-161.
- Gunawan, B. 2015. *Balanced Scorecard: Perspektif Baru Dalam Menilai Kinerja Organisasi*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1(1): 41-51.

- Hannabarger, C., B. Rick dan E. Peter. 2007. *Balanced Scorecard Strategy for Dummies*. Wiley Publishing, Indianapolis.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Horne, V., C. James dan J. M. Wachowicz Jr. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- <http://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2015/02/22/39340/bmt-ugt-sidogiri-targetkan-aset-rp-2-triliun-ingin-jadi-koperasi-nasional.html>.
- Jahanshasi, A., M. H. Gasthi, S. A. Mirdamadi, K. Nawaser dan S. M. S. Khaksar. 2011. Study the Effects of customer Service and Product Quality on Customer Satisfaction and Loyalty. *International Journal of Humanities and Social Science* 7(1): 253-264.
- Jamal, A. dan K. Naser. 2002. Customer satisfaction and retail banking: an Assessment of Some of the Key Antecedents of Customer Satisfaction in Retail Banking. *International Journal of Bank Marketing* 20(4): 146-160.
- Julianto, H. 2000. Mengukur Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Manajemen* 138(2): 34-40
- Kaplan, R. S. dan D. P. Norton. 2000. *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Harvard Business School Press. Boston
- Khusna, A., M. Dzulkirom, dan M. G. W. Endang. 2016. Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Metode *Balanced Scorecard* Guna Menilai Kesehatan Usaha BUMN (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kretet Baru Malang pada Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 35(1): 57 - 66
- Lasdi, L. 2002. *Balanced Scorecard* Sebagai Rerangka Pengukuran Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif dalam Lingkungan Bisnis Global. *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 150-169.
- Lee, A., H. I. Chen, dan C. J. Chang. 2010. A Fuzzy AHP dan BSC Approach for Evaluating Performance of IT Department in the Manufacturing Industry in Taiwan. *Expert Systems With Application* 34(4): 96-107
- Lipe, M. G. dan S. E. Salterio. 2000. The Balanced Scorecard: Judgemental Effects of Common and Unique Performance Measures. *The Accounting Review* 75(3): 283-298.
- Malik., M., M. Ghafoor, dan H. K. Iqbal. 2012. Impact of Brand Image, Service Quality, and Price on Customer Satisfaction in Pakistan Telecommunication Sector. *International Journal of Business and Social Science* 23(3): 123-132.
- Mittal, V. dan W. A. Kamakura. 2001. Satisfaction, Repurchase Intent, and Repurchase Behavior: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics. *Journal of Marketing Research* 8(1): 131-142.
- Moisawa, T. 2002, Building Performance Measurement System With The Balanced Scorecard Approach. *NRI Journal* 45(2): 134-142.
- Mosahab, R., O. Mahamad dan T. Ramayah. 2010. Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: A Test of Mediation. *International Business Research Journal* 29(3): 72-80.
- Mulyadi. 2011. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.
- Navaratnaseelan, J. J. dan P. Elangkumaran. 2014. Impact of Service Quality on Customer Satisfaction: A Study on Customers of Commercial Bank of Ceylon PLC Trincomalee District. *Proceeding of the 3rd International Conference on Management and Economics* 30(5): 359-364.
- Neuman, W. L. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. 4th edition. Allyn & Bacon. Boston
- Ohdar, R. dan R. P. Kumar. 2012. Suppliers' Performance Evaluation and Ranking in a Supply Chain: An Analytical Hierarchy Process-Based Approach. *The IUP Journal of Supply Chain Management*

- IX(1): 73-90.
- Pratiwi, U. 2010. *Balanced Scorecard dan Manajemen Strategi*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 11(2): 166-174.
- Radithya, E. 2011. Evaluasi Penerapan *Balanced Scorecard* Terhadap Efisiensi Kinerja Karyawan di Divisi Penjualan PT. Auto 2000, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi* 43(06): 68-77.
- Rangkuti, F. 2011. *SWOT-Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Saaty, T. L. 2008. Decision Making with The Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences* 1(1): 83-98
- Safirin. 2010. "Kajian Kinerja Industri Kecil Dengan Metode Balance Score Card dan Analytical Hierarchy Process". *Jurnal Teknik Industri* 11(1): 15-20.
- Syafi'i. M. A. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Susetyo, J. dan A. U. L Sabakula. 2014. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Balanced Scorecard* dan *Integrated Performance Measurement System (IPMS)*. *Jurnal Teknologi* 7(1): 56-63.
- Wakchaure, S. dan J. K. Neeraj. 2012. Determination of Bridge Health Index Using Analytical Hierarchy Process. *Construction Management and Economics* 30(4): 133-149.
- Wardhani, 1999. *Balanced Scorecard* sebagai Salah Satu Sarana Pengukuran Kinerja Operasi Perusahaan. *Jurnal Siasat Bisnis* 7(96): 56-67.
- Yi-Hui, L. 2013. Implementing Balanced Scorecard of Government Mis Department—Using AHP and Fuzzy AHP Methods. *Proceeding of International Conference on Technology Innovation and Industrial Management* 21(6): 124-131.
- Vanany, I., 2009. *Performance Measurement Model & Aplikasi*. ITS Press. Surabaya.
- Zethaml, A. V. Bitner, M. Jo., dan G. Dwayne. 2009. *Service Marketing-Integrated Customer Focus Across the Firm*. Fifth Edition. McGraw Hill Inc. New York.

PRAKTIK CREATIVE ACCOUNTING PADA KOPERASI DI JAWA TIMUR

Dian Agustia

agustia.dian@yahoo.com

Ade Palupi

Universitas Airlangga

ABSTRACT

The cooperation is characterized that its member includes the owners as well as the users of a cooperation. The cooperation financial reports have to be reported as a tool of accountability of the officers to the cooperation members in the annual meeting. The most essential information required in the annual meeting is the cooperation's profits that in Indonesia is called as Sisa Hasil Usaha (SHU). In this study, a creative accountancy practice is applied as activities that is done by a business unit to report the desired surplus by implementing accountancy techniques and policies in regard with particular condition. By using descriptive statistic analysis, a cooperation with the scale area of East Java Province during the period of 2012 to 2014 has implemented a creative accountancy practice to increase or decrease profit. The cooperation officers or managers increase its SHU when its factual profit is lower; but they decrease its SHU when its factual profit is higher. The purpose of this practice is to reduce the fluctuation of SHU so that the cooperation looks stable and has no high risk for businesses. The results of this study is relevant with Scoot (2011) arguing for the opportunistic practice of cooperation managers or officers to maximize compensation contracts, debt contract, and political costs.

Key words: cooperation, creative accounting practice, increasing profit, decreasing profit, income smoothing

ABSTRAK

Koperasi mempunyai karakteristik yaitu anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Laporan keuangan wajib disajikan sebagai alat pertanggungjawaban oleh pengurus kepada anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan. Informasi yang sangat penting di dalam laporan keuangan adalah laba. Pada badan usaha koperasi dikenal dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Praktik akuntansi kreatif merupakan aktivitas yang dilakukan unit usaha untuk melaporkan hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Dengan analisis statistik deskriptif, koperasi skala provinsi di Jawa Timur periode tahun 2012-2014 menerapkan praktik akuntansi kreatif dengan meningkatkan laba atau menurunkan laba. Pengurus koperasi/manager koperasi menaikkan SHU jika terjadi penurunan SHU dari yang sesungguhnya, yang cukup besar, dan sebaliknya, pengurus koperasi menurunkan SHU jika terjadi kenaikan SHU dari yang sesungguhnya yang cukup besar. Koperasi melakukan praktik akuntansi kreatif yang dominan adalah perataan laba. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi SHU yang dilaporkan sehingga koperasi terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. Hasil studi ini mendukung (2011) yang menyebutkan perilaku pengurus selaku manajemen koperasi dipandang sebagai perilaku oportunistik manager dalam memaksimalkan kontrak kompensasi, kontrak hutang dan biaya politik.

Keywords: koperasi, praktik akuntansi kreatif, menaikkan laba, menurunkan laba, perataan laba

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah revolusi ekonomi ASEAN yang menjadikan sebuah wilayah regional yang tidak memiliki batas untuk melakukan pergerakan barang dan jasa serta tenaga kerja yang didukung oleh modal baik

domestik maupun asing. Indonesia sebagai negara ASEAN ikut menyetujui pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Koperasi di Indonesia harus memiliki daya saing dalam menghadapi MEA. Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, pe-

ngembangan peran masyarakat melalui koperasi akan menjadi titik yang menjadikan globalisasi sebagai pembuka kesempatan bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah. Koperasi menunjukkan potensi bertahan dalam globalisasi yang diwarnai oleh persaingan efisiensi dan profesionalisme pelaku bisnis. Koperasi merupakan lembaga yang berbasis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial dan ekonomi. Koperasi menciptakan peluang bagi masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. Koperasi lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya yang terkait. Prinsip-prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela, artinya seorang anggota dapat mendaftarkan/mengundurkan diri dari koperasinya. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat di antara para anggota. Ini merupakan tata kelola yang ada di koperasi. Pembagian laba koperasi (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil, artinya sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha tidak semata-mata berdasar pada modal yang disertakan, tetapi juga berdasar pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, tetapi yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Kemandirian, artinya bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain, sehingga pada hakikatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil, 2009; 2012a).

Laporan keuangan suatu perusahaan berisi informasi tentang keberhasilan perusahaan dan informasi tersebut sangat penting bagi para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laba merupakan salah satu indikator penting dalam nilai kinerja perusahaan dan informasi tentang laba dapat diperoleh dari laporan keuangan. Oleh sebab itu pihak manajemen seringkali memanipulasi informasi mengenai laba sesuai dengan hasil yang diinginkannya.

Praktik *creative accounting* merupakan aktivitas yang dilakukan suatu badan usaha dengan memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapat hasil yang diinginkan yaitu penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada motivasi manajemen melakukannya. Akuntansi sebagai ilmu rekayasa memberi peluang dan inovasi bagi akuntan di perusahaan atau badan usaha termasuk koperasi termasuk pemilihan metode atau prosedur yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi menyediakan berbagai alternatif pilihan, sehingga *creative accounting* bagi akuntan merupakan langkah untuk memainkan angka keuangan, memilih dan menerapkan prinsip akuntansi secara agresif, kecurangan pelaporan keuangan, serta langkah menuju manajemen laba atau *income smoothing*.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek *creative accounting* pada koperasi di Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik *creative accounting* pada koperasi di Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis terkait teori dan konsep *creative accounting* pada koperasi.

TINJAUAN TEORETIS

Praktik Creative Accounting

Teori keagenan (*agency theory*) sering digunakan untuk menjelaskan *creative accounting*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam teori keagenan (*agency theory*),

hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberi suatu jasa dan kemudian mendelegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Masalah keagenan timbul dalam perusahaan. Agen dalam perusahaan adalah manager, secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan laba para pemegang saham (*principal*), di sisi lain manager juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahterannya. Pemilik mengharap *return* yang tinggi atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan manajemen mengharap kompensasi yang tinggi dan dipenuhinya kebutuhan psikologis mereka. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara manajemen dengan pemilik karena masing-masing akan memenuhi kepentingannya sendiri (*opportunistic behavioral*). Jensen dan Meckling (1976) mengelompokkan biaya keagenan ke dalam tiga jenis, yaitu: *Monitoring Costs*, *Bonding Costs*, dan *Residual Loss*.

Menurut Scott (2011) dan Amat *et al.* (2004), *creative accounting* adalah tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi, atau tindakan nyata yang dapat mempengaruhi laba guna mencapai pelaporan laba yang diinginkan. Hasil yang diinginkan oleh penyusun laporan keuangan berupa penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada motivasi mereka melakukannya (Sulistiana, 2006). Dalam penelitian ini, *creative accounting* adalah aktivitas pada koperasi untuk memanfaatkan teknik, standar, dan kebijakan akuntansi guna mendapat hasil yang diinginkan yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menurut Schipper (1989), *creative accounting* merupakan alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pengungkapan keuangan dengan tujuan mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manager maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi. Scott (2011) mengartikan *creative accounting* sebagai

tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi seperti pengangguran *accrual* dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pengelolaan perusahaan. Informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Scott (2011) menyebutkan dua cara pemahaman atas *creative accounting* yaitu manajemen dipandang sebagai perilaku oportunistik manager dalam memaksimalkan kontrak kompensasi, kontrak hutang dan biaya politik, dan *creative accounting* dipandang dari prespektif *efficient contracting (efficient earning management)* yang memberi fleksibilitas untuk melindungi manager dan perusahaan dari kejadian yang tidak terduga sebagai antisipasi risiko.

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai *creative accounting* yaitu *earning accounting theory*. Teori akuntansi positif menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan praktik di dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manager dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang (Watts dan Zimmerman, 1986). Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Terdapat motivasi yang secara umum berhubungan dengan perilaku oportunistik manager. Motivasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Motivasi Bonus/*Bonus Plan Hypothesis* (hubungan antara pemilik dengan manajemen).

Kinerja serta insentif yang akan diterima oleh manager dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan sehingga

manajer akan cenderung berperilaku oportunistik dengan memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang akan dapat meningkatkan laba. Kinerja akan tampak baik sehingga manajer dapat memaksimalkan insentif yang diterimanya (Watts dan Zimmerman, 1986).

2. Motivasi Utang/*Debt Hypothesis* (hubungan antara kreditor dengan manajemen) Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah melalui pinjaman atau kontrak hutang. Dalam kontrak tersebut terdapat beberapa persyaratan atau batasan yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan *income increasing* untuk menjaga agar tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap persyaratan kredit (*debt covenant*) maka semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986).
3. Motivasi Pajak Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*, karena kecenderungan perusahaan ini melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya.
4. Motivasi Penjualan Saham Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public*.

Scott (2011) mengungkapkan terdapat jenis pola yang dapat dilakukan manajer dalam melakukan praktik *creative accounting*, yaitu:

1. Pola *taking a bath* Dilakukan pada saat keadaan buruk yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan tidak dapat dihindari pada periode berjalan. Pola ini dilakukan dengan cara mengakui beban-beban dan kerugian periode yang akan datang ke periode berjalan dan sebaliknya, menunda pendapatan periode berjalan ke periode berikutnya, sehingga mengorbankan laba periode berjalan hingga

menjadi buruk atau mengalami kerugian yang drastis agar pada periode berikutnya perusahaan dapat mendorong peningkatan labanya.

2. Pola *income minimization* Dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis sehingga dapat mengurangi biaya politis (*political cost*). Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan beban secara cepat atau menunda pengakuan pendapatan.
3. Pola *income maximization* Sebagai upaya memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar (*bonus plan hypothesis*) melalui pemilihan metode-metode akuntansi dan pemilihan waktu pengakuan transaksi, seperti mempercepat pencatatan dan menunda biaya.
4. Pola *income smoothing* Merupakan Bentuk manajemen laba yang paling sering dilakukan dan paling populer. Manajemen pola ini, manajer menaikkan laba jika terjadi penurunan laba yang cukup besar, begitu pula sebaliknya. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Creative accounting dianggap sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi yang diketahui manajemen ke dalam laporan keuangan, seperti mengungkap informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada para investor (Healy, 1985). Prestasi dan keberhasilan manajemen dalam memimpin suatu perusahaan banyak dinilai berdasarkan informasi akuntansi sebagai *proxy* kinerja perusahaan.

Deteksi Creative Accounting

Model-model deteksi *creative accounting* yang banyak digunakan dalam riset empiris yang dikemukakan oleh Kothari et al. (2005) diantaranya adalah:

1. *Jones Model (1991)* Model ini berfokus pada total akrual se-

bagai sumber informasi manipulasi akuntansi atau manajemen laba. *Jones Model* mengasumsikan bahwa akrual nondiskresioner bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya sehingga perubahan akrual (perbedaan antara akrual tahun ini dengan tahun lalu) yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan akrual diskresioner.

2. *Modified Jones Model* (1995)

Modified Jones Model dikembangkan oleh Dechow *et al.* (1995). Model ini muncul untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam *Jones Model*. Penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

- Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 , dan α_3 menggunakan *Jones Model* (1991) dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kemudian untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan aset tahun sebelumnya (A_{it-1}) sehingga formulasinya berubah menjadi:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2$$

$$(\Delta R_{evit}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

- Menghitung nilai NDA dengan formulasi:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit}/A_{it-1} -$$

$$\Delta R_{ecit}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

Nilai parameter α_1 , α_2 , dan α_3 adalah hasil dari perhitungan pada poin b.

- Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual nondiskresioner, dengan formulasi:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total Akrual Perusahaan i periode t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i periode t

NDA_{it} = Akrual nondiskresioner perusahaan i periode t

DA_{it} = Akrual diskresioner perusahaan i periode t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i periode t

ΔR_{evit} = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t

ΔR_{ecit} = Perubahan piutang perusahaan i periode t

PPE_{it} = *Property, Plant, and Equipment* perusahaan i periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi

ε_{it} = *Error term* perusahaan i pada periode t

3. *Kaznik Model* (1999)

Kaznik Model mempertimbangkan dimasukkannya *operating cash flow* (OCF) sebagai variabel penjelas yang tidak dipertimbangkan dalam *Modified Jones Model*. Kaznik berpendapat bahwa NDA merupakan fungsi dari perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan adanya perubahan piutang, PPE, dan OCF.

4. *Performance-Matched Discretionary Accruals Model* (2005).

Model ini memiliki ide dasar bahwa akrual yang terdapat dalam perusahaan yang sedang memiliki kinerja yang "tidak biasa" (*unusual performance*) secara sistematis diharapkan bukan nol sehingga kinerja perusahaan pastinya berhubungan dengan akrual. Sehingga perusahaan yang memiliki kinerja yang tidak biasa seperti perusahaan sedang mengalami pertumbuhan, memiliki hubungan positif dengan akrual, maka kinerja perusahaan yang sedang baik bisa jadi akrual yang dimiliki perusahaan cukup tinggi.

Koperasi di Indonesia

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2012b) dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar.

Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oleh karenanya koperasi harus ditingkatkan daya saingnya agar tetap mampu berperan dalam membangun bangsa. Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2012b). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi, (2) Memajukan kesejahteraan masyarakat

dan (3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian, perangkat organisasi koperasi:

1. Rapat Anggota. Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. Rapat anggota mempunyai kewenangan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran dasar, sebagai acuan pengelolaan koperasi.
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawasan.
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
 - f. Pembagian sisa hasil usaha.
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
2. Pengurus Koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat Anggota. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang disertai mandat mengelola koperasi, sehingga mempunyai tugas mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja operasi, menyelenggarakan rapat dengan anggota secara berkala, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Untuk menjalankan tugas-tugas koperasi, seorang pengurus memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Mewakili badan usaha koperasi di dalam dan di luar pengadilan, b.

Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas Koperasi. Pengawas koperasi adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota, oleh karena itu pengawas dalam menjalankan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada rapat anggota, sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar. Tugasnya adalah: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU adalah selisih dari total pendapatan dengan total beban dalam satu tahun buku. Menurut UU No. 25/1992, SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Pembagian SHU dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan.

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Usaha kecil, menengah, dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif untuk memperoleh informasi bagaimana praktik *creative accounting* pada koperasi di Jawa Timur. Untuk memperoleh informasi tersebut, penerapan praktik *creative accounting* dihitung menggunakan rumusan *discretionary accrual* sebagai proksi dari praktik *creative accounting* dengan *modified Jones model*.

Definisi Operasional Variabel

Praktik *creative accounting* adalah suatu proses pelaporan keuangan yang di dalamnya terdapat campur tangan manajer yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Proksi praktik *creative accounting* adalah *discretionary accruals*, dihitung dengan *modified Jones model* (Dechow *et al.*, 1995).

Penggunaan *discretionary accruals* (DA) sebagai proksi DA mengacu pada penelitian Dechow *et al.* (1995) yang menemukan bahwa model *modified Jones* merupakan model yang paling kuat dalam mendeteksi praktik *creative accounting* pada perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik *creative accounting* mempunyai nilai *discretionary*

accruals tidak sama dengan nol. Demikian juga koperasi berlaku sama dengan perusahaan pada umumnya. Penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dalam model *modified Jones* dapat dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

- b. Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 , dan α_3 menggunakan model Jones (1991) dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Selanjutnya digunakan model *modified Jones* untuk memisahkan *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. Model ini merumuskan tingkat *non discretionary accrual* sebagai suatu fungsi perbedaan antara perubahan pendapatan dan perubahan piutang, dan tingkat dari tanah, bangunan serta peralatan (*plant, property, and equipment*). Kemudian untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan aset tahun sebelumnya (A_{it-1}) sehingga formulasi-nya berubah menjadi:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

- c. Menghitung nilai NDA dengan formulasi:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1} - \Delta R_{ecit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

Nilai parameter α_1 , α_2 , dan α_3 adalah hasil dari perhitungan pada poin b.

- d. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual nondiskresioner, dengan formulasi:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total Akrual Perusahaan i periode t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i periode t

NDA_{it}	= Akrual nondiskresioner perusahaan i periode t
DA_{it}	= Akrual diskresioner perusahaan i periode t
A_{it-1}	= Total aset perusahaan i periode t
ΔR_{evit}	= Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t
ΔR_{ecit}	= Perubahan piutang perusahaan i periode t
PPE_{it}	= <i>Property, Plant, and Equipment</i> perusahaan i pada periode t
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi
ε_{it}	= <i>Error term</i> perusahaan i pada periode t

Indikasi bahwa perusahaan tidak melakukan praktik *creative accounting* adalah jika total akrualnya sama dengan nilai *non discretionary accrual* atau jika $DA_{it} = 0$, sebaliknya perusahaan yang melakukan praktik *creative accounting* mempunyai nilai *discretionary accrual* tidak sama dengan nol. DA_{it} yang bernilai positif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income increasing*, sedangkan DA_{it} yang bernilai negatif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam skala provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur sampai 2014, koperasi skala provinsi Jawa Timur yang aktif tahun 2014 sebanyak 508 koperasi. Metode pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*, yang memenuhi kriteria sampel adalah 31 Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam skala provinsi Jawa Timur. Koperasi yang diperlukan dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Koperasi Serba Usaha skala provinsi Jawa Timur.
2. Koperasi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember setiap tahun 2012-2014 secara berturut-turut.
3. Laporan keuangan yang disajikan meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia.

Jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data

Jenis Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif dari laporan keuangan koperasi. Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada yaitu laporan keuangan 31 Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam skala provinsi Jawa Timur periode pengamatan tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Laporan keuangan koperasi lengkap yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Koperasi mempunyai karakteristik utama yaitu peran anggota koperasi. Anggota koperasi memiliki peran ganda yaitu anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi pada umumnya dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Rapat anggota sebagai wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan (RAT) salah satunya adalah pelaporan keuangan dan pada setiap akhir periode pengelola harus dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola koperasi terhadap para anggotanya, disamping itu laporan keuangan juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan usaha selama satu periode. Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas atau Perubahan Modal, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan juga berpedoman pada Permenkop dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2012a).

Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi harus diputuskan oleh Rapat Anggota. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat (2): “Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota” (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2012b).

Proksi dari praktik *creative accounting* adalah *discretionary accruals* (DA), dengan model *modified Jones* (1995). Hasil perhitungan (Tabel 1) menunjukkan bahwa nilai *discretionary accruals* tahun 2013 dan 2014 tidak terdapat nilai DA sama dengan nol. Hal ini berarti tidak ada koperasi yang diobservasi (31 koperasi), yang tidak melakukan praktek *creative accounting*. Hasil analisis terlihat bahwa DA bernilai positif atau negatif. Hal tersebut berarti seluruh koperasi melakukan praktik *creative accounting*. DA positif, berarti koperasi tersebut melakukan praktik *creative accounting* dengan

Tabel 1
Daftar *discretionary accruals* tahun 2013 dan 2014
(tahun dasar 2012)

No	Koperasi	2013		2014	
		NDA	DA	NDA	DA
1	SBW	0.074218582	-0.081	0.066184306	-0.038
2	SBA	0.036123754	0.066	0.032735364	-0.079
3	MSR	0.030880335	0.005	0.054254347	-0.079
4	APK	0.1251282	-0.059	0.121307361	-0.135
5	RMI	0.003762328	-0.006	0.006317154	-0.050
6	GSI	0.156956063	-0.050	0.214564191	-0.215
7	ADI	0.072830521	-0.026	0.103336809	-0.070
8	BMK	0.12436873	-0.119	0.206083626	-0.121
9	BAS	0.106340364	-0.050	-1.161757127	1.139
10	SAM	0.015498131	0.059	-0.138595337	0.165
11	BUS	0.064908074	-0.120	-0.415622318	0.395
12	KPT	0.178732851	-0.001	-0.47341687	0.458
13	DSP	0.033771458	-0.039	-0.688969372	0.701
14	MIT	0.068250687	-0.068	-0.305986408	0.227
15	STM	0.241394528	0.068	-2.10110669	-0.846
16	KDA	0.323669613	-0.048	-1.030501546	0.962
17	ARM	0.033198067	0.030	-0.237228191	0.161
18	KPD	0.052533609	0.111	-0.513730087	0.603
19	GKR	0.081832663	0.038	-0.321677104	0.367
20	PKJ	0.074898934	-0.070	-1.576095923	1.556
21	MLU	0.047660782	-0.067	-0.405981793	0.420
22	KLS	0.105630398	0.022	-0.596409966	0.792
23	BKA	-0.090453415	0.131	0.186491067	-0.163
24	SSR	0.076915963	-0.057	0.14713091	-0.125
25	KRI	-0.108799516	-0.019	0.041339988	-0.158
26	KOP	-0.042068292	0.034	0.014227535	-0.015
27	NSS	0.046972573	0.184	0.244036456	0.020
28	THT	0.003094503	-0.036	0.075157303	-0.096
29	MTS	0.183838381	-0.210	0.159832679	-0.180
30	KUJ	0.509005987	0.104	0.121758328	0.162
31	AJS	-0.003740117	-0.018	0.146037964	-0.151

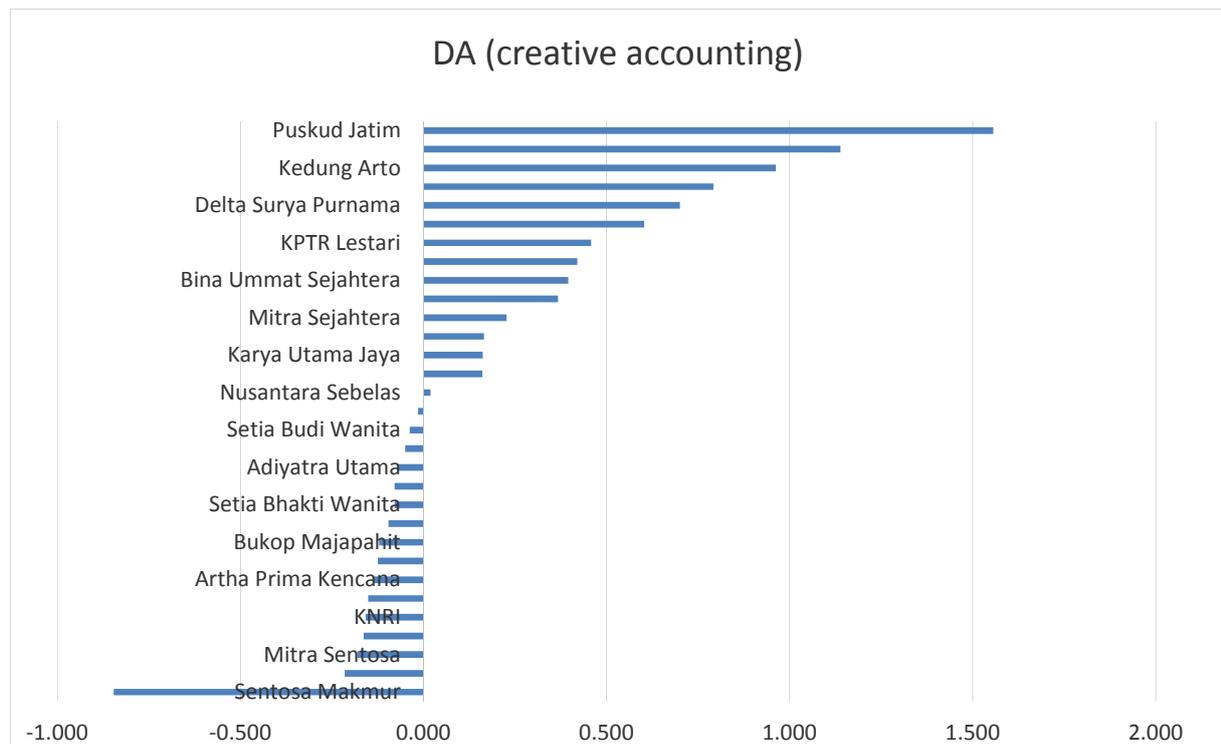
menaikkan laba, namun yang membedakan adalah pada kebijakan yang dilakukan yaitu cenderung menaikkan laba ataukah menurunkan laba. Pada gambar 1 di bawah ini terlihat bahwa beberapa koperasi menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan melihat nilai DA yang tidak jauh dari nilai 0, yaitu $-0,10 < DA < 0,10$, yaitu 8 koperasi (koperasi

THT, SBA, MSR, APK, RMI, SBW, KOP dan NSS).

Nilai maksimum positif *discretionary accruals* tahun 2013 adalah 1,1839 atau bernilai positif, yang berarti bahwa koperasi yang menaikkan laba paling tinggi adalah Koperasi "NSS". Nilai maksimum *discretionary accruals* tahun 2014 adalah 1,5560 atau

bernilai positif, yang berarti bahwa koperasi yang menaikkan laba paling tinggi adalah Koperasi “SBM”. Nilai minimal positif *discretionary accruals* tahun 2013 adalah 0.0051 atau bernilai positif, yang berarti bahwa koperasi yang menaikkan laba paling

rendah adalah Koperasi “MSR”. Nilai minimal *discretionary accruals* tahun 2014 adalah 0,0195 atau bernilai positif, yang berarti bahwa koperasi yang menaikkan laba paling rendah adalah Koperasi “NNS”.



Gambar 1
Discretionary Accruals (DA) Koperasi

Sumber: Hasil Olah Data

Nilai maksimum negatif *discretionary accruals* tahun 2013 adalah -0,2161, dan koperasi yang menurunkan laba paling tinggi adalah Koperasi “MTS”. Nilai maksimum negatif *discretionary accruals* tahun 2014 adalah -0,8462 dan koperasi yang menurunkan laba paling tinggi adalah Koperasi “SSR”. Nilai minimal negatif *discretionary accruals* tahun 2013 adalah -0,0013, koperasi yang menurunkan laba paling rendah adalah koperasi “KPT”. Nilai minimal negatif *discretionary accruals* tahun 2014 adalah -0,0146, koperasi yang menurunkan laba paling rendah adalah Koperasi “KOP”. Berdasarkan tabel 2, terdapat 48 % koperasi cenderung melakukan praktik *creative accounting* dengan menaikkan laba, sedang

52% (7%+3%+19%+23%) koperasi cenderung menurunkan laba.

Tabel 2 menginformasikan tentang kecenderungan praktik *creative accounting* dari tahun 2013 dan tahun 2014. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, dari koperasi yang diobservasi, terdeteksi seluruhnya melakukan praktik *creative accounting*, hal tersebut dibuktikan dari nilai *discretionary accruals* tahun 2013 dan 2014 tidak terdapat nilai DA sama dengan nol, namun yang membedakan adalah pada kebijakan yang dilakukan yaitu cenderung menaikkan laba ataukah menurunkan laba (Tabel 3). Praktik *creative accounting* diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kode 1 jika koperasi cenderung menaikkan laba (tanda pada CA adalah

Tabel 2
Kecenderungan DA dari Tahun 2013 ke Tahun 2014

Keterangan	% .jml koperasi terobservasi	
1. Negatif semakin kecil	7 %	2*
2. Negatif semakin besar	29 %	9
3. Positif semakin kecil	3 %	1*
4. Positif semakin besar	19 %	6
5. Negatif ke positif	23 %	7
6. Positif ke negatif	19 %	6

Sumber : Data yang diolah.

Tabel 3
Casewise List

Case	Selected Status ^a	Observed	Predicted	Predicted Group	Temporary Variable	
		CA_dummy			Resid	ZResid
1	S	0	.350	0	-.350	-.734
2	S	0	.074	0	-.074	-.282
3	S	0	.081	0	-.081	-.298
4	S	0**	.915	0	-.915	-3.274
5	S	0**	.877	0	-.877	-2.675
6	S	0	.183	0	-.183	-.473
7	S	0	.086	0	-.086	-.308
8	S	1	.654	1	.346	.727
9	S	1	.985	1	.015	.121
10	S	1	.781	1	.219	.530
11	S	1	.573	1	.427	.863
12	S	1	.850	1	.150	.421
13	S	1	.720	1	.280	.624
14	S	0	.109	0	-.109	-.349
15	S	1	.703	1	.297	.650
16	S	1**	.340	1	.660	1.393
17	S	1	.973	1	.027	.167
18	S	1	.965	1	.035	.190
19	S	1	.927	1	.073	.280
20	S	1	.689	1	.311	.672
21	S	1	.841	1	.159	.434
22	S	0	.092	0	-.092	-.319
23	S	0	.026	0	-.026	-.163
24	S	0	.434	0	-.434	-.877
25	S	0	.110	0	-.110	-.352
26	S	1	.534	1	.466	.935
27	S	0	.227	0	-.227	-.542
28	S	0	.434	0	-.434	-.877
29	S	1**	.233	1	.767	1.814
30	S	0	.084	0	-.084	-.303
31	S	0	.148	0	-.148	-.417

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases dari neg semakin kecil

positif), dan 0 adalah lainnya, yaitu koperasi cenderung menurunkan laba (tanda pada CA adalah negatif). Koperasi yang masuk kode 1 adalah koperasi yang nilai DA dari tahun 2013 ke tahun 2014 cenderung menaikkan laba sebanyak 15 koperasi. Terdapat 6 koperasi yang DA tahun 2013 ke tahun 2014 semakin besar, sedang terdapat 7 koperasi yang tahun 2013 DA negatif tetapi tahun 2014 justru menjadi DA positif. Terdapat 2 koperasi nilai DA negatif yang semakin kecil dan koperasi tersebut mempunyai kecenderungan kearah memperkecil praktik *creative accounting*. Koperasi yang masuk kode 0 adalah koperasi yang cenderung menurunkan laba yaitu 16 koperasi.

Persentasi koperasi yang melakukan praktik *creative accounting* cenderung “baik” dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 10% (*3 koperasi) yaitu koperasi MTS, koperasi SBW, dan koperasi NSS. Kecenderungan “baik” karena dari tahun 2013 ke tahun 2014 semakin kecil selisih DA dengan nol baik positif maupun negatif, walaupun tidak terdapat nilai DA nol. Koperasi di luar cenderung baik, yaitu koperasi yang semakin besar nilai DA baik positif maupun negatif pada tahun 2013 ke tahun 2014, yaitu 90% (28 koperasi). Koperasi yang DA tahun 2013 adalah DA negatif dan DA tahun 2014 adalah positif adalah sebesar 23% (7 koperasi). Koperasi yang DA tahun 2013 adalah DA positif dan DA tahun 2014 adalah negatif adalah sebesar 19% (6 koperasi). Hal tersebut membuktikan adanya pengurus atau manajer koperasi menerapkan pola *income smoothing* dalam praktik *creative accounting*. Scott (2011) mengungkapkan terdapat jenis pola yang dapat dilakukan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba, yaitu: (1) Pola *taking a bath*. (2) Pola *income minimization*, (3) Pola *income maximization*, dan (4) Pola *income smoothing*. Praktik *creative accounting* pada koperasi cenderung menerapkan pola *income smoothing*. Pola *income smoothing* adalah bentuk praktik *creative accounting* manajemen laba dimana manajer cenderung menaikkan laba jika terjadi kondisi se-

ungguhnya mengalami penurunan laba yang cukup besar, dan manajer akan cenderung menurunkan laba jika terjadi kondisi sesungguhnya mengalami kenaikan laba yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga koperasi terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Menurut Schipper (1989), *creative accounting* sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan tujuan mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi. Scott (2011) juga mengartikan *creative accounting* sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi seperti penggunaan *accrual* dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pengelola perusahaan. Informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan telah dimodifikasi untuk kepentingan pribadi sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan hal tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986) adalah teori mengenai kebijakan akuntansi dan praktik di dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan yang akan dipilih oleh manajer dan menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian (Gowthorpe, 2004).

Koperasi dalam hal ini melakukan praktik *creative accounting* dalam menampilkan laba yang lebih kecil atau laba yang lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Hal

tersebut merupakan perilaku oportunistik dari pengurus koperasi dalam mengelola kontrak pengurus dengan anggota koperasi. Pengurus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan koperasi di bidang organisasi maupun usaha.

Scott (2011) menyebutkan dua cara pemahaman atas *creative accounting* yaitu *creative accounting* dipandang sebagai perilaku oportunistik manajer dalam memaksimalkan kontrak kompensasi, kontrak hutang dan biaya politik dan *creative accounting* dipandang dari perspektif *efficient contracting (efficient earning management)* yang memberi fleksibilitas untuk melindungi manajer dan perusahaan dari kejadian yang tidak terduga sebagai antisipasi risiko.

Menurut Watts dan Zimmerman, (1986), terdapat beberapa dugaan seorang manajer berperilaku oportunistik sehingga praktik *creative accounting* dilakukan yaitu: (1) *Bonus Plan Hypothesis* (hubungan antara pemilik dengan manajemen). Dalam kasus ini, kinerja serta insentif yang akan diterima oleh manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan sehingga manajer akan cenderung berperilaku oportunis dengan memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan demikian, kinerjanya akan tampak baik sehingga manajer dapat memaksimalkan insentif yang diterimanya; (2) *Debt Hypothesis* (hubungan antara kreditor dengan manajemen). Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah melalui pinjaman atau kontrak hutang. Perusahaan cenderung melakukan *income increasing* untuk menjaga agar tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap persyaratan kredit (*debt covenant*), maka semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba; (3). *Political Cost Hypothesis* (hubungan antara pemerintah dengan manajemen). Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung melakukan *income decreasing* untuk

mengurangi visibilitas mereka. Perolehan laba yang tinggi dapat menyebabkan biaya politik yang tinggi pula, seperti misalnya membayar pajak semakin tinggi. Praktik *creative accounting* akan menjadi alat yang dikendalikan oleh penyusun laporan keuangan untuk kepentingan pencapaian tujuannya. Perilaku *creative accounting* dari seorang manajer tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada motivasi dibalik perilakunya tersebut, Terdapat tiga alasan utama adanya *creative accounting* dalam penyusunan pelaporan keuangan di koperasi yaitu pemakaian *basic accrual* dalam penyusunan pelaporan keuangan, fleksibilitas pemilihan metode dan dipakainya laba sebagai ukuran kinerja pengurus atas manajer koperasi.

Menurut Healy (1985) serta Watts dan Zimmerman (1986), beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, antara lain untuk motivasi bonus, motivasi utang, motivasi pajak, motivasi penjualan saham, motivasi pergantian direksi, dan motivasi politis. Praktik *creative accounting* pada koperasi cenderung pada alasan motivasi bonus, motivasi utang, motivasi pajak. Koperasi adalah salah jenis dari perusahaan, sehingga perilaku oportunistik juga dilakukan oleh pengurus dan atau manajer koperasi. Pengurus koperasi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh anggota koperasi melalui mekanisme rapat anggota atas usul pengawas koperasi. Pengurus disertai mandat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan koperasi baik dibidang organisasi maupun usaha. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi dan perangkat organisasi koperasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Koperasi melakukan praktik *creative accounting*, dengan pola

income increasing atau *income decreasing*. Koperasi melakukan praktik *creative accounting*, dengan motivasi pajak dan motivasi SHU. Praktik *creative accounting* dalam koperasi, pengurus dapat menentukan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi-kondisi pada koperasi tersebut. Hasil studi ini sesuai dengan teori Healy (1985) dan Watts dan Zimmerman (1986). (2) Pola yang dapat dilakukan pengurus dalam melakukan praktik *creative accounting* yaitu pola *income smoothing*. Pengurus koperasi/manager koperasi menaikkan SHU jika terjadi penurunan SHU yang cukup besar, dan sebaliknya, pengurus koperasi menurunkan SHU jika terjadi kenaikan SHU yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi SHU yang dilaporkan sehingga koperasi terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. Hasil studi ini sesuai pendapat Scott (2011) yang menyebutkan pengurus selaku manajemen koperasi dipandang sebagai perilaku oportunistik manager dalam memaksimalkan kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan biaya politik. Praktik *creative accounting* dipandang dari perspektif *efficient contracting* yang memberi fleksibilitas untuk melindungi manager dan koperasi dari kejadian yang tidak terduga sebagai antisipasi risiko.

Saran

Adapun saran dari studi ini adalah: (1) Koperasi sebaiknya dalam memilih pengurus berdasarkan kompetensi SDM. Hal tersebut karena koperasi harus dikelola secara profesional, agar koperasi memiliki daya saing. Koperasi sebagai lembaga yang berbasis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi, harus mampu menciptakan peluang bagi masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. (2) Pada tim badan pengawas, minimal terdapat seorang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan atau akuntansi. (3) Koperasi dalam melakukan peningkatan daya saing, diperlukan penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas bisnis modern yaitu melalui peningkatan tata kelola dalam bisnis koperasi

dan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal tersebut harus didukung adanya praktik profesionalisasi manajemen koperasi. (4) Bagi penelitian selanjutnya untuk menambah periode penelitian dan menggunakan sampel yang diperluas. (5) Menggunakan proksi yang lain untuk praktik *creative accounting* agar konfirmasi teori diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amat, Oriol, dan C. Gowthorpe. 2004. Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical Issues. *Journal of Economic Literature Classification*: 1-19.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review* 70(2): 193-225.
- Gowthorpe, Catherine, dan O. Amat. 2004. Creative accounting: some ethical issues of macroand micromanipulation. *Journal of Economic Literature Classification*: 1-22.
- Healy, P. M. 1985. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 7: 85-107.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kothari, S. P., A. J. Leone, dan C. E. Wasley. 2005. Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting and Economics* 39: 163-19.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- , 2012a. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04/Per/M.*

- KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.
- ., 2012b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Schipper, K. 1989. *Comentary Katherine on Earnings Management*. *Accounting Horizon*.
- Scott, R. W. 2011. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Toronto: Prentice-Hall.
- Sulistiawan, D. 2006. Persepsi Komunitas Akuntansi Terhadap Praktek Creative Accounting. *Jurnal Akuntansi & Teknologi* 5(2): 115-128.
- Watts, R. L. dan J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN DEBT MATURITY TERHADAP PREDIKSI BOND RATING

Marfuah

marfuah@uii.ac.id

Hermin Endaryati

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

The objective of this study is examine the effect of good corporate governance and debt maturity towards bond rating prediction. Good corporate governance is proxied by institutional ownership, managerial ownership, board size, independent directors, audit committee, and audit quality. The sample in this study consist of 229 bonds issued by financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2013 and was ranked by PT PEFINDO. This study uses ordinal regression analysis model to test the effect of good corporate governance and debt maturity towards bond rating prediction. The results of this study showed that institutional ownership and audit committee have significant positive effect towards bond rating prediction while independent commissioner have significant negative effect towards bond rating prediction. Managerial ownership, board size, audit quality and maturity haven't significantly affect toward bond ratings. The findings of this study indicated that companies with the bigger institutional ownership and the bigger audit committees, then predicted the company has bonds with higher ratings. The findings that the independent commissioner has significant negative effect toward bond rating prediction indicate that the presence of independent commissioner haven't been able to role effectively so expected the quality of independent commissioner should be improved.

Key words: audit quality, bond rating, good corporate governance, debt maturity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *maturity* terhadap prediksi peringkat obligasi. *Good corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 229 obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013 dan diperingkat oleh PT PEFINDO. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi ordinal untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan *maturity* terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan *debt maturity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat obligasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional dan komite audit yang semakin besar, maka diprediksi perusahaan tersebut mempunyai obligasi dengan peringkat yang semakin tinggi. Adanya temuan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu berperan secara efektif sehingga diharapkan kualitas komisaris independen perlu ditingkatkan.

Kata kunci: kualitas audit, peringkat obligasi, *good corporate governance*, umur obligasi

PENDAHULUAN

Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan yang dapat

diperoleh dari pasar modal. Bagi emiten, obligasi merupakan sekuritas yang aman karena biaya emisinya lebih murah dari

pada saham. Investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang diminati oleh pemodal karena memiliki pendapatan yang bersifat tetap. Investasi pada obligasi relatif lebih aman dibanding dengan investasi saham, karena pemegang obligasi memiliki hak pertama atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah memiliki kontrak perjanjian untuk melunasi obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi.

Meskipun demikian obligasi tetap memiliki risiko. Salah satu risiko tersebut adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi kepada investor. Pada tahun 2009 fenomena obligasi gagal bayar (default risk) banyak terjadi pada perusahaan yang cukup populer bagi masyarakat. PT. Mobile-8 Telecom Tbk telah gagal bayar 2 kali untuk kupon 15 maret 2009 dan 15 juni 2009 dengan obligasi senilai Rp 675 miliar yang jatuh tempo maret 2012. PT Davomas Abadi Tbk dengan obligasi senilai 235 juta dolar yang jatuh tempo 2011 telah gagal bayar sebesar 13,09 juta dolar untuk kupon 5 Mei 2009 (Kompasiana, 9 Februari 2010).

Investor memerlukan informasi yang cukup tentang obligasi agar bisa menganalisis dan memperkirakan risiko yang ada dalam investasi obligasi. Salah satu sinyal yang dapat digunakan untuk mengetahui risiko default obligasi adalah peringkat obligasi (Raharja dan Sari, 2008). Peringkat obligasi sangat penting bagi investor karena mampu memberikan pernyataan informatif dan sinyal tentang kemungkinan kegagalan utang suatu perusahaan (Altman, 1989). Selain itu, investor dapat menghemat biaya dan waktu dengan mengetahui peringkat obligasi suatu perusahaan karena dapat melakukan analisis sendiri dan mendapat informasi secara langsung. Obligasi memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendanaan, akan tetapi investor harus memperhatikan peringkat obligasinya. Dengan adanya peringkat obligasi investor akan mengetahui apakah perusaha-

an penerbit obligasi tersebut memiliki kinerja yang bagus atau buruk. Susilowati dan Sumarto (2010) berpendapat bahwa pemilik modal yang berminat membeli obligasi seharusnya memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat obligasi akan memberikan informasi dan sinyal mengenai probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menyelesaikan kewajibannya di masa datang, oleh karena itu perusahaan penerbit obligasi dapat menggunakan jasa agen pemeringkat sebagai pemberi sertifikasi yang independen.

Peringkat obligasi juga bermanfaat untuk menganalisis dan memeringkat kekuatan finansial dari penerbit sekuritas, termasuk asuransi, dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kontrak obligasi dengan konsumen, kreditur, atau pihak yang lain. Kliger dan Sarig (2000) menyatakan bahwa bond rating mengandung informasi yang relevan tentang harga yang tidak dapat diperoleh investor dari sumber yang lain. Bond rating dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan baik bagi shareholders maupun bagi bondholders. Widyastuti *et al.* (2014) menyatakan bahwa peringkat obligasi selain bermanfaat bagi investor juga memiliki kegunaan bagi perusahaan penerbit obligasi, diantaranya adalah untuk menunjukkan penilaian mereka atas keamanan dari obligasi yang diberikan, peringkat kredit tersebut sebagai suatu verifikasi independen terhadap kelayakan kredit/utang perusahaan penerbit obligasi.

Fenomena peringkat obligasi dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada salah satu emiten di Indonesia. Pada Maret 2009 BEI melakukan suspense saham FREEN maupun obligasinya. PEFINDO memangkas peringkat obligasi FREEN senilai Rp 675 milyar seiring perusahaan tersebut tidak membayar bunga obligasinya sebesar Rp 20,88 milyar. Dengan adanya gagal bayar tersebut, PT Pemeringkat Efek Indonesia menurunkan peringkat obligasi perusahaan tersebut menjadi "D" dari "CCC" (Ikhsan,

2012). Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga pemeringkat obligasi, yaitu PT PEFINDO dan PT Kasnic Credit Rating. Penelitian ini mengacu pada PEFINDO karena lebih banyak perusahaan listing di BEI yang menggunakan jasa pemeringkatan PEFINDO. Aspek penilaian obligasi yang dilakukan PEFINDO berdasarkan pada 3 aspek, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai aspek mana yang lebih diutamakan dalam pemeringkatan, salah satunya adalah aspek keuangan. Menurut Jelita (2014), praktek Good Corporate Governance (GCG) juga dapat menjelaskan perbedaan peringkat obligasi perusahaan yang tidak tertangkap dari kondisi keuangan perusahaan. GCG juga dapat mengurangi risiko gagal bayar dengan cara mengurangi biaya agensi yaitu dengan memonitor kinerja manajemen dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan kreditur. Implementasi dalam penerapan Good Corporate Governance dapat memberi keyakinan dalam pengembalian return atas investasi, khususnya bagi investor dan kreditor.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Setiyaningrum (2005) menemukan bahwa penerapan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian Setiyaningrum (2005) didukung oleh Prasetyo (2010) yang mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah komite audit, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi. Sari dan Murtini (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi, sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Rasyid dan Kostaman (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian Sunarjanto dan Tulasi (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak mampu memprediksi obligasi perusahaan yang tergolong dalam kategori *investment grade* dan *non investmen grade*.

Selain corporate governance banyak faktor lain yang mempengaruhi peringkat obligasi. Penelitian Magreta dan Nurmayanti (2009) menguji faktor akuntansi dan non akuntansi menggunakan indikator *size*, *likuiditas*, *profitabilitas*, *leverage*, *produktivitas*, *secure*, *debt maturity* dan reputasi auditor menemukan bahwa produktivitas dan *secure* dapat digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi. Sudaryanti *et al.* (2011) menemukan bahwa faktor *size*, *profitabilitas* dan *debt maturity* berpengaruh terhadap peringkat obligasi di atas 5 tahun, sedangkan faktor *growth*, *likuiditas* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi di Indonesia telah banyak dilakukan akan tetapi masih memberikan hasil yang belum konsisten, demikian juga variabel prediktor yang digunakan berbeda-beda. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap peringkat obligasi. Pada penelitian ini Corporate Governance diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Magreta dan Nurmayanti (2009) dalam menggolongkan peringkat obligasi. Penelitian ini menggolongkan peringkat obligasi ke dalam kategori *investment grade* dan *speculative grade*, sedangkan pada penelitian Magreta dan Nurmayanti

(2009) menggolongkan peringkat obligasi ke dalam kategori *high investment* dan *low investment*.

Oleh karena itu penelitian tentang prediksi peringkat obligasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masih merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan umur obligasi (*debt maturity*) terhadap prediksi peringkat obligasi. Variabel *good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

TINJAUAN TEORETIS

Good Corporate Governance dan Agency Theory

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang didasarkan pada prinsip teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dengan adanya tata kelola perusahaan akan meningkatkan keyakinan pihak *principal* bahwa *agent* tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya dan berhati-hati dalam memilih investasi. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* akan mampu disejajarkan dengan adanya tata kelola perusahaan sehingga dapat menurunkan biaya keagenan.

Peringkat Obligasi dan Signalling Theory

Signalling Theory menurut Spence (1973) menunjukkan adanya asimetri yang terjadi antara pihak yang berkepentingan dalam

perusahaan mengenai informasi perusahaan karena ada salah satu pihak yang dianggap memiliki informasi yang lebih baik dari pihak lainnya. Manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lain. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal yang diberikan dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Contohnya informasi terkait peringkat obligasi.

Manajemen perusahaan sebagai pihak pemberi sinyal, memberikan laporan keuangan perusahaan dan informasi non keuangan kepada lembaga pemeringkat yang dipilih. Lembaga pemeringkat obligasi kemudian melakukan proses pemeringkatan sesuai dengan prosedur sehingga dapat menerbitkan peringkat obligasi dan mempublikasikannya. Peringkat obligasi ini memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan pembayaran utang sebuah perusahaan (Estiyanti dan Yasa, 2012).

Peringkat obligasi merupakan salah satu jenis informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan di pasar modal. Peringkat obligasi yang dipublikasikan hendaknya relevan dengan kondisi perusahaan sehingga membuat investor merasa aman dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan surat berharga yang dikeluarkan (Jelita, 2014)

Kepemilikan Institusional dan Prediksi Peringkat Obligasi

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan

sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba.

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan yang dapat mengontrol dari pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif dan tepat sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba (Utami, 2012). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengontrol tindakan manajemen laba. Selain itu, investor institusional dapat memprediksi laba masa depan lebih mudah dengan adanya informasi-informasi yang tersedia. Rinaningsih (2008) menegaskan bahwa kepemilikan institusional sama seperti pada *blockholders* yaitu concern dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mencegah hazard dari manajemen atau segera melakukan tindakan perbaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan peringkat surat utangnya tinggi.

Penelitian Bhojraj dan Sengupta (2003) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap peringkat dan *yield* obligasi menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusi dan proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan peringkat obligasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi.

Kepemilikan Manajerial dan Prediksi Peringkat Obligasi

Menurut teori agensi, konflik keagenan terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai seorang

pemilik (Jelita, 2014). Manajer diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik serta mengutamakan kepentingan pemegang saham setelah memiliki porsi saham tertentu di dalam perusahaan karena risiko keuangannya sama dengan stakeholder.

Dengan maksimalnya kinerja perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban akan semakin baik, termasuk obligasi, sehingga obligasi dapat dilunasi tepat waktu dan semakin terhindar dari risiko gagal bayar obligasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi.

Ukuran Dewan Komisaris dan Prediksi Peringkat Obligasi

FCGI (Forum Corporate Governance Indonesia) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang bertugas menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independensi dari dewan komisaris eksternal. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Jika dewan komisaris menjalankan tugasnya dengan baik dan kualitas laporan yang dihasilkan juga semakin bagus, maka risiko perusahaan akan makin kecil. Dengan demikian peringkat obligasi perusahaan tersebut juga akan semakin baik.

Penelitian Fitriyah dan Damayanti (2012) menyimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi

Komisaris Independen dan Prediksi Peringkat Obligasi

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawaty, 2007). Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen. Komisaris independen juga diharapkan untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholder lainnya (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006). Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Adanya keobyektifan, independensi, dan keseimbangan yang diciptakan oleh komisaris independen tersebut tentunya akan berdampak positif pada peringkat obligasi perusahaan tersebut.

Bhojraj dan Sengupta (2003) menemukan bahwa persentase kepemilikan institusi dan proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan peringkat obligasi. Demikian juga Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi.

Komite Audit dan Prediksi Peringkat Obligasi

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas

proses laporan keuangan dan audit ekstern. Tugas komite audit adalah memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, mengoptimalkan fungsi pengawasan, mengawasi audit eksternal dan menjadi sistem pengendalian internal perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran komite audit dapat memberikan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal juga diharapkan dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Setyaningrum (2005) yang meneliti pengaruh praktek GCG terhadap peringkat surat utang menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Temuan Setyaningrum (2005) tersebut diperkuat dengan penelitian Prasetyo (2010) yang menyimpulkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi

Kualitas Audit dan Prediksi Peringkat Obligasi

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan (Praditia, 2010).

Berdasarkan pada teori sinyal yang telah dipaparkan di atas, pihak manajemen perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan yang diaudit

oleh jasa audit big four, karena jika kinerja laporan keuangan perusahaan diaudit oleh big four maka tingkat kebenaran dan ketelitian dari laporan keuangan akan semakin akurat dan terpercaya yang nantinya akan mempengaruhi peringkat obligasi. Andry (2005) mengatakan bahwa semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nelly dan Lukman (2013) yang menyimpulkan bahwa variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi namun berseberangan dengan hasil penelitian Sejati (2010); Magreta dan Nurmawati (2009) yang menemukan bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Pefindo. Penelitian Prasetyo (2010) menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas audit yang diproksi dengan besaran KAP dengan peringkat obligasi adalah positif signifikan. Obligasi yang diterbitkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan peringkat berkategori investment grade daripada yang diaudit oleh non Big 4. Hal ini menunjukkan bahwa KAP Big 4 mampu menghasilkan opini yang bersifat independen dan berkualitas. Semakin baik kualitas laporan keuangan maka akan semakin baik pula peringkat obligasi. Demikian juga Sejati (2010) menyatakan bahwa di Indonesia, emiten yang diaudit oleh KAP Big 4 akan mempunyai obligasi yang termasuk dalam investment grade karena semakin baik reputasi auditor maka akan mempengaruhi peringkat obligasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi

Debt Maturity dan Prediksi Peringkat Obligasi

Jatuh tempo (*maturity*) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai 1-5 tahun bahkan lebih dari 5 tahun. Berdasarkan teori sinyal yang dikemukakan di atas pihak manajemen perusahaan memberikan informasi kepada investor dengan menunjukkan umur obligasi dari perusahaan tersebut. Umur obligasi yang pendek dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk melunasi pokok obligasi dikatakan baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki umur obligasi yang panjang.

Andry (2005) menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi. Obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo yang lebih panjang. Diamonds (1991) dalam Adrian (2011) berpendapat bahwa terdapat hubungan non-monotonik antara struktur umur obligasi dan kualitas kredit untuk perusahaan yang tercantum dalam peringkat obligasi. Investor cenderung tidak menyukai obligasi dengan umur yang lebih panjang karena risiko yang akan didapat juga akan semakin besar, sehingga umur obligasi yang pendek ternyata menunjukkan peringkat obligasi investment grade.

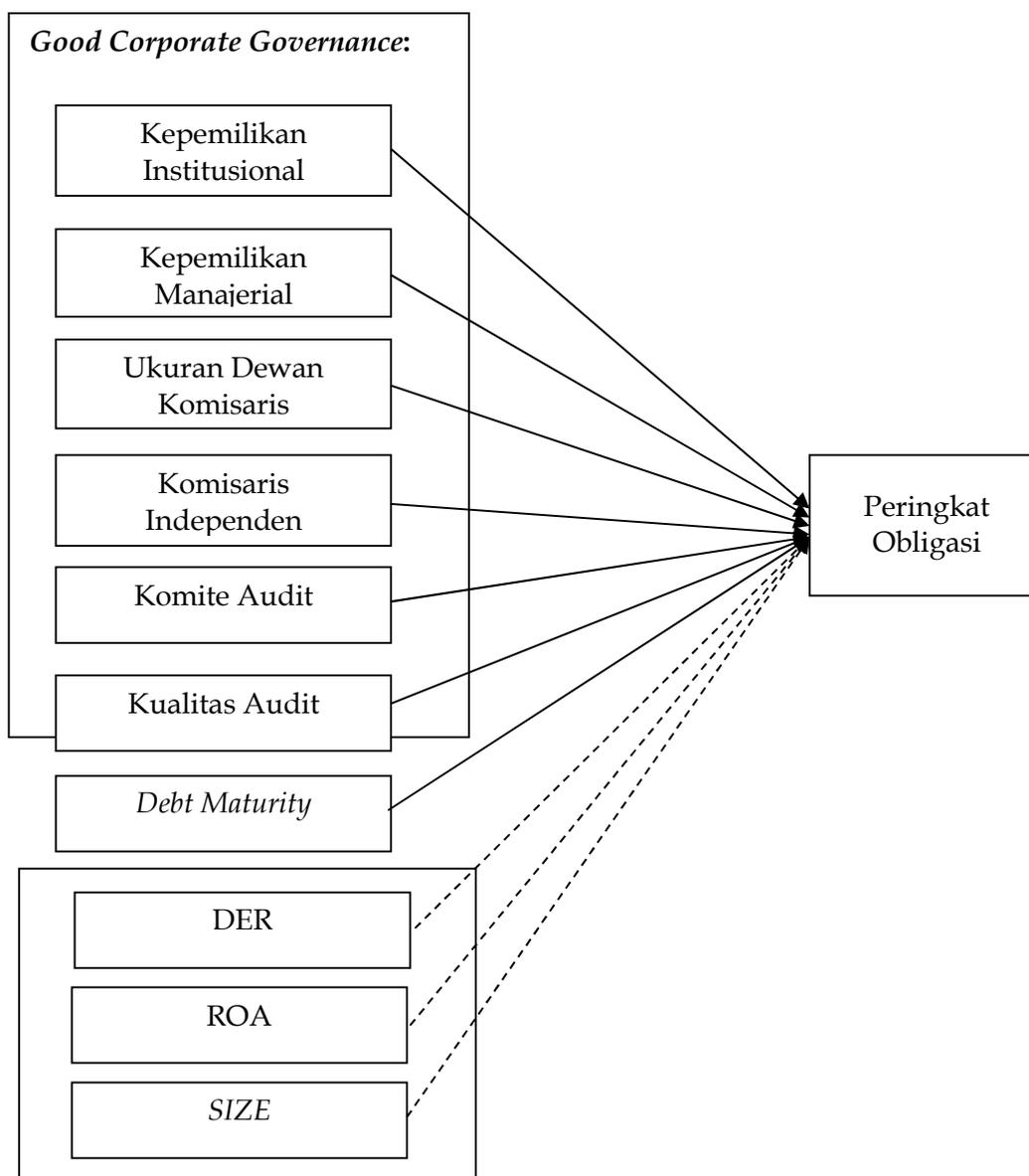
Menurut Andry (2005), obligasi dengan umur yang lebih pendek mempunyai risiko yang lebih kecil, sehingga perusahaan yang rating obligasinya tinggi mempunyai umur obligasi yang lebih pendek daripada perusahaan yang mempunyai umur obligasi lebih lama. Dengan demikian, umur obligasi yang semakin pendek akan memberikan peringkat obligasi yang semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H₇ : Debt maturity berpengaruh negative terhadap prediksi peringkat obligasi

Model Penelitian

Model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance dan maturity, sedangkan variable dependennya adalah peringkat obligasi. Corporate governance

diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Selain itu model ini juga memasukkan variabel karakteristik perusahaan yang terdiri dari Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE).



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obligasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta tercatat dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Pefindo periode 2011-2013. Sampel penelitian dipilih dengan meng-

gunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Obligasi yang beredar di Bursa Efek Indonesia pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, (2) Obligasi yang mendapat peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pefindo dalam kurun waktu pengamatan, (3) Obligasi yang memiliki data laporan keuangan yang dimuat di www.idx.co.id, (4) Laporan keuangan perusahaan penerbit obligasi tidak menggunakan mata uang asing, (5). Obligasi dengan kategori *investment grade* (6). Laporan keuangan perusahaan penerbit obligasi memiliki semua data yang dibutuhkan untuk penghitungan semua variabel dalam penelitian.

Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh sampel untuk tahun 2011 sebanyak 49, tahun 2012 sebanyak 85 dan tahun 2013 sebanyak 97 sehingga total sam-

pel penelitian selama 3 (tiga) tahun pengamatan sebanyak 229 obligasi. Total sampel sebanyak 229 obligasi tersebut diperoleh dengan tahapan sebagai berikut: (1) jumlah obligasi yang beredar di BEI selama 3 (tiga) tahun pengamatan sebanyak 992, (2) dikurangi dengan obligasi yang tidak diperingkat oleh Pefindo sebanyak 279, (3) dikurangi obligasi yang tidak memiliki laporan keuangan yang dimuat di www.idx.co.id sebanyak 360, (4) dikurangi perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dengan mata uang asing sebanyak 9, (5) dikurangi obligasi dengan *speculative grade* sebanyak 3 obligasi, (6) dikurangi perusahaan yang tidak ada data kepemilikan manajerial sebanyak 109 dan yang tidak ada data komite audit sebanyak 3 obligasi. Proses pemilihan sampel penelitian disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	2011	2012	2013	Total
1	Jumlah obligasi yang beredar di BEI	329	315	348	992
2	Obligasi yang tidak diperingkat oleh Pefindo	(158)	(62)	(59)	(279)
3	Obligasi yang tidak memiliki laporan keuangan yang dimuat di www.idx.co.id	(94)	(126)	(140)	(360)
4	Laporan keuangan menggunakan mata uang asing	(3)	(3)	(3)	(9)
5	Obligasi dengan kategori <i>speculative grade</i>	(2)	(1)	(0)	(3)
6	a. Tidak ada data kepemilikan manajerial	(22)	(38)	(49)	(109)
	b. Tidak ada data komite audit	(3)	(0)	(0)	(3)
	Total	49	85	97	229

Sumber: Data sekunder diolah 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2010-2012 serta data peringkat obligasi dari PT Pefindo dalam kurun waktu 2011-2013. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh

dari pojok BEI UII, www.idx.co.id dan www.pefindo.com.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pefindo. Peringkat obligasi yang dikeluarkan Pefindo terbagi menjadi dua kategori, yaitu investment grade dan speculative grade.

Peringkat yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah peringkat berkategori *investment grade* yang dibagi ke dalam 3 klasifikasi (Doganay *et al.*, 2012). Adapun klasifikasi peringkat obligasi *investment grade* disajikan pada Tabel 2. Variabel independen dan variabel kontrol serta pengukurannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2
Klasifikasi Peringkat Obligasi

Peringkat Obligasi	Kategori	Nilai
idAAA	<i>Investment Grade</i>	3
idAA+	<i>Investment Grade</i>	3
idAA	<i>Investment Grade</i>	3
idAA-	<i>Investment Grade</i>	3
idA+	<i>Investment Grade</i>	2
idA	<i>Investment Grade</i>	2
idA-	<i>Investment Grade</i>	2
idBBB+	<i>Investment Grade</i>	1
idBBB	<i>Investment Grade</i>	1
idBBB-	<i>Investment Grade</i>	1

Sumber: www.pefindo.com dan Doganay *et al.* (2012).

Tabel 3
Variabel Independen dan Variabel Kontrol Serta Pengukurannya

Keterangan	Nama Variabel	Pengukurannya
Variabel Independen	Corporate Governance	INST: Proporsi saham oleh investor institusi MOWN: Proporsi saham oleh manajerial COMIS: Adalah jumlah anggota dewan komisaris INDCOMIS: Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan. Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan AUDCOM: Adalah jumlah komite audit dalam perusahaan AUDQU: Kualitas Audit diukur dengan variabel dummy. Skor 1, apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang tergabung dalam The Big Four dan skor 0 untuk sebaliknya.
	Debt Maturity (MAT)	Debt Maturity diukur dengan menggunakan dummy variabel, nilai 1 jika umur obligasi ≤ lima tahun, dan 0 jika umur obligasi > lima tahun
Variabel Kontrol	Leverage (DER)	DER diukur sebagai rasio antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan.
	Profitabilitas (ROA)	ROA diukur sebagai rasio antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset perusahaan.
	Ukuran perusahaan (SIZE)	SIZE: Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung Ln total aset.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, hipotesis akan diuji dengan analisis multivariate menggunakan ordinal logistic regression karena kategori variabel dependen berupa ordinal. Model ordinal logistic regression dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Logit RATING}(1-3) = 1 + 1\text{INST} + 2\text{MOWN} + 3\text{COMIS} + 4\text{INDCOMIS} + 5\text{AUDCOM} + 6\text{AUDQU} + 7\text{MAT} + 8\text{DER} + 9\text{ROA} + 10\text{SIZE} +$$

Keterangan:

Logit RATING (1-3) : Variabel peringkat obligasi dengan 3 kategori
 : Konstanta
 : Koefisien variabel
 INST : Kepemilikan institusi-onal

MOWN : Kepemilikan manajerial
 COMIS : Ukuran dewan komisaris
 INDCOMIS : Komisaris Independen
 AUDCOM : Komite Audit
 AUDQU : Kualitas Audit
 MAT : Debt Maturity (Umur obligasi)
 DER : Debt to Equity Ratio
 ROA : Return on Asset
 SIZE : Ukuran perusahaan
 : Error Term

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Analisis Deskriptif**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu disajikan deskripsi data variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi pada Tabel 4.

Tabel 4
Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RATING	229	1,0	3,0	2,638	,6315
INST	229	,231446	,980003	,76634927	,165037082
MOWN	229	,000000	,134704	,00732104	,023577642
COMIS	229	3,0	10,0	6,223	1,8634
INDCOMIS	229	,25000	1,00000	,4600783	,10540831
AUDCOM	229	3,0	7,0	4,445	1,4427
AUDQU	229	,0	1,0	,760	,4281
MAT	229	,0	1,0	,703	,4579
DER	229	,08283	13,16845	4,3245992	3,76314338
ROA	229	-,013059	,509540	,05904653	,067908085
SIZE	229	26,67926	32,91632	30,7734675	1,27864873

Sumber: Data diolah, 2016.

Variabel peringkat obligasi (RATING) dalam penelitian ini adalah peringkat berkategori *investment grade* yang dibagi ke dalam 3 klasifikasi yang diberi klasifikasi penilaian dengan angka 1 sampai dengan 3. *Mean* atau rata-rata dari peringkat obligasi adalah 2,638 dengan standar deviasi yang menunjukkan variasi data sebesar 0,6315. Variabel kepemilikan institusional (INST)

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi dari seluruh total saham yang beredar. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan bahwa nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 0,231446 dan nilai tertingginya (*maximum*) adalah sebesar 0,980003. *Mean* atau rata-rata

dari kepemilikan institusional adalah 0,76634927. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan penerbit obligasi memiliki jumlah kepemilikan institusional >50% yang berarti rata-rata kepemilikan institusional relatif tinggi. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,165037082 yang berarti tingkat variasi data dari kepemilikan institusional sebesar 0,165037082.

Variabel kepemilikan manajerial (MOWN) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, termasuk manajer, direktur dan dewan komisaris dari seluruh total saham yang beredar. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial (KPMJ) menunjukkan bahwa nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 0,00. Nilai 0 ini berarti bahwa ada perusahaan sampel dimana dewan komisaris maupun direksi perusahaan sama sekali tidak memiliki sebagian saham perusahaan. Nilai tertinggi (*maximum*) variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,134704. *Mean* atau rata-rata dari kepemilikan manajerial yang dijadikan sampel adalah 0,00732104. Hal ini memperlihatkan bahwa masih sedikit jumlah perusahaan di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh pihak manajerial. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,023577642 yang berarti bahwa tingkat variasi data dari kepemilikan manajerial sebesar 0,023577642.

Variabel ukuran dewan komisaris (COMIS) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel ukuran dewan komisaris (DKOM) menunjukkan bahwa total anggota dewan komisaris berkisar antara minimum 3 dan maksimum 10 orang. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia memiliki jumlah dewan komisaris yang cukup besar. Terdapat 28 sampel yang memiliki jumlah dewan komisaris 3

orang. Sebanyak 85 sampel memiliki jumlah dewan komisaris antara 4 sampai dengan 6 orang. Sebanyak 116 sampel memiliki jumlah dewan komisaris lebih dari 6 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki ukuran dewan komisaris yang cukup besar, yang secara rata-rata lebih dari 6 orang.

Variabel komisaris independen (INDCOMIS) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel komisaris independen (KI) menunjukkan bahwa nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 0,25000 dan nilai tertingginya (*maximum*) adalah sebesar 1,000. *Mean* atau rata-rata dari komisaris independen yang dijadikan sampel adalah 0,4600783. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,10540831 yang berarti bahwa tingkat variasi data dari variabel komisaris independen sebesar 0,10540831. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Bapepam mengenai *corporate governance* yang mensyaratkan jumlah anggota dewan komisaris independen minimal 30%.

Variabel komite audit (AUDCOM) dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel komite audit (KMA) menunjukkan bahwa total anggota dewan komisaris berkisar antara minimum 3 sampai maksimum 7 orang dengan rata-rata 4,445. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 1,4427 yang berarti bahwa tingkat variasi data dari variabel komite audit sebesar 1,4427.

Variabel kualitas audit (AUDQU) pada penelitian ini diukur dengan menilai apakah laporan keuangan perusahaan penerbit obligasi diaudit oleh auditor *big 4* atau selain *big 4*. Hasil analisis statistik deskriptif

menunjukkan nilai rata-rata 76% atau 174 sampel dari jumlah sampel keseluruhan yang mencapai 229 sampel laporan keuangannya diaudit oleh auditor big 4. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak dari perusahaan penerbit obligasi memilih auditor *big 4* untuk melakukan audit atas laporan keuangannya.

Variabel umur obligasi (*MAT*) yang disimbolkan dengan *MAT* pada penelitian ini diukur dengan menilai umur obligasi apakah kurang dari lima tahun atau lebih dari lima tahun. Hasil analisis statistik deskriptif variabel umur obligasi menunjukkan nilai rata-rata 70,3% atau sebanyak 161 sampel dari jumlah sampel keseluruhan yang mencapai 229 sampel mempunyai obligasi yang umurnya kurang dari 5 tahun.

Variabel *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (*DER*), yakni total hutang dibagi total ekuitas. Hasil analisis statistik deskriptif untuk *leverage* menunjukkan nilai terendah sebesar 0,8283 dan nilai tertingginya sebesar 13,16845. Nilai rata-rata *leverage* adalah 4,3246 dengan standar deviasi sebesar 3,76314. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat variasi data dari *leverage* sebesar 3,76314.

Variabel *Return on Asset* (*ROA*) dalam penelitian ini diukur dengan menghitung *net income* dibagi *total asset*. Hasil analisis statistik deskriptif untuk *ROA* menunjukkan nilai terendah sebesar -0,013059 dan nilai tertingginya sebesar 0,509540. Nilai rata-rata *ROA* dari adalah 0,05904653 dengan standar deviasi sebesar 0,0679081. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data dari *leverage* sebesar 0,0679081.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Hasil analisis statistik deskriptif untuk *SIZE* menunjukkan nilai terendah sebesar 26,67926 dan nilai tertingginya sebesar 32,91632. Nilai rata-rata *SIZE* sebesar 30,773467 dengan standar deviasi sebesar 1,278648.

Analisis Regresi Logistik Ordinal

Hasil uji hipotesis penelitian dengan model regresi logistik ordinal disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Ordinal Logistic Regression

Variabel	Prediksi	Estimate	S.E.	Wald	Sig.	Kesimpulan
[RATING = 1,0]		40,482	8,292	23,835	,000	
[RATING = 2,0]		44,051	8,556	26,507	,000	
INST	+	5,742	1,887	9,260	,002	H ₁ didukung
MOWN	+	3,135	7,320	,183	,668	H ₂ tidak didukung
COMIS	+	,153	,203	,570	,450	H ₃ tidak didukung
INDCOMIS	+	-7,793	2,139	13,268	,000	H ₄ tidak didukung
AUDCOM	+	2,557	,599	18,193	,000	H ₅ didukung
AUDQU	+	,154	,522	,087	,768	H ₆ tidak didukung
MAT	-	,565	,557	1,029	,310	H ₇ tidak didukung
DER	-	-,189	,080	5,563	,018	
ROA	+	7,616	3,312	5,288	,021	
SIZE	+	1,140	,278	16,866	,000	

Pearson: Chi-square = 186,457, Sig. = 0,676 ; Deviance: Chi-squar=150,641, Sig.= 0,993

Overall Model Fit Test: -2 Log Likelihood Block Number = 0 adalah 349,194

-2 Log Likelihood Block Number = 1 adalah 150,641

Psedo R-Square: Cox and Snell = 0,580; Nagelkerke =0,741; McFadden=0,569

Test of Parallel Lines: Chi-square =11,561, Sig. = 0,316

Sumber: Hasil Olah Data, 2016.

Langkah pertama yang dilakukan adalah uji *Ordinal Logistic Regression* yaitu menilai kelayakan model regresi dengan menggunakan *Goodness of Fit Test*. Nilai *Chi-Square (Pearson)* sebesar 186,457 dengan signifikansi 0,676 dan *Chi-Square (Deviance)* adalah 150,641 dengan signifikansi 0,993 menunjukkan bahwa model fit dengan data.

Langkah kedua adalah menilai keseluruhan model regresi dengan membandingkan nilai $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 0$ dan $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 1$. Adanya penurunan yang signifikan nilai $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 0$ sebesar 349,194 menjadi 150,641 pada model $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 1$, menunjukkan bahwa model regresi dengan memasukkan semua variabel independen lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Langkah ketiga adalah melakukan Uji *Parallel Lines* yaitu untuk menguji asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak. Dengan nilai *Chi-square* sebesar 11,561 dan sig. sebesar 0,316 menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit sehingga pemilihan *link function* telah sesuai.

Berdasarkan hasil uji dengan *Ordinal Logistic Regression* maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Logit (p1)} = 40,482 + 5,742\text{INST} + 3,135\text{MOWN} + 0,153\text{COMIS} - 7,793\text{INDCOMIS} + 2,557\text{AUDCOM} + 0,154\text{AUDQU} + 0,565\text{MAT} - 0,189\text{DER} + 7,616\text{ROA} + 1,140\text{SIZE}$$

$$\text{Logit (p1 + p2)} = 44,051 + 5,742\text{INST} + 3,135\text{MOWN} + 0,153\text{COMIS} - 7,793\text{INDCOMIS} + 2,557\text{AUDCOM} + 0,154\text{AUDQU} + 0,565\text{MAT} - 0,189\text{DER} + 7,616\text{ROA} + 1,140\text{SIZE}$$

Langkah selanjutnya adalah menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien INST adalah 5,742 dengan tingkat signifikansi 0,002 menunjukkan bahwa H_1 berhasil didukung. Artinya semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka prediksi peringkat obligasi menjadi semakin tinggi demikian juga sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa monitoring yang dijalankan pihak institusi sudah optimal dan efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen. Temuan studi ini sejalan dengan teori keagenen yang mengemukakan bahwa konsentrasi kepemilikan institusi akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan menaikkan prediksi peringkat obligasi perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyaningrum (2005) serta Bhojraj dan Sengupta (2003) yang membuktikan bahwa persentase kepemilikan institusi memiliki hubungan yang positif signifikan dengan peringkat obligasi.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien MOWN adalah 3,135 dengan tingkat signifikansi 0,668 menunjukkan bahwa H_2 tidak berhasil didukung. Artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena presentase jumlah kepemilikan saham oleh manajerial relatif kecil. Berdasarkan deskripsi data diketahui bahwa rata-rata kepemilikan manajerial hanya sebesar 0,00732104 atau 0,732% dari total saham perusahaan. Angka ini menunjukkan bahwa belum banyak manajemen perusahaan di Indonesia memiliki saham perusahaan yang dikelolanya dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan kepemilikan saham manajerial yang relatif kecil, manajemen belum mampu men-sejajarkan kepentingannya dengan pihak investor maupun kreditor dalam menerima risiko keuangan yang timbul akibat tidak dapat dilunasinya obligasi tepat waktu, oleh

karena itu dengan kepemilikan saham manajerial yang relatif kecil belum mampu mempengaruhi secara positif prediksi peringkat obligasi perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) dan Setyaningrum (2005) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien COMIS adalah 0,153 dengan tingkat signifikansi 0,450 menunjukkan bahwa H_3 tidak berhasil didukung. Artinya ukuran dewan komisaris dalam perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa monitoring yang dijalankan dewan komisaris tidak optimal atau belum efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah dewan komisaris yang belum memadai untuk memonitor manajemen puncak. Dalam penelitian ini rata-rata jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan sampel adalah sebanyak 6 orang. Jumlah ini kemungkinan masih belum cukup optimal bagi dewan komisaris untuk memonitor kerja manajemen secara efektif.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Prasetyo (2010) dan Delli (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris maka fungsi service dan kontrol akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasihat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan, namun, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyaningrum (2005) dan Utami (2012) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien INDCOMIS adalah -7,793 dengan tingkat signifikansi 0,000

menunjukkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi tidak berhasil didukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen justru berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Artinya semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi menjadi semakin rendah dan sebaliknya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka secara kolektif komisaris independen memiliki power untuk dapat mempengaruhi berbagai keputusan dewan komisaris, sehingga jika jumlah komisaris independen dalam perusahaan terlalu besar justru akan mengakibatkan keputusan dewan komisaris menjadi kurang fokus pada keputusan yang sejalan dengan tujuan utama perusahaan. Keputusan yang diambil menjadi kurang tepat bagi perusahaan, yang berakibat pada kinerja perusahaan akan semakin menurun. Penurunan kinerja perusahaan berakibat pada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban juga semakin menurun, sehingga peringkat obligasi akan semakin menurun.

Hasil yang negatif signifikan tersebut juga dapat disebabkan karena pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja bukan dimaksudkan untuk menegakkan GCG. Banyak perusahaan menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) dan Bhojraj dan Sengupta (2003) yang menemukan bukti bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi.

Pengaruh Komite Audit terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien AUDCOM adalah 2,557 dengan tingkat signifikansi 0,000

menunjukkan bahwa H_5 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi berhasil didukung. Artinya semakin besar jumlah komite audit dalam perusahaan akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi menjadi semakin tinggi, dan semakin kecil jumlah komite audit dalam perusahaan, akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi menjadi semakin rendah.

Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dan akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Sesuai dengan tugas komite audit yang memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, mengoptimalkan fungsi pengawasan, mengawasi audit eksternal dan menjadi sistem pengendalian internal perusahaan, maka dengan adanya kinerja komite audit yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya peringkat obligasi perusahaan menjadi tinggi (Prasetyo, 2010). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyaningrum (2005) dan Prasetyo (2010) yang menemukan bukti bahwa kualitas transparansi dan pengungkapan informasi keuangan yang diukur dengan komite audit memiliki hubungan yang positif signifikan dengan peringkat obligasi.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Koefisien AUDQU adalah 0,154 dengan tingkat signifikansi 0,768 menunjukkan bahwa H_6 tidak berhasil didukung. Artinya kualitas audit yang diukur dengan KAP *The Big 4* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil yang tidak signifikan ini mungkin juga disebabkan karena KAP dengan reputasi yang tinggi sempat beberapa kali terlibat dalam skandal keuangan. Untuk di Indonesia, KAP *big 4* juga pernah terlibat dalam beberapa skandal keuangan seperti pada

kasus PT Kimia Farma yang melibatkan KAP Hans Tuanakotta yang merupakan afiliasi dari Deloitte serta kasus Bank Lippo yang melibatkan KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja yang merupakan afiliasi dari Ernst dan Young Kasus tersebut membuktikan bahwa KAP *big 4* yang memiliki kualitas yang baik juga dapat melakukan kesalahan dalam pelaksanaan audit (Winardi, 2013).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Setyaningrum (2005); Prasetyo (2010); dan Nelly dan Lukman (2013) yang menemukan bukti bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, namun penelitian ini sesuai dengan penelitian Sejati (2010); Magreta dan Nurmayanti (2009); Winardi (2013) serta Rusfika dan Wahidahwati (2015) yang menyimpulkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* maupun tidak diaudit oleh KAP *big 4* ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi, karena perusahaan penerbit yang diaudit oleh *big 4* belum tentu obligasinya memiliki peringkat *investment grade* dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *big 4* belum tentu obligasi yang diterbitkannya memperoleh peringkat non *investment grade*. Hal ini sejalan dengan hasil, namun tidak didukung oleh hasil penelitian Nelly dan Lukman (2013).

Pengaruh Debt Maturity terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Besarnya koefisien MAT adalah 0,565 dengan tingkat signifikansi 0,310 menunjukkan bahwa H_6 tidak berhasil didukung. Artinya umur obligasi tidak mempengaruhi peringkat obligasi yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Andry (2005); Adrian (2011) dan Sudaryanti *et al.* (2011) yang menemukan bahwa variabel *debt maturity* mempunyai pengaruh terhadap peringkat obligasi, namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Magreta dan Nurmayanti (2011); Estiyanti dan Yasa (2012); Winardi (2013) dan Rusfika dan Wahidahwati (2015) yang menemukan bahwa umur obligasi (debt maturity) tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena investor dalam melakukan investasi pada sekuritas obligasi mengabaikan faktor umur obligasi, karena investor beranggapan sewaktu-waktu bisa menjual investasi obligasi ketika membutuhkan dana.

Pembahasan Variabel Kontrol Pengaruh Leverage terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) memiliki nilai koefisien negatif sebesar $-0,189$ dengan tingkat signifikansi $0,018$ dan nilai statistik *wald* sebesar $5,563$. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Artinya semakin besar DER akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin rendah dan semakin kecil DER akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin tinggi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yuliana *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu alasannya ialah semakin tinggi rasio *leverage* diartikan bahwa sebagian besar aktiva perusahaan didanai dengan hutang yang berdampak pada rendahnya kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya sehingga dapat menurunkan peringkat obligasi perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) memiliki nilai

koefisien positif sebesar $7,616$ dengan tingkat signifikansi $0,021$ dan nilai statistik *wald* sebesar $5,288$. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Artinya semakin besar ROA akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin tinggi dan semakin kecil ROA akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin rendah. Dengan demikian hasil temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Magreta dan Nurmala (2009), Raharja dan Sari (2008), namun tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Devi (2007), Sejati (2010) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap peringkat obligasi.

Rasio profitabilitas mengukur seberapa efektif perusahaan dalam beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Profitabilitas memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk *going concern*. Semakin tinggi rasio profitabilitas semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga periodik dan melunasi pokok pinjaman sehingga dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan.

Pengaruh Size Perusahaan terhadap Prediksi Peringkat Obligasi

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa *size* perusahaan yang diproksikan dengan \ln total aset memiliki nilai koefisien positif sebesar $1,140$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ dan nilai statistik *wald* sebesar $16,866$. Hasil ini menunjukkan bahwa *size* perusahaan yang diproksikan dengan \ln total aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Artinya semakin besar ukuran perusahaan akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin tinggi dan semakin kecil *size* perusahaan akan mempengaruhi obligasi mendapatkan peringkat obligasi semakin rendah.

Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total asset, penjualan maupun ekuitas

yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan kecil lebih memiliki risiko yang besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Aset yang dimiliki perusahaan besar relatif lebih besar jumlahnya sehingga dengan aset tersebut dapat digunakan untuk jaminan membayar obligasi, oleh karena itu perusahaan yang besar memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban obligasi, sehingga peringkat obligasi menjadi lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* dan *debt maturity* terhadap prediksi peringkat obligasi. *Corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Berdasarkan hasil regresi logistik ordinal dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dan komite audit dalam perusahaan maka akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi menjadi semakin tinggi dan sebaliknya, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan *debt maturity* tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Sementara itu variabel komisaris independen yang diduga berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi justru berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG serta tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan, sehingga semakin besar proporsi komisaris independen justru

akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi menjadi semakin rendah.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi investor dan kreditor dalam membantu memprediksi peringkat obligasi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional dan komite audit yang semakin besar, maka diprediksi perusahaan tersebut mempunyai obligasi dengan peringkat yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan monitoring yang dijalankan investor institusional dan komite audit sudah cukup optimal dan efektif bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Selain itu dengan adanya temuan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi berimplikasi bagi perusahaan agar meningkatkan kualitas komisaris independennya. Perusahaan diharapkan mengangkat komisaris independen yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang akuntansi dan keuangan agar keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan kinerja manajemen yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga peringkat obligasi juga akan semakin meningkat.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah (1) penelitian ini hanya menggunakan data peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO, sementara masih ada lembaga pemeringkat obligasi lain yang ada di Indonesia. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data peringkat obligasi lembaga pemeringkat lain seperti PT Kasnic Credit Rating Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia, kemudian dilakukan uji beda untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari lembaga pemeringkat selain Pefindo, (2) penilaian terhadap variabel *good corporate governance* dalam

penelitian ini diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai proksi variabel *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, N. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/26855/1/JURNAL_NICKO_ADRIAN_C2A606074.pdf. Diakses tanggal 20 Maret 2016.
- Almilia, L. S. dan V. Devi. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen SMART* Bandung: 1-23.
- Altman, E. I. 1989. Measuring Corporate Bond Mortality and Performance. *Journal of Finance* 44: 909-922.
- Andry, W. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi. *Jurnal Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan* 8(2): 243-262.
- Bhojraj, S. dan P. Sengupta. 2003. Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors. *The Journal of Business* 76(3): 455-475. www.ssrn.com. Diakses 23 Juli 2015.
- Boediono, G. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII* Solo: 172-194.
- Delli, M. 2014. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi. *Jurnal Ilmiah ESAI* 8(2): 1-14.
- Doganay, M.; M. Kors. And R. Akta. 2012. Predicting the Bond Ratings of S & P 500 Firms. *The IUP Journal of Applied Finance* 18(4):83-96. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184775. Diakses 4 Oktober 2015.
- Estiyanti, N. M dan G. W. Yasa. 2012. Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Pada Peringkat Obligasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Udayana*. <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/034-AKPM-53.pdf>. Diakses 21 Januari 2016
- Fitriyah dan E. W. Damayanti. 2012. Pengaruh Corporate Governance dan Rasio Akuntansi terhadap Peringkat Obligasi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116034&val=5274>. Diakses 4 Februari 2016.
- Ikhsan, A. E.; M. N. Yahya; dan Saidaturrahmi. 2012. Peringkat Obligasi dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Pekbis Jurnal* 4(2): 115-123.
- Jelita, G. L. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Pefindo dan BEI Periode 1 Januari 2010 - 31 Mei 2014). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/43881/1/04_JELITA.pdf. Diakses 3 Januari 2016.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4):305-360.
- Kliger, D. and O. Sarig. 2000. The Information Value of Bond Ratings. *The Journal of Finance* 55(6): 2879-2902.
- Magreta dan P. Nurmayanti. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau dari Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 11(3): 143-154.

- Nelly, T Dan H. Lukman. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Tarumanegara*. <http://portal.kopertis3.or.id/handle/123456789/2013>. Diakses 17 Juli 2015.
- Prasetyo, A. 2010. *Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/22310/1/SKRIPSI.pdf>. Diakses 25 November 2015.
- Raharja dan M. Sari. 2008. Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi (PT.Kasnic Credit Rating). *Jurnal MAKSI* 8(2): 212-232.
- Rasyid, R. dan E. J. Kostaman. 2013. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi. *Jurnal UKRIDA* 1(1). http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1883/1/tulisan_Rosmita%20Rasyid_analisis%20Pengaruh%20Mekanisme%20CG%20dan%20Profitabiitas%20Perusahaan%20terhadap%20peringkat%20obligasi.pdf. Diakses 20 Desember 2015.
- Rusfika dan Wahidahwati. 2015. Kemampuan Faktor Akuntansi Dan Non Akuntansi Dalam Memprediksi Bond Rating. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(4): 1-18.
- Sari, L. K. dan H. Murtini. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Keuangan. *Accounting Analysis Journal* 4(1):1-13. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/7825>. Diakses 10 Januari 2016.
- Sejati, G. P. 2010. Analisis Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi dalam Memprediksi Peringkat Obligasi Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17(1): 70-78.
- Setyaningrum, D. 2005. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(2): 73-102.
- Setyapurnama, Y. S. dan A. M. V. Norpratiwi. 2006. Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 7(2): 107-108.
- Siallagan, H. dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas laba, dan Nilai Perusahaan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang*: 1-23. <http://blog.umy.ac.id/ervin/files/2012/06/K-AKPM-13.pdf>. Diakses 24 Januari 2016.
- Spence, M. 1973. Job Marketing Signaling. *The Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355-374.
- Sudaryanti, N., A. A. Mahfudz dan R. Wulandari. 2011. Analisis Determinan Peringkat Sukuk dan Peringkat Obligasi di Indonesia. *Islamic Finance & Business Review* 6(2): 105-137.
- Sunarjanto, N. A., dan Tulasi, D. 2013. Kemampuan Rasio Keuangan dan Corporate Governance Memprediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Consumer Goods. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17(2): 230-242.
- Susiana dan A. Herawaty. 2007. Analisa Pengaruh Indepedensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*. <http://accounting.feb.ub.ac.id/simposium-nasional-akuntansi/sna-10-makassar/>. Diakses 11 November 2015.
- Susilowati, S, dan Sumarto. 2010. Memprediksi Tingkat Obligasi Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 1(2): 163-175.
- Ujiyantho, M. A. dan B. A. Pramuka. 2007. Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*. <http://accounting.feb.ub.ac.id/simposium-nasional-akuntansi/sna-10-makassar/>. Diakses 21 November 2015.

- Utami, A. G. 2012. Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 1(2): 1-8. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>. Diakses 12 Januari 2016.
- Widyastuti, T., Djumahir, dan N. Khusniyah. 2014. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI). *Jurnal Aplikasi Manajemen* 12(2): 269-278.
- Winardi, R. D. 2013. *Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/23887> Diakses 2 Desember 2015.
- www.kompasiana.com/wyndra/tren-obligasi-gagal-bayar_54ff6e0da333111e5050fc94. Diakses 12 Nopember 2015.
- Yuliana, R. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. <http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5677>. Diakses 6 Desember 2015.

MENGAPA WAJIB PAJAK MENGIKUTI TAX AMNESTY (STUDI KASUS DI SOLO)

Titik Setyaningsih

titiksetyauns@gmail.com

Antin Okfitasari

Universitas Sebelas Maret Surakarta
STMIK Duta Bangsa Surakarta

ABSTRACT

Tax amnesty program was obtain to apply Republic Indonesia government regulation number 11 year 2016. The present study aims at providing why do tax payers take tax amnesty. This study used Case Study Research approach. A single case study approach was choosen because one data was enough to achieve the research objective. Data were gathered by questionnaire and semi-structured interview with tax payers in Solo Raya. The finding shows that comprehension of tax amnesty only can be understood three of tax payers, they take tax amnesty program by working together with tax consultant, and the problems are for arranging technical and minim for socialization become obstruction of tax amnesty realization. The limitation of this research is not using comparative case study. In addition, this research timming is limited. However this research raises the higher of leader or personal commitment to do tax amnesty program with the hope by increasing regular tax amnesty socialization, simplification of procedure tax amnesty for small business tax payers, also if tax amnesty results, the tax money, actually were used for public wealthy.

Key words: tax amnesty, single case study, commitment

ABSTRAK

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) telah berjalan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mencari makna mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. *Single case study* dipilih karena data yang diperoleh dari satu tempat telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Data diperoleh dengan kuesioner dan wawancara semi terstruktur dengan wajib pajak di Solo Raya. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman *tax amnesty* hanya dipahami oleh tiga wajib pajak, wajib pajak melaksanakan *tax amnesty* dengan bekerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak), rumitnya teknis penyusunan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah belum menggunakan *comparative case study* dan terbatasnya waktu penelitian. Meskipun begitu penelitian ini menunjukkan tingginya komitmen pimpinan/pribadi untuk melaksanakan *tax amnesty* dengan harapan bahwa masih perlunya peningkatan sosialisasi atas program *tax amnesty*, penyederhanaan prosedur *tax amnesty* bagi UMKM, serta uang pajak hasil *tax amnesty* benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci: *tax amnesty, single case study, komitmen*

PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar

Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Realiasi APBN tahun 2015 menunjukkan bahwa target tersebut hanya terealisasi sebesar Rp 1.379,9

triliun saja. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 tampak bahwa target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) selaku otoritas penanggungjawab target penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Selain itu, juga meliputi reformasi birokrasi, remunerasi, reorganisasi serta informasi teknologi (Bawazier, 2011). Salah satu program yang saat ini dijalankan adalah penghapusan sanksi yang telah dicanangkan di tahun 2015, serta *tax amnesty* yang telah ditetapkan pada 29 Juli 2016 melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2016.

Sesuai namanya, *tax amnesty* untuk mengampuni wajib pajak (WP) yang belum atau belum sepenuhnya menjalankan kewajiban membayar pajak. Fasilitas yang diperoleh rakyat jika mengikuti program ini adalah: (1) dihapuskan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (2) tidak terkena sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (3) tidak diperiksa pajak, bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (4) dihentikan proses pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan jika wajib pajak sedang diproses tapi sebelumnya telah ditangguhkan, sampai akhir tahun pajak terakhir, (5) kerahasiaan data yang diserahkan untuk pengampunan pajak sehingga data tidak bisa dijadikan dasar penyidikan dan penyelidikan tindak pidana apapun, (6) pembebasan pajak untuk penghasilan balik nama harta tambahan. Tambahan harta yang harus diungkapkan wajib pajak adalah harta yang diperoleh mulai dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkap di Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT Tahunan) pajak penghasilan (www.pajak.go.id).

Program pengampunan pajak tahap pertama berakhir Jumat 30 September 2016, Presiden memantau langsung layanan pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Presiden mengingatkan masih ada tahap kedua dan ketiga yang bisa diikuti wajib pajak, pelaku usaha, dan masyarakat. Berdasarkan data DJP aset yang dideklarasikan pada tahap pertama menembus Rp4.000 triliun, repatriasi Rp135 triliun dan uang tebusan yang masuk kas negara Rp93,6 triliun. Data pajak hasil pengampunan pajak akan digunakan bersama-sama dengan data pajak yang telah dimiliki sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi pajak pada tahun-tahun mendatang. Apabila melihat total aset yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak tahap pertama sekitar 69,5 persen yang merupakan aset dalam negeri, berarti DJP belum sepenuhnya mampu menggali potensi pajak dalam negeri apalagi yang ada di luar negeri. Selain itu diharapkan program pengampunan pajak menjadi momentum yang tepat untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah tumbuh subur, menimbulkan keadilan bagi semua wajib pajak, namun realisasinya urusan administrasi dan prosedurnya justru dinilai kurang ramah bagi pelaku usaha UMKM (bisniskeuangan.kompas.com).

Besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14–16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35–44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidak

adilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya, oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Pro dan kontra program pengampunan pajak masih menyisakan pendapat skeptis di masyarakat apakah nantinya hasil *tax amnesty* benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Program pengampunan pajak juga belum sepenuhnya menyentuh pemilik dana besar yang masih menyimpan dana yang merupakan indikasi penghasilan kena pajak yang berada di luar negeri.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perumusan masalahnya adalah mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*.

Penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia telah dilakukan beberapa peneliti (Rakhmindyarto, 2011; Darussalam, 2014; Ragimun, 2014; Darmayasa dan Aneswari, 2015a, 2015b; Sayidah, 2015; Bagiada dan Darmayasa, 2016; Prastowo, 2016). Kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014). Belajar dari keberhasilan *sunset policy* di Indonesia, (Rakhmindyarto, 2011; Ngadiman dan Huslin, 2015) melakukan evaluasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sosialisasi yang baik dan *legal enforcement* memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program *sunset policy* di Indonesia.

Negara yang berhasil menjalankan *tax amnesty* selain Indonesia adalah Italia, India,

dan Afrika Selatan (Boniello *et al.*, 2003). Program *tax amnesty* di Amerika Serikat dikaji dari kepentingan politik sehingga pilihan ini diambil sebagai bagian dari *political business cycle* (Le Borgne, 2006), namun ada pula penelitian *tax amnesty* di negara lain (Alm *et al.*, 2009) menunjukkan dampak *tax amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan *tax amnesty* tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek. Perdebatan publik terkait *tax amnesty* diperkuat dengan penelitian di Switzerland dan Costa Rica (Torgler dan Schaltegger, 2005) yang menemukan bahwa program pengampunan pajak dijalankan dengan referendum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ragimun (2014) menunjukkan bahwa program *tax amnesty* dapat dilakukan di Indonesia, tetapi sebaiknya pelaksanaannya ditunda, mengingat payung hukum atas pelaksanaan *tax amnesty* dan keterbukaan informasi yang belum jelas. Terbukanya ruang abu-abu yang mampu memunculkan celah bagi pelaku tindak pidana korupsi atau *money laundry* ini didukung oleh penelitian Sayidah (2015) yang mempertanyakan halal tidaknya dana yang akan ditarik dari luar negeri melalui kebijakan *tax amnesty*. Pandangan berbeda disampaikan oleh Prastowo (2016) repatriasi aset yang diharapkan dari kebijakan *tax amnesty* belum tentu bisa terwujud karena faktanya beberapa aset tersebut sudah ada di Indonesia melalui skema pinjaman ke luar negeri.

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mencari makna mengapa WP mengikuti *tax amnesty*. Sosialisasi *tax amnesty* belum sepenuhnya membuat WP memahami apa sebenarnya yang harus mereka lakukan, penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk meningkatkan sosialisasi di kalangan WP Orang Pribadi dan Badan. Bagi Dirjen Pajak, kontribusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan *tax amnesty*.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Ilyas dan Burton (2010), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) Fungsi Penerimaan. Yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah; (b) Fungsi Mengatur. Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta; (c) Fungsi Demokrasi. Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah; (d) Fungsi Redistribusi. Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Menurut Mardiasmo (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut: (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya; (b) Pengaturan pajak harus berdasar UU (Syarat Yuridis). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya; (c) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan perusahaan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan; (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan; (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dalam sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnya pun harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain: (1) Pembayaran, utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara; (2) Kompensasi, keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan, oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang; (3) Daluwarsa, daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi, namun daluwarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; (4) Pembebasan Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya; (5) Penghapusan, penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak (Ragimun, 2014).

Sanksi Perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT menurut ketentuan umum perpajakan adalah: (1) Denda administrasi. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan

tepat waktu, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Pajak Penghasilan WP Badan, serta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi' (2) Denda Bunga. Dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan bertambahnya utang pajak, atas kemauan atau keinginan sendiri belum dilakukan pemeriksaan. Besarnya sanksi bunga adalah 2% per bulan, maksimum 24 bulan (48%); (3) Denda Kenaikan. Dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah mendapat surat teguran, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan pajak sebesar 50% dari pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar; (4) Denda Pidana. (a) Kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan negara, maka akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang; (b) Tidak disampaikan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan negara, maka akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari sanksi administrasi: (a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia; (b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

(d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; (e) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; (g) Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau (h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai berikut: Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1).

Uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepentingan nasional. Pengampunan pajak bertujuan untuk: (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (d) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar: (a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; (b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan (d) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar: (a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; (b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan (c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar: (a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau (b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 dengan dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang, sedangkan untuk memperoleh pengampunan pajak sebagaimana dimuat dalam pasal 8 UU No 11 Tahun 2016 Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan sebagaimana ditandatangani oleh: Wajib Pajak orang pribadi; pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. membayar Uang Tebusan;
- c. melunasi seluruh Tunggalan Pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. mencabut permohonan:
 1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. Keberatan;
5. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. Banding;
7. Gugatan; dan/atau
8. Peninjauan kembali,

Dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.

Menurut Malherbe (2011), *tax amnesty* adalah pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu. Secara garis besar ada dua alasan diberlakukannya program *tax amnesty*. Pertama, politisi berusaha memuaskan sebagian masyarakat dengan kebijakan yang populis. Alasan yang kedua, negara memang sedang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya sesegera mungkin. Meskipun demikian, program pengampunan pajak yang berulang justru akan menyebabkan *moral hazard* atau anomali psikologis dari wajib pajak dan membuat individu membandingkan serta mempertanyakan persepsi dari keadilan dan kesetaraan (Nar, 2015). Secara umum memang kepatuhan pajak meningkat, namun hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Situasi menunjukkan bahwa aset ekonomis yang berasal dari pencucian uang dikembalikan dengan sistem yang legal. Hal ini menumbuhkan suatu kekhawatiran (Nar, 2015) sebagai berikut:

"In the process, "laundered money" turns back to the "laundering political

authority" as a trade-off in the form of money-vote-rent. While this situation results in negative consequences on behalf of the first one and to the detriment of the second one (honest taxpayers), the number of the taxpayers who show resistance to taxes increases..."

Negara yang berhasil melakukan kebijakan *tax amnesty* adalah Italia, India, dan Afrika Selatan (Torgler dan Schaltegger 2005), sedangkan keberhasilan *tax amnesty* di India diteliti oleh Boniello *et al.* (2003). Pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun kepatuhan ini dipengaruhi juga oleh nilai-nilai religius yang menentukan *tax morale* (Torgler, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Alm *et al.* (2009) menunjukkan dampak *tax amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan *tax amnesty* tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek.

Darussalam (2014) menjelaskan ada beberapa tujuan dilaksanakan *tax amnesty*, yaitu: (1) meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, (2) meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, (3) mendorong repatriasi modal atau aset, dan (4) transisi ke sistem perpajakan yang baru. Walaupun demikian, keempat tujuan pemberian *tax amnesty* tersebut tidak memperhatikan adanya isu non-diskriminasi antara *pengemplang* pajak dan wajib pajak yang tertib.

Ragimun (2014) berpendapat bahwa pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga

tax amnesty tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak.

Pendapat ini mendukung temuan Saracoglu dan Çaskurlu (2011), *tax amnesty* yang dilakukan secara rutin justru akan melukai kejujuran wajib pajak atau bahkan mereka berpikir bahwa tidak ada untungnya berbuat benar sehingga kepatuhan wajib pajak tidak mungkin terjadi pada masyarakat. Kesuksesan *tax amnesty* tergantung dari meningkatnya audit perpajakan, semakin efisiennya perpajakan dan penegakan aturan yang mendukung serta administrasi organisasi yang lebih baik.

Salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "*friendly*." Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, persoalan pajak di negara berkembang disebabkan oleh tidak akuratnya informasi perbankan untuk tiap perusahaan, padahal informasi ini berguna untuk memperkuat hukum pajak seperti dikemukakan Avi-Yonah dan Margalioth (2007):

"The financial sector plays a critical role in the functioning of the tax structure. The government has to ensure access to bank records on each firm to use this information in enforcing the tax law. State ownership of the banks is one extreme policy that can in principle assure that banks make information available to the government. Another approach is use of bank regulations, whereby any bank that refuses to

cooperate with the tax authorities loses its license to function as a bank. Entry of foreign banks will be particularly discouraged, given the ease with which foreign banks can facilitate tax evasion by domestic firms."

Menurut Ragimun (2014) Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan DJP masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Padahal penelitian yang dilakukan Peter *et al.* (2010) terhadap 189 negara menunjukkan adanya trend penyederhanaan struktur pajak penghasilan. Struktur pajak yang kompleks akan menyebabkan tingginya biaya administrasi perpajakan, memicu terjadinya penggelapan pajak dan transaksi ekonomi yang tidak tercatat. Semakin sederhana sistem perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia telah dilakukan oleh Ragimun (2014). Ragimun (2014) menggunakan data sekunder untuk melakukan analisis SWOT yang mengemukakan: (1) *Tax amnesty* dapat dimple-

mentasikan di Indonesia, tetapi harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*, (2) Salah satu kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena belum memadainya sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut, (3) Implementasi *tax amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini, namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*, *Tax Holiday* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *tax amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan *tax avoidance* sebagai efek kasus Gayus.

Program pengampunan pajak memungkinkan naiknya penerimaan negara, namun penerimaan ini mungkin saja hanya terjadi selama program tersebut dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan (Azmi dan Perumal, 2008).

Kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan jangka pendek sehingga perlu ada asumsi akan adanya penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan dalam artian WP tidak mau diperiksa, tidak mau membayar sanksi. Kebijakan *tax amnesty* tidak mampu mengatasi permasalahan pajak yang bersifat substantif yaitu penghindaran pajak, pengemplangan pajak, dan *transfer pricing*. *Tax amnesty* mengandung dua aspek

teritorial pengampunan yaitu tingkat lokal dan internasional. Menjadi perhatian untuk tingkat lokal terhadap WP yang terkena kasus pengemplangan pajak dengan tindakan penyanderaan (*gizeling*) apakah bisa memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*, sedangkan pada tingkat luar negeri mengarah kepada WP yang melarikan dananya ke luar negeri karena berbagai pertimbangan yang menguntungkan mereka (Bagiada dan Darmayasa, 2016).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara

jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase *asset recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty*. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada usaha memahami bagaimana sesuatu terjadi. Kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan menganalisa lingkungan secara natural (Sekaran dan Bougie, 2010). Metode ini digunakan supaya peneliti memahami bagaimana WP mempersiapkan diri dalam implementasi *tax amnesty*.

Cresswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, *grounded theory qualitative research*, studi biografi, dan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang

berbeda dengan tipe penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu.

Merriam dalam Hancock dan Bob (2006) menyatakan bahwa kelebihan studi kasus adalah hasil studi kasus dapat mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan penelitian yang akan datang. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan maksud hasil studi dapat mengevaluasi penerapan *tax amnesty* yang saat ini sedang berjalan. Penelitian ini bersifat *single case*. Data tersebut telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Pandangan ini sesuai dengan Dul dan Tony (2008) yang menyatakan bahwa:

“We distinguish two main types of case study: the single case study, a case study in which data from one instance is enough to achieve the research objective, and the comparative case study, a case study that requires data from two or more instances to achieve the research objective.”

Bukti studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumen, catatan, kuesioner, wawancara, observasi, *physical artifacts* yang merupakan karakteristik studi kasus (Gillham, 2000). Bukti yang dimaksud dalam studi kasus diabstraksi dan digabung untuk memberikan jawaban yang memungkinkan atas perumusan masalah (Hancock dan Bob, 2006).

Tujuan Penelitian (Research Objective)

Menurut Dul dan Tony (2008) terdapat 2 (dua) jenis penelitian: *theory-oriented research* dan *practice-oriented research*. *Theory-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pada perkembangan teori, sedangkan *practice-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pengetahuan pada praktisi untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah yang teridentifikasi secara praktis. Dul dan Tony (2008) menyatakan bahwa *theory-oriented research* dibagi menjadi 2 (dua) tujuan: mencari bukti empiris untuk memformulasikan proposisi baru (*theory-building*

research) dan menguji proposisi (*theory-testing research*). *Practice-oriented research* dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian. Pertama, jika praktisi dapat dengan tepat menemukan hubungan antar aspek praktis maka dapat dibangun suatu hipotesis; penelitian untuk maksud tersebut merupakan *hypothesis building practice-oriented research*. Kedua, jika hipotesis tersedia dan diasumsikan dengan hasil percobaan bahwa hasil pengujian hipotesis dapat menyediakan temuan bagi praktisi untuk pengambilan keputusan; penelitian untuk maksud itu disebut *hypothesis-testing practice-oriented research*. Ketiga, apabila suatu penelitian tidak ada hipotesis yang perlu dicari maupun diuji, maka penelitian semacam ini disebut *descriptive practice-oriented research* (Dul dan Tony, 2008).

Penelitian ini adalah riset berorientasi praktik (*practice-oriented research*) karena bertujuan memberi kontribusi pengalaman untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah penerapan *tax amnesty* di wilayah Solo Raya. Penelitian dilakukan tanpa perlu menemukan dan menguji hipotesis, dengan pertimbangan penentuan hipotesis akan membatasi penelitian, padahal penulis bermaksud mengeksplorasi pemahaman dan kendala penerapan *tax amnesty* tersebut.

Strategi Penelitian (Research Strategy)

Strategi penelitian ini adalah *descriptive case study*. Studi kasus deskriptif dipilih karena variabel yang merupakan syarat agar implementasi *tax amnesty* dapat berjalan dengan baik tidak dapat diketahui sebelumnya melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Dul dan Tony (2008) sebagai berikut:

“Because the elements of which this best practice should consist were not yet known and, therefore, must be discovered in this research, and also because finding and describing a design does not involve the discovery and testing of causal relations between

variables, a descriptive case study was appropriate."

Strategi penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) mendeskripsikan obyek penelitian, (2) mendeskripsikan pernyataan partisipan, (3) mendeskripsikan score data kuantitatif (kuesioner) dengan pernyataan partisipan, (4) mendeskripsikan temuan penelitian dengan teori.

Pengumpulan Data (*Data Collection*)

WP OP dan WP Badan yang mengikuti *tax amnesty* putaran pertama menjadi partisipan penelitian untuk memperoleh data mengapa mereka mengikuti *tax amnesty*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung (semi-terstruktur). Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurang pahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Data tambahan juga didapatkan dari dokumen pendukung.

Analisis Data

Hasil kuesioner dinyatakan dalam *score* (*quantitative data*). Interpretasi atas *score* untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semi-terstruktur (*qualitative data*). Hal ini sesuai pernyataan Dul dan Tony (2008:33) yaitu:

"Although in a case study quantitative data can be used to generate the scores to be analysed, the interpretation of scores of the (small number of) cases in order to generate the outcome of the study is done qualitatively (by visual inspection) and not statistically."

Data ditabulasi dan dianalisis dengan *general descriptive analysis*. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Harun (2008). Data kualitatif dianalisis dengan mereduksi data: mengkode dan mengkategorikan data (Sekaran dan Bougie, 2010).

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan

dengan membuat ringkasan dan menelusur tema (Prastowo, 2012).

Pernyataan partisipan yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur direduksi dengan menggolongkan dalam suatu tema tertentu. Pernyataan partisipan tentang *tax amnesty* direduksi untuk membentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Keabsahan dan Keandalan Data (*Validity and Reliability*)

Keabsahan data (*Validity*) adalah proses bagaimana mengukur apa yang ingin kita ukur. Keandalan data (*Reliability*) adalah bagaimana hasil penelitian jika dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang sama (Sekaran dan Bougie, 2010). Keabsahan dan keandalan data penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data kualitatif yang berasal dari wawancara semi-terstruktur (pernyataan partisipan WP) dengan data kuantitatif kuesioner, (2) Mengkaitkan teori untuk menginterpretasi dan menjelaskan data, (3) Mengkaitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang relevan untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.

Rerangka Berpikir

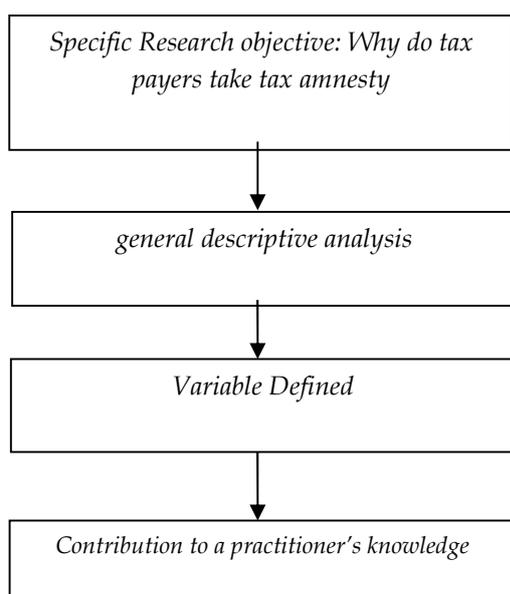
Descriptive practice-oriented research dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan variabel yang merupakan syarat agar implementasi *tax amnesty* dapat berjalan dengan baik, tidak dapat diketahui sebelumnya (*unknown variable*) melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Tujuan penelitian yang bersifat khusus (*Specific Research Objective*) telah disebutkan dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mengapa WP mengikuti *tax amnesty*.

Gambar 1 menunjukkan rerangka penelitian. Penulis mengeksplorasi mengapa WP OP mengikuti *tax amnesty*. Bersamaan dengan kegiatan itu, dilakukan eksplorasi mengapa WP Badan mengikuti *tax amnesty*.

Data dianalisis melalui *general descriptive analysis*. Hasil analisis data dikaitkan dengan teori dan regulasi yang berlaku. Bukti empiris berupa kenyataan sosial penerapan *tax amnesty* ditemukan (*variable defined*), selanjutnya variabel tersebut dideskripsikan untuk memberi solusi yang berimplikasi praktik. Dengan demikian tujuan penelitian ini telah tercapai.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sasaran penelitian adalah WP OP dan WP Badan yang mengikuti *tax amnesty* di Solo Raya. Sasaran penelitian adalah mereka yang benar-benar menyiapkan diri dalam pemberkasan sebagai syarat *tax amnesty*.



Gambar 1
Rerangka Berpikir

Terdapat 11 Wajib Pajak terdiri dari 7 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan 4 Wajib Pajak Badan (WP Badan). Untuk WP OP terdiri dari 5 (lima) WP non UMKM dan 2 (dua) WP UMKM, sedangkan WP Badan terdapat 3 (tiga) WP non UMKM dan 1 (satu) WP UMKM. Wajib pajak tersebut berasal dari Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten dan Surakarta. Berikut rincian WP dan tempat usahanya berada:

1. Wonogiri : 2 WP

2. Klaten : 1 WP
3. Karanganyar : 5 WP
4. Boyolali : 1 WP
5. Surakarta : 2 WP

Tabel 1
Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty

Wajib Pajak	UMKM	Non UMKM
Orang Pribadi (OP)	2	5
Badan	1	3
Total	3	8

Sumber: Data Primer diolah

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara langsung (wawancara semi-terstruktur) terhadap partisipan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 bulan yaitu Agustus dan September 2016. Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurangan pemahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Respon berupa pernyataan yang diberikan partisipan dicatat ketika wawancara berlangsung, hal ini dikarenakan partisipan merasa lebih nyaman menjawab pertanyaan wawancara dalam kondisi tidak direkam selama memberikan pernyataan tersebut. Berdasarkan informasi, diperoleh profil lama usaha partisipan (Tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 2
Lama Usaha Partisipan

Lama usaha	WP OP	WP Badan
Kurang dari 5 tahun	1	2
5 s/d 10 tahun	4	1
Lebih dari 10 tahun	2	1
Jumlah	7	4

Sumber: Data Primer Diolah

Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty

Pemahaman WP terhadap *tax amnesty* dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pemahaman WP tentang *tax amnesty*

No	Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju	
1	Wajib Pajak memiliki pengetahuan memadai tentang UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	3	27%	8	73%
2	Wajib Pajak memiliki analisa yang baik atas Laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan	4	36%	7	64%
3	Wajib Pajak paham sepenuhnya konsekuensi apabila tidak mengikuti program pengampunan pajak	11	100%	0	0%

Sumber: Data Primer diolah

Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak dipahami secara memadai oleh WP. Hanya 3 (tiga) WP atau sekitar 27% saja yang memahami UU 11 Tahun 2016 (Tabel 3). Hal ini didukung dengan pernyataan WP F yang mengatakan

“Saya ikut *tax amnesty* karena saya ingin aset jadi aman dan kegiatan usaha lancar.” Didukung oleh pernyataan WP B yang menyatakan “Tempat kita sudah diaudit semua, sudah tertib pajak, kemarin juga sudah melakukan *Sunset Policy* jilid 2, ikut *tax amnesty* supaya tidak diganggu pajak saja, jadi beli gangguan mumpung murah.” Pajak dianggap sebagai sebetulnya gangguan dalam usaha, bukan sebagai kewajiban yang mengikat.

WP C bahkan terang-terangan menyatakan keikutsertaannya dalam program ini adalah “...supaya laporan tahun 2 kemarin *ben ora diprikso* (biar tidak diperiksa-pemeriksaan)”. Sejalan dengan WP C, WP H dan J mengemukakan:

“Saya ikut *Tax Amnesty* karena ditawarkan juru sita dan kepala penagihan KPP, karena saya punya tunggakan pajak. Supaya tunggakan pajak saya dapat korting bunga nya jadi cuma bayar pokoknya maka saya ikut *Tax Amnesty*. Saya jelas ikut putaran 1 biar irit dan kasus saya segera *rampung*, hidup saya tenang tidak punya hutang

pajak lagi kasihan anak-anak, saya sudah tua.” (WP H)

“Saya ikut *Tax Amnesty* karena disuruh sama teman-teman *juragan* itu, karena kalau gak ikut *Tax Amnesty* nanti kena denda 200%, saya jadi takut. Tapi saya ikut yang 0,5% karena saya hanya pedagang kecil.” (WP J)

Meskipun ada beberapa WP (A, G, dan I) yang mengikuti *tax amnesty* karena berusaha mematuhi aturan pemerintah, kesempatan pengampunan pajak adalah kesempatan yang langka dan harus dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah, pernyataan di atas menunjukkan *tax amnesty* tidak sepenuhnya dipahami WP, WP cenderung ketakutan dan terpaksa. Ketakutan WP ini dipicu kemungkinan pemeriksaan atas kewajiban pembayaran pajak serta denda yang lebih besar jika tidak mengikuti program pengampunan pajak. Berdasarkan tabel 3 di atas hanya 4 WP (36%) yang memiliki analisa atas laporan keuangan, sisanya sebanyak 7 WP (64%) tidak memiliki analisa yang baik atas laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian WP tidak mengerti perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Hadirnya peraturan perpajakan seringkali diartikan rumit sebelum WP menjalaninya, sehingga jika WP dihadapkan pada penerapan program pengampunan pajak maka mereka dengan terpaksa menjalaninya.

Pelaksanaan Tax Amnesty

Pelaksanaan *tax amnesty* ditunjukkan tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 menunjukkan bahwa WP melaksanakan program peng-

ampunan pajak dengan bantuan pihak luar yaitu jasa konsultan pajak untuk mengurus *tax amnesty*.

Tabel 4
Pelaksanaan tax amnesty

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Wajib Pajak melaksanakan program pengampunan pajak tanpa bantuan pihak luar	0 0%	11 100%
2	Wajib Pajak melaksanakan program pengampunan pajak dengan bantuan pihak luar	11 100%	0 0%
3	Secara rutin SPT dilaporkan tepat waktu	9 82%	2 18%
4	Program Pengampunan Pajak memerlukan kerumitan teknis penyusunan	11 100%	0 0%

Sumber: Data Primer diolah

Hal ini didukung dengan *indepth interview* sebagai berikut:

“Saya sepakat saja di sini ada dua sisi: sisi saya sebagai pengusaha yang berangkat dari kecil hanya berfokus kepada cara penjualan yang baik, sehingga memikirkan soal detail pajak kadang terabaikan, artinya ini bukan kesalahan di pihak pengusaha saja, karena faktanya di sisi lain petugas pajak juga gak pernah kasih penyuluhan soal pajak yang baik dan benar kayak apa pada masyarakat. Minimal seharusnya pajak menggunakan media apalah untuk mendidik masyarakat soal bagaimana cara membayar pajak yang baik dan benar. Untuk akses ke kantor pajak antrianya minta ampun panjangnya, se-

harusnya pengusaha dapat kemudahan soal pengetahuan mekanisme hitungan dan cara pembayaran.” (WP K)

Dari sebelas WP, hanya 2 (dua) WP yang tidak melaporkan SPT tepat waktu. Keseluruhan pendapat WP mendukung pernyataan wawancara tentang rumitnya teknis penyusunan program pengampunan pajak.

Hambatan Tax Amnesty

Hambatan pelaksanaan program pengampunan pajak ditunjukkan Tabel 5 di bawah ini. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki beberapa kendala antara lain WP kurang memiliki pengetahuan perpajakan karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai (36%) dan kurangnya pengalaman di bidang tersebut (45%).

Tabel 5
Hambatan tax amnesty

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Pendidikan yang tidak sesuai	4 36%	7 64%
2	Kurangnya pengalaman	5 45%	6 55%
3	Sistem yang sulit dipahami	11 100%	0 0%
4	Rendahnya komitmen pimpinan/pribadi	1 9%	10 91%
5	Kurangnya sosialisasi sistem yang baru	11 100%	0 0%

Sumber: Data Primer diolah

Namun beberapa WP menyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menghambat program ini. Alasan yang menghambat program ini adalah sistem yang sulit dipahami karena kurangnya sosialisasi. Pada dasarnya setiap Wajib Pajak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat komitmen pimpinan/pribadi dalam melaksanakan *tax amnesty* (Tabel 5). *Tax amnesty* seharusnya dibuat lebih mudah dan sederhana sebagaimana harapan dari WP K berikut:

“kasih masyarakat penyuluhan cara hitung pajak yang bener dan mudah, bikin kolom lebih *simple*, gak banyak kolom-kolom menjemukan. Pemerintah harusnya lebih cerdas dalam hal sosialisasi pendidikan pajak kepada masyarakat...”

“...saya tidak memikirkan uang yang telah keluar, lebih baik memikirkan bagaimana mendapatkan laba lagi dan lagi. Jangankan mau nipu, lha teman saya saja yang pernah nipu lebih *gedhe* daripada yang harusnya diambil negara ternyata...”

Momentum *tax amnesty* seharusnya kembali pada asas keadilan yang menyetujui pada mereka yang punya aset besar dan masih belum tersentuh. *Tax amnesty* seharusnya dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak ikut karena akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh pajak. Pemerintah harus mengevaluasi program pengampunan pajak ini agar tidak salah sasaran. Ketimpangan yang selama ini terjadi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik seharusnya dapat dieliminasi setelah *tax amnesty* dilaksanakan.

Ada banyak harapan yang diinginkan bagi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, seperti adanya peningkatan pendapatan

negara yang berimbas pada perekonomian yang baik. Perekonomian yang baik tentunya akan mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Wajib Pajak merasa aman dalam melaksanakan operasional perusahaan, sehingga tercipta dunia usaha yang sehat. Sebagaimana pernyataan di bawah ini:

“Perekonomian semakin baik, kita tidak dilakukan pemeriksaan dan bisa konsen mengurus operasional perusahaan.” (WP C)

“Pendapatan negara bertambah melalui pajak dari dunia usaha, maka sebaiknya banyak peningkatan fasilitas bagi dunia usaha.” (WP D)

Wajib Pajak juga berharap adanya peningkatan monitoring pembelanjaan negara, termasuk monitoring hasil dari *tax amnesty*. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha juga menjadi harapan besar Wajib Pajak pasca *tax amnesty*. Hal ini disampaikan WP I “Saya sudah ikut *tax amnesty*, maka harapannya tidak adanya penelusuran dan pengusutan harta yang dilaporkan, juga tidak *tax amnesty* lagi”. Sejalan dengan WP I, WP B mengemukakan:

“Hasil dari *tax amnesty* benar-benar diawasi penggunaannya, jangan digunakan untuk membayar hutang dan bunganya, ini uang rakyat yang dikorbankan untuk negara. Hemat dalam penggunaan APBN. Cari celah untuk mendapat sumber pendanaan lain selain pajak. Jika harapan ini tidak terwujud, saya pesimis negeri ini bisa bangkit, tingkat ekonomi meningkat, tinggal tunggu saja kehancuran negeri ini...”

Penelitian ini juga mendukung pendapat Avi-Yonah dan Margalioth (2007) dan Ragimun (2014) yang mengemukakan bahwa salah satu kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena belum memadainya

sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. Pernyataan di atas mewakili ketidakpercayaan masyarakat pada penggunaan uang pajak apakah benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan pendapat Darussalam (2014), *tax amnesty* merupakan rekonsiliasi nasional untuk menghapus kesalahan masa lalu wajib pajak. Hal ini seharusnya diikuti dengan adanya kepastian hukum yang jelas bagi wajib pajak. Keadilan dan kenyamanan dalam usaha yang diharapkan akan menciptakan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak dan alokasi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Meskipun terdapat 9 WP (82%) yang melaporkan SPT tepat waktu, namun 2 WP sisanya tidak secara rutin melaporkan SPT-nya (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela WP belum tentu terbentuk dengan adanya *tax amnesty*, yang menarik di sini adanya pernyataan WP I yang mengemukakan

“...juga tidak *tax amnesty* lagi” ini berarti bahwa *tax amnesty* yang dilakukan secara rutin justru akan melukai kejujuran wajib pajak atau bahkan mereka berpikir bahwa tidak ada untungnya berbuat benar sehingga kepatuhan wajib pajak tidak mungkin terjadi pada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan suatu studi kasus tunggal yang berorientasi pada praktik. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman program pengampunan pajak hanya dipahami 3 (tiga) WP atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi sebetulnya gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Kedua, WP melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak program sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan rumitnya penyusunan *tax amnesty*. Komitmen pimpinan/pribadi yang tinggi menunjukkan bahwa WP sebenarnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk mengikuti *tax amnesty*, akan tetapi wajib pajak mengharapkan adanya kepastian alokasi dana *tax amnesty*, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi pelaksanaan program pengampunan pajak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi *tax amnesty* dapat terlaksana dengan baik yaitu: (1) Perlunya peningkatan sosialisasi atas program *tax amnesty* dan perlunya memberi pengetahuan perpajakan secara teratur, sehingga wajib pajak memahami setiap program yang sedang dijalankan oleh DJP sedemikian rupa, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran pentingnya pajak untuk negara dan dapat menghitung sendiri besar pajak terutang dengan benar, menyetorkannya ke kas Negara serta melaporkan SPT tepat waktu, (2) Perlakuan khusus untuk UMKM dengan mengingat tujuan program pengampunan pajak adalah repatriasi, kemudian memperluas basis pajak, dan baru fokus pada penerimaan pajak. Prosedur dan penyusunan *tax amnesty* harus disederhanakan, (3) DJP dan pemerintah wajib menjaga kepercayaan masyarakat terkait penggunaan uang pajak hasil *tax amnesty* untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum menggunakan *comparative case study* dan terbatasnya waktu penelitian. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan de-

ngan memperluas basis data dan memperpanjang jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., J. Martinez-Vazquez dan S. Wallace. 2009. Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*. 39(2): 235–253.
- Avi-Yonah, R. S dan Y. Margalioth. 2007. Taxation in Developing Countries: Some Recent Support and Challenges to the Conventional View. *Tax & Development, Review* 27(1): 1-32.
- Azmi, A. A. C dan K. A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective *International Review of Business Research Papers* 4(5): 11-19
- Bagiada dan Darmayasa. 2016. Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 5 Makasar*: 1-24
- Bawazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legesi Indonesia* 8(1): 1-12.
- Boniello, G., G. Polacco., F. Florenzano., & S. Jarrett. 2003. Italian Tax Amnesty is Back But on Tougher Terms. *Journal of International Taxation* 14(4): 47-51.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid dari judul aslinya “Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach.” Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damayanti, D. 2016. Mengapa Harus Ikut Amnesti Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article> Diakses tanggal 14 Desember 2016.
- Darmayasa, I. N., and R. Y. Aneswari. 2015a. The ethical practice of tax consultant based on local culture. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211(September): 142-148.
- Darmayasa, I. N., dan Y. R. Aneswari. 2015b. Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(5).
- Darussalam. 2014. Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, 26: 15-19
- Dul, J. dan H. Tony. 2008. *Case Study Methodology in Business Research* Published by Elsevier Ltd. USA.
- Gilham, B. 2000. *Case Study Research Methods*. First Edition, British Library.
- Hancock, D. R dan A. Bob 2006. *Doing Case Study Research: a Practical Guide for Beginning Researchers*. Teachers College, Columbia University, New York.
- Harun. 2008. Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 8(2): 113-122.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julianto, P. A. 2016. Ditjen Pajak Apresiasi UMKM yang Ikut Tax Amnesty <http://bisniskeuangan.kompas.com> Diakses tanggal 5 Oktober 2016.
- Le Borgne, E. 2006. *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States* (No. 222).
- Malherbe, J. 2011. *Tax Amnesties*. Kluwer Law International BV, The Netherlands.
- Mardiasmo, 2010. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues* 5(2): 580-589.
- Ngadiman dan D. Huslin. 2015. Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi* 19(2): 225-241
- Peter, K. S, S. Buttrick, dan D. Duncan. 2010. Global Reform Of Personal Income Taxation, 1981–2005: Evidence From 189 Countries. *National Tax Journal* 63(3): 447–478.

- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan II, Ar Ruzz Media. Yogyakarta.
- Prastowo, Y. 2016. Repatriasi Aset Akan Sulit Dijaring Mayoritas Aset di Dalam Negeri. Jakarta. *Harian Kompas*, p. 17.
- Rakhmindyarto. 2011. Evaluating the Sunset Policy in Indonesia. *International Review of Social Sciences and Humanities* 2(1): 198–214.
- Ragimun. 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Saracoglu, O. F. dan E. Çaskurlu. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case *International Journal of Business and Social Science* 2(7): 95-103.
- Sayidah, N. 2015. Pandangan Terhadap Tax Amnesty Sebuah Temuan Awal. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5*. Universitas Trunojoyo.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research Method for Business, A Skill Building Approach*. Fifth Edition. John Willey & Son Inc. New York.
- Torgler, B. 2003. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA)*. 08: 1–35.
- Torgler, B., and C. A. Schaltegger. 2005. Tax Amnesties and Political Participation. *Public Finance Review* 33(3): 403–431.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN PORTFOLIO SAHAM-SAHAM OPTIMAL: PENDEKATAN SINGLE INDEX MODEL

Putu Anom Mahadwartha

anom@staff.ubaya.ac.id

Pranata Yandi Gunawan

**Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Surabaya**

ABSTRACT

Buying stock is one of the way investors do to obtain profit from their money. Every investor should consider two important things, return and risk. To minimize the risk, one can diversify their investment by creating optimal portfolio, which consists of different stocks with optimal return and certain degree of risk. The aim of this research was to establish and determine the optimization of optimal portfolio composed by LQ45 stocks over the period of February 2011 to January 2015. The research was trying to create optimal portfolio from thirty-eight non-financial companies stocks listed in LQ45 using single index model. From the research, the optimal portfolio is composed of TLKM (PT Telkom Indonesia Tbk), BMTR (PT Global Mediacom Tbk), JSMR (PT Jasa Marga Tbk), SSIA (PT. Surya Semesta Internusa Tbk), AKRA (PT AKR Tbk), MNCN (PT Media Nusantara Citra Tbk), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), ASII (PT Astra International Tbk), KLBF (PT Kalbe Farma Tbk), ASRI (PT Alam Sutera Realty Tbk), UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk), ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), SMGR (PT Semen Indonesia Tbk), and only able to be used for six months. The optimal portfolio gives 0.242% returns for a week with 1.122 value of beta. Majority of the aggressive portfolio have higher return toward risk then portfolio moderate and conservative.

Key words: optimal portfolio, risk, return, single index model

ABSTRAK

Membeli saham merupakan salah satu cara yang dilakukan *investor* untuk memperoleh keuntungan dari uang yang dimilikinya. Setiap *investor* harus memperhatikan dua hal penting, yaitu tingkat hasil dan risiko. Untuk meminimalkan risiko, *investor* dapat mendiversifikasi investasinya dengan menyusun portfolio optimal yang terdiri atas saham-saham berbeda dengan tingkat hasil optimal dan derajat risiko tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat dan menentukan pengoptimalan portfolio optimal yang tersusun atas saham-saham LQ45 selama dalam periode Februari 2011 hingga Januari 2015. Penelitian ini mencoba untuk menciptakan portfolio yang optimal dari 38 saham LQ45 perusahaan non finansial menggunakan model *single index*. Dari penelitian ini, portfolio optimal tersusun atas TLKM (PT Telkom Indonesia Tbk), BMTR (PT Global Mediacom Tbk), JSMR (PT Jasa Marga Tbk), SSIA (PT. Surya Semesta Internusa Tbk), AKRA (PT AKR Tbk), MNCN (PT Media Nusantara Citra Tbk), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), ASII (PT Astra International Tbk), KLBF (PT Kalbe Farma Tbk), ASRI (PT Alam Sutera Realty Tbk), UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk), ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), SMGR (PT Semen Indonesia Tbk), dan hanya dapat digunakan selama 6 bulan. Portfolio optimal ini memberi tingkat hasil 0,242% untuk satu minggu dengan beta sebesar 1,122. Portfolio terbaik sebagian besar adalah portofolio harian dengan volatilitas tinggi atau portofolio agresif.

Kata kunci: portofolio optimal, risiko, return, model single index

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan selalu diikuti oleh perkembangan pasar modal sebagai salah satu alternatif penyedia dana murah untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi. Saat ini jumlah emiten yang sudah mempublik di Bursa Efek Indonesia melebihi lima ratus emiten dengan nilai kapitalisasi lebih dari lima ribu dua ratus triliun. Hal ini dikarenakan masih banyak orang Indonesia yang memiliki paradigma akan resiko yang besar jika menginvestasikan dalam pasar modal. Tentunya investasi di pasar modal sendiri memiliki tingkat pengembalian dan resiko yang sedikit berbeda dengan bentuk usaha investasi di sektor perbankan seperti tabungan atau deposito. Pada umumnya tingkat pengembalian berbanding lurus dengan resiko, Investasi yang mengandung resiko rendah maka tingkat pengembalian keuntungan yang didapatkan juga rendah dan apabila investasi itu menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi maka investasi tersebut juga mengandung unsur resiko yang besar.

Bagi seorang *investor* tentunya harus sangat berhati-hati dalam membeli beberapa sekuritas. Menurut Reilly and Brown (2003), secara umum *investor* adalah *risk averse* yaitu *investor* yang menginginkan sebuah bentuk investasi yang memiliki resiko rendah dengan tingkat pengembalian yang tinggi, dan salah satu bentuk cara untuk menekan tingkat resiko dalam praktiknya dalam melakukan serangkaian investasi (diversifikasi) di berbagai bentuk investasi. Investasi yang ditanamkan di sekumpulan surat berharga disebut *portfolio*, dan *Portfolio* yang optimal menurut Fama dan French (2004) harus terletak pada *curve efficient frontier*. *Portfolio* tersebut dapat menghasilkan tingkat hasil pengembalian optimal dengan resiko serendah-rendahnya. Membentuk sebuah *portfolio* dari sekumpulan saham tentunya seorang *investor* memerlukan banyak informasi, informasi yang dimaksud bisa berupa harga *historis* saham tersebut atau kondisi dari kinerja emiten saham tersebut. Dari kumpulan beberapa informasi tersebut

kemudian diolah dan dianalisa, umumnya analisis yang digunakan adalah analisis fundamental dan analisa teknikal. Analisa Fundamental adalah metode analisis yang berdasarkan rasio keuangan dan kejadian-kejadian secara langsung atau tidak langsung (politik, suku bunga, nilai tukar, dan lainnya) yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut. Berbeda dengan analisa fundamental yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan keuangan suatu perusahaan, analisa teknikal digunakan untuk memprediksi trend dari harga saham dengan cara mempelajari data pasar di masa lampau. Pembuatan rerangka keputusan investasi sangat menentukan keberhasilan seorang investor dalam mengoptimalkan tingkat imbal hasil investasi dan mengurangi sekecil mungkin risiko yang dihadapi (Markowitz, 1959).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana desain suatu simulasi portofolio optimal yang merupakan kombinasi dari saham-saham likuid LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.

Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan membentuk sebuah *portfolio* yang optimum, salah satunya dengan pendekatan menggunakan *single index model* yang dikemukakan pertama kali oleh Markowitz (1959) model ini oleh kebanyakan *investor* di Indonesia sering digunakan karena para *investor* lebih suka menggunakan interpretasi geometrik dari kombinasi aset yang ada dalam sebuah *portfolio* tersebut (Kam, 2006). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Chitnis (2010) yang menguji optimalisasi 2 *portfolio* pada pasar modal NSE (*National Stock Exchange of India*) menggunakan *single index model sharpe* menunjukkan bahwa semakin besar *sharpe's rasio* yang dimiliki sebuah *portfolio* semakin besar kinerjanya. Penelitian optimalisasi *portfolio* di Indonesia sendiri sudah pernah dilakukan oleh Yasmana (2003), yaitu pembentukan *portfolio* optimal dengan menggunakan *single index model* pada Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada tahun 2002. Rudiyanto (2003) kembali menggunakan *single index model* untuk membentuk *portfolio* saham untuk periode 1999 hingga 2001. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Widyantini (2005), yaitu membandingkan hasil pembentukan optimal *portfolio* menggunakan dua model berbeda dengan menggunakan data saham mingguan periode 2003 hingga 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *single index model* lebih baik dibanding *constant correlation model* dalam hal pembentukan *portfolio*. Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Umanto (2008), yang juga membandingkan pembentukan optimal *portfolio* menggunakan dua model yang sama yaitu *single index model* dan *constant index model* menggunakan data harga saham harian periode 2002-2007. Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa pembentukan *portfolio single index model* lebih baik dibanding *constant correlation model* dalam hal rasio *return* dan beta pada *portfolio* yang sudah dibentuk. Michael dan Veiga (2005) pada index S&P 500, FTSE 100, CAC 40, SMI *financial index* pada periode 1990-2004 menyimpulkan bahwa membentuk *portfolio* dengan *single index model investor* dapat memperkirakan berapa besar *varians*, dan penurunan biaya modal harian yang di pakai dalam *portfolio* yang bersifat tanpa syarat.

Dengan menggunakan pendekatan *single index model* perhitungan pembentukan *portfolio* jauh lebih sederhana, tetapi model ini tidak bisa menggambarkan kondisi mikro ekonomi, dimana model ini mengabaikan korelasi *return* terhadap saham perusahaan yang sama dalam sebuah industri. Dengan menggunakan pendekatan *single index model* maka dapat dihitung besar varian dan beta (risiko) yang nantinya dapat digunakan dalam perhitungan *expected return* dengan menggunakan metode CAPM, tetapi jika terjadi penambahan jumlah saham dalam *portfolio* tersebut besar dari resiko yang disebabkan oleh faktor *nonmarket* menjadi jauh lebih kecil. Salah satu evaluasi *trading strategy* yang dilakukan baik praktisi

maupun akademisi adalah melakukan pengujian *portfolio* yang sudah dibentuk tersebut melalui metode pengujian *Treynor*, *Sharpe* dan *Jensen alpha*, dengan tujuan untuk mereduksi kegagalan *trading strategy* yang dilakukan.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan fokus dari penelitian ini adalah membentuk sebuah *portfolio* dari kumpulan saham yang memiliki kinerja optimal dengan menggunakan metode *single index model* dengan obyek penelitian adalah kumpulan saham-saham LQ 45 pada periode 2011-2015. Portofolio optimal yang dibentuk dengan pendekatan *efficient market frontier* pada metode *single index model* seharusnya mampu mengalahkan indeks pasar (*beat the market*). Adapun perbedaannya terletak pada (a) periode pengamatan (semua emiten yang terdaftar di LQ 45 selama periode 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2015, kecuali badan usaha yang bergerak di sektor *finance*), (b) dasar cara pemilihan saham yang dipilih, (c) jenis *portfolio* berdasarkan jenis data yang dipakai, (d) terdapat uji optimalisasi dari setiap jenis *portfolio* yang sudah dibentuk.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pendekatan *efficient market frontier* dan pendekatan *single index model* dapat membentuk sebuah *portfolio* optimal. Selanjutnya menguji optimalitas portofolio yang dibentuk dengan pendekatan *efficient market frontier* dan pendekatan *single index model* dengan harapan mampu mengalahkan indeks pasar (*beat the market*).

TINJAUAN TEORETIS

Pasar modal adalah pertemuan antara pemilik dana berlebih dan pihak yang membutuhkan dana melalui proses jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, warrant, option, dan berbagai bentuk instrumen investasi turunannya. Dalam pasar modal, terdapat pemain-pemain utama yang terlibat di dalamnya, yaitu emiten, investor, lembaga penunjang, penjamin emisi, broker,

penanggung, dan perusahaan surat berharga. Berdasarkan waktu penerbitannya, pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu pasar primer tempat perusahaan melakukan penawaran umum awal (IPO) dan pasar sekunder tempat perdagangan efek yang telah beredar di bursa. Undang-Undang Pasar modal (1995) mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Tempat terjadinya proses jual-beli efek tersebut disebut bursa efek.

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama adalah sebagai berikut: (a) Emiten: sebuah perusahaan atau pemerintah yang akan melakukan emisi/penjualan surat-surat berharga. Sebelum melakukan emisi biasanya emiten melakukan rapat pemegang saham umum (RUPS). Penjualan surat-surat berharga ini biasanya dimaksudkan untuk perluasan usaha, perbaikan struktur modal, dan pengalihan pemegang saham. (b) Investor: Pemilik modal berlebih yang ingin membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga para *investor* biasanya melakukan sebuah penelitian atau analisis tertentu, seperti bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan beberapa analisis lainnya. Tujuan utama dari *investor* membeli surat berharga tersebut adalah memperoleh *return/dividen* (pembagian keuntungan hasil usaha emiten), kepemilikan perusahaan, untuk di jual kembali dengan mengambil margin keuntungan. (c) Lembaga Penunjang: Fungsinya adalah turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun *investor* dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. (d) Penjamin Emisi (*Underwriter*): Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh

dana yang diinginkan emiten. (e) *Broker/Pialang*: Perantara Perdagangan dalam proses jual-beli efek, Adapun fungsi dari *broker* adalah memberikan informasi tentang *emiten* ke *investor*, dan membantu proses jual-beli efek untuk *investor*. (f) Penanggung (*Guarantor*): Lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh *investor* sebelum menanamkan dananya. (g) Perusahaan Surat Berharga (*Securities company*): Lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain menjadi pedagang efek, penjamin *emisi*, menjadi *broker* untuk *investor*, dan pengelola dana *investor*.

Pada setiap bursa efek dikenal istilah *composite index*, yaitu sebuah indeks pasar yang digunakan oleh bursa efek untuk menggambarkan pergerakan harga dari seluruh saham yang berada dalam bursa tersebut. Indeks saham gabungan (*Composite Stock price index = CPSI*) adalah sebuah refleksi dari kegiatan pasar secara keseluruhan dalam sebuah bursa efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh bursa efek masing-masing negara.

Pasar modal dikatakan efisien jika tidak seorangpun, baik *investor* individu maupun *investor* institusi, akan mampu memperoleh *abnormal return*, setelah disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Fama (1991) membagi pasar efisien menjadi 3 bentuk, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, setengah kuat, dan kuat. Pasar disebut dalam bentuk efisien pasar lemah jika harga-harga dari sekuritas saat ini adalah cerminan dari informasi-informasi pada masa lalu. Pasar disebut dalam bentuk setengah kuat jika harga-harga dari sekuritas saat ini sudah mencerminkan secara penuh semua informasi publik. Pasar disebut dalam bentuk kuat jika harga-harga dari sekuritas saat ini sudah mencerminkan secara penuh semua informasi publik dan *private*. *Return* merupakan total *gain (loss)* dari investasi yang dilakukan pada periode tertentu. Ada

2 macam *return* yang dapat diterima seorang *investor* yakni dari *capital gain (loss)* dan dari deviden, sehingga *return* saham dapat disimpulkan sebagai total dari *capital gain (loss)* dan deviden.

Dalam setiap ketidaksempurnaan pasar, setiap *investor* tetap mengejar *return* dari modal yang sudah diinvestasikan. *Return* berkorelasi positif dengan risiko yang akan dihadapi. Risiko mencerminkan ketidakpastian mendapat hasil, karena sifatnya yang tidak pasti, *investor* maupun analis dapat melakukan analisis dan perhitungan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham, berupa analisis fundamental, mulai dari analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, kemudian analisis perusahaan, maupun sebaliknya. Risiko dan *return* juga dapat diukur menggunakan *Capital Asset Pricing Model*. *Capital Asset Price Model (CAPM)* adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan *return* yang diharapkan, model ini digunakan dalam penilaian harga sebuah sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Treynor, Sharpe dan Litner. Model CAPM merupakan pengembangan teori *portfolio* optimal yang dikemukakan oleh Markowitz dimana mereka membedakan risiko menjadi risiko sistematis (*systematic risk*) dan risiko spesifik/risiko tidak sistematis (spesific risk/unsystematic risk). Menurut Ang *et al.* (2006 dan 2009) menemukan bahwa risiko juga dipengaruhi oleh besaran anggota *portfolio* dan kecenderungan arah trend pasar saat *portfolio* dibentuk. Adapun Asness *et al.* (2013) mengatakan bahwa kecenderungan volatilitas risiko juga berdampak pada strategi momentum yang dilakukan reksadana sehingga mempengaruhi komposisi portofolio yang dibentuk. Asness (2013) didukung oleh Baker *et al.* (2014) yang mengaitkannya dengan anomaly pada saham-saham berisiko rendah. Penelitian Asness *et al.* (2013) dan Baker *et al.* (2014) mendukung temuan Chui *et al.* (2010) namun dengan tambahan argumen me-

ngenai investor individual dalam strategi momentum.

Capital Asset Pricing Model (CAPM) memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian (*expected return*). CAPM ini mendasari pemikiran teori *portfolio* yang menyatakan bahwa investor akan memilih suatu *portfolio* saham yang dapat mengoptimalkan *expected return* untuk tingkat resiko tertentu, atau meminimumkan risiko untuk memperoleh *expected return maximal*.

$$E(Rit) = Rf(1 - i) + i E(Rmt)$$

Keterangan:

$E(Rit)$ = *expected return* dari saham i pada periode t

Rf = *return* dari *risk-free* sebuah *investment*

Rm = *return* dari pasar secara keseluruhan

i = beta (risiko) dari perusahaan i

Walaupun demikian model CAPM memiliki beberapa asumsi yaitu *Investor* memiliki karakteristik *risk averse* serta memiliki ekspektasi yang sama (*homogenous expectation*), pasar bersifat *friction less* dimana informasi dapat diperoleh dengan mudah dan tanpa biaya. Kondisi ini menyebabkan semua investor bersifat *price taker* dan tidak mungkin mendapat *abnormal return*, aset dipecah menjadi satuan terkecil yang sangat *liquid (marketable)*, terdapat *risk-free asset*, dalam hal ini investor dapat meminjam dan meminjamkan pada suku bunga tersebut, *short-selling* diperbolehkan tanpa adanya biaya tambahan seperti pajak atau biaya transaksi, dan *Asset return* terdistribusi normal.

Risiko suatu investasi dapat diturunkan dengan membentuk *portfolio*. Di dalam pembentukan *portfolio* dikenal istilah *portfolio* yang efisien, yaitu *portfolio* yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) memiliki tingkat risiko yang sama dibanding *portfolio* lain tetapi memberi *return* yang lebih tinggi, (b) Memberi *return* tinggi dengan risiko yang sangat rendah. *Single index model* merupakan salah satu cara untuk menganalisis *portfolio*

optimal, yaitu terjadi korelasi positif *return* sebuah sekuritas terhadap sebuah indeks tertentu. Model indeks tunggal mengasumsikan bahwa korelasi *return* antar sekuritas terjadi karena bereaksi terhadap perubahan *general market index*. Penilaian kinerja saham ditentukan dengan menggunakan rasio ERB (*excess return to beta*). Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung koefisien beta (tingkat resiko sebuah sekuritas) dan menghitung tingkat *return* masing-masing saham yang diamati. *Portfolio* optimal adalah saham-saham yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan dari nilai C_i tertinggi (C^*).

$$R_i = \alpha_i + \beta_i \cdot R_M$$

Keterangan:

R_i = *return* sekuritas ke-i

α_i = suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari *return* sekuritas ke-i yang independen terhadap kinerja pasar.

β_i = beta, yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan R_i akibat dari perubahan R_M

R_M = tingkatan *return* dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak.

Dengan mensubstitusi persamaan tersebut, *return* ekspektasi model indeks tunggal dapat dinyatakan sebagai:

$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i \cdot E(R_M)$, sedangkan rata-rata *return portfolio* dapat diperoleh dengan formula *arithmetic* dan *geometric return*. *Geometric return* lebih relevan dibandingkan *arithmetic return* karena memperhitungkan *compounding effect*.

Geometric Mean

$$= \sqrt[n]{(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \dots \times (1 + r_n)} - 1$$

Keterangan:

r = *rate of return*

n = *number of periods*

Selain mencari rata-rata *return* yang dimiliki oleh setiap efek yang digunakan untuk sampel pembentukan *portf olio*, perlu dicari juga besar resiko (β_i) dan koefisien independen (α_i) setiap efek terhadap kinerja *market* (LQ 45). Kumpulan dari *expeted return* dari setiap sampel yang akan di-

gunakan dalam pembentukan *portfolio* ini nantinya dituangkan dalam sebuah grafik guna menentukan efek mana yang mendekati dengan garis CML (*capital maket line*), dimana efek yang akan dipakai untuk *portfolio* adalah efek yang mendekati Garis CML.

Bagian *return* yang unik (α_i) hanya berhubungan dengan peristiwa mikro (*micro event*) yang mempengaruhi perusahaan begitu saja, tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan secara umum. Sebagai misal adalah peristiwa mikro misalnya adalah pemogokan karyawan, kebakaran, penemuan-penemuan penelitian, dan sebagainya. Bagian *return* yang berhubungan dengan *return* pasar ditunjukkan oleh Beta (β_i) yang merupakan sensitivitas *return* suatu sekuritas terhadap *return* dari pasar. Secara konsensus, *return* pasar mempunyai Beta bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai Beta 1,5 misalnya mempunyai arti bahwa perubahan *return* pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan *return* dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama sebesar 1,5%.

Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model yang lainnya. Asumsi utama dari model indeks tunggal adalah kesalahan residu dari sekuritas ke-i tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke-j atau e_i tidak berkovari (berkorelasi) dengan e_j untuk semua nilai dari i dan j . Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai: $Cov(e_i, e_j) = 0$

Besarnya $Cov(e_i, e_j)$ dapat juga ditulis sebagai berikut:

$$Cov(e_i, e_j) = E([e_i - E(e_i)] \cdot [e_j - E(e_j)])$$

Karena secara konstruktif bahwa $E(e_i)$ dan $E(e_j)$ adalah sama dengan nol, maka:

$$Cov(e_i, e_j) = E(e_i - 0) \cdot [e_j - 0] = E(e_i \cdot e_j)$$

sehingga asumsi bahwa kesalahan residu untuk sekuritas ke-i tidak mempunyai korelasi dengan kesalahan residu untuk sekuritas ke-j dapat juga ditulis: $E(e_i \cdot e_j) = 0$

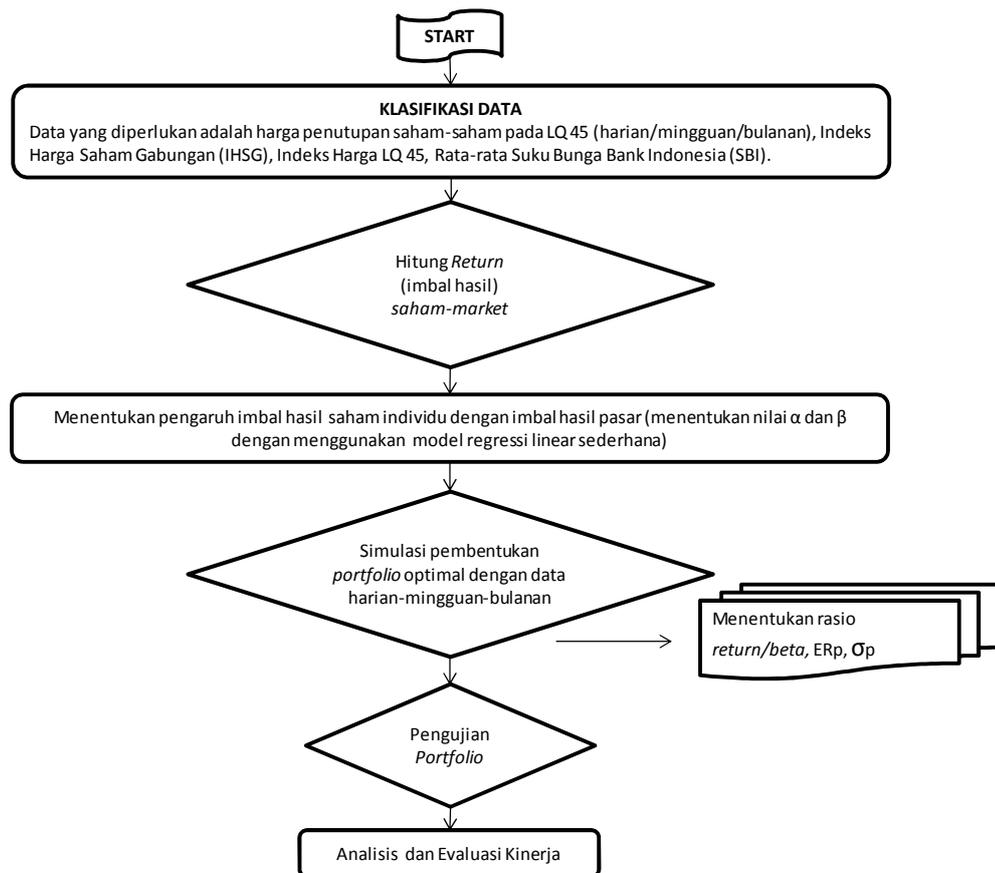
Return indeks pasar (R_M) dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas (e_i) me-

rupakan variabel-variabel acak, oleh karena itu, diasumsikan bahwa e_i tidak berkorelasi dengan $return$ indeks pasar R_M . Asumsi kedua ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai: $Cov(e_i, R_M) = 0$

Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek diluar pasar (misalnya efek dari industri atau perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar). Asumsi - asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah. Dengan demikian sebenarnya berapa besar model ini dapat diterima dan mewakili kenyataan sesungguhnya tergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi ini realistis. Jika asumsi-asumsi ini kurang realistis, berarti bahwa model ini akan menjadi tidak akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian konklusif deskriptif komparatif. Penelitian ini akan membandingkan kinerja *portfolio* yang disusun dengan menggunakan metode *single index models* dengan kinerja pasar, dengan menghitung seberapa optimum *performance* kinerja *portfolio* yang disusun dengan metode *single index models* terhadap pasar. Data yang diambil berkaitan dengan harga saham yang dijadikan sampel penelitian, nilai kapitalisasi pasar, indeks harga saham gabungan (IHSG), indeks harga LQ 45, harga saham-saham yang dijadikan sampel dalam penelitian, indeks LQ-45 dalam harian-mingguan-bulanan, dan tingkat suku bunga bank Indonesia (SBI). Tahapan dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar 1.



Gambar 1

Diagram Alir Proses Pengolahan Data

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Periode penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Periode pertama (1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2013) adalah periode observasi. Disini peneliti menggunakan data-data *historical* harga saham emiten yang dipakai sebagai bahan untuk membentuk sebuah *portfolio* optimal; (2) Periode kedua (1 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015) adalah periode pengujian. Disini peneliti menggunakan data-data *historical* harga saham emiten yang akan dipakai sebagai bahan untuk menguji seberapa optimal *portfolio* yang sudah di bentuk pada periode pertama (1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2013) dengan performa dari *market* disini peneliti menggunakan performa LQ 45.

Untuk menentukan baik buruknya kinerja sebuah *portfolio* dengan *portfolio* lain, dapat dilakukan pengujian *portfolio*. Terdapat tiga alat pengukuran kinerja untuk mengevaluasi *portfolio*, yaitu rasio Treynor, Sharpe, dan Jensen Alpha. Walaupun Barras *et al.* (2010) mengemukakan bahwa terdapat kelemahan dalam model pengukuran kinerja portofolio, khususnya dalam bentuk reksadana, namun penelitian Blitz dan Vliet (2011), Bruder dan Gaussel (2011) dan Cazalet dan Roncalli (2014) menemukan bahwa pengukuran kinerja portofolio masih mampu menjelaskan kinerja sebenarnya walaupun dalam kondisi low volatility maupun strategi reksadana yang dinamis (aktif).

Tujuan dari pengukuran Treynor adalah menemukan ukuran kinerja yang dapat diaplikasikan kepada seluruh investor, tidak mempedulikan preferensi risiko personal. Pengukuran ini berpendapat bahwa ada komponen risiko, yakni risiko yang dihasilkan dari fluktuasi di pasar dan risiko yang muncul dari fluktuasi sekuritas individual.

$$\text{Treynor} = \frac{\text{Total Portfolio Return} - \text{RF}}{\text{Portfolio } \beta}$$

Rasio Sharpe hampir identik dengan pengukuran Treynor, kecuali bahwa pengukuran risiko adalah standar deviasi *portfolio*, bukan mempertimbangkan risiko sistematis, yang ditampilkan oleh beta.

Pengukuran yang diperkenalkan oleh Bill Sharpe ini, terkait erat dengan pekerjaannya pada model penetapan harga aset modal (*capital asset pricing model/CAPM*) dan diperjelas dengan menggunakan risiko total untuk membandingkan *portfolio* terhadap garis pasar modal.

$$\text{Sharpe} = \frac{\text{Total Portfolio Return} - \text{RF}}{\text{Standard Deviation Portfolio}}$$

Pengukuran Jensen memperhitungkan kelebihan hasil (*excess return*) yang diperoleh sebuah *portfolio* melebihi hasil yang diharapkan. Pengukuran ini juga dikenal sebagai alpha. Rasio Jensen mengukur seberapa banyak tingkat hasil *portfolio* ditabelkan pada kemampuan manajer untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Sebuah *portfolio* dengan kelebihan hasil yang positif akan mempunyai alpha yang positif, sedangkan *portfolio* yang secara konsisten memberikan kelebihan hasil yang negatif akan mempunyai alpha yang negatif.

$$\text{Jensen Alpha} = \text{Total Portfolio Return} - \text{RF} - (\text{Portfolio Beta} \times (\text{Market Return} - \text{RF}))$$

Dimana RF: risk free

Berdasarkan model analisis yang digunakan, pada bagian ini disampaikan variabel utama yang digunakan adalah *return* saham/*market* dimana yang dimaksud dengan *return* saham/*market* adalah capital gain yang didapat dari perubahan harga saham/*market* pada Bursa Efek Jakarta dari periode Februari 2011 hingga Januari 2015. *Return* saham yang didapatkan dari deviden tidak dimasukkan karena nilainya relatif kecil dan untuk menghindari bias karena tidak merata antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik dalam hal besaran deviden maupun waktu pembagian.

$$\text{Return}_{(t)} = \ln (\text{harga}_{(t)} / \text{harga}_{(t-1)})$$

Keterangan:

harga_(t) = harga saham/*market* pada periode t
 harga_(t-1) = harga saham/*market* pada periode t-1

ln = logaritma natural

Terlihat dari rumus yang digunakan dalam menghitung *return* saham/*market*, bahwa *return* saham/*market* di pasar modal didefinisikan sebagai logaritma natural dari

perbedaan harga antara periode t dan $t-1$. Semua perhitungan *return* saham/market, baik itu untuk periode yang digunakan sebagai dasar pembentukan (Februari 2011 hingga Januari 2013) maupun periode pengukuran optimal *portfolio* (Februari 2013 hingga Januari 2015) menggunakan perhitungan dengan rumus *return* dimaksud.

Variabel Beta dan Alpha menggunakan rumus sebagai berikut: $R_i = \alpha_i + \beta_i \cdot R_M$
Return portofolio menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_p = (W_1 \times R_1) + (W_2 \times R_2) + \dots + (W_n \times R_n)$$

Dalam penelitian ini sebelum menguji seberapa optimal *portfolio* yang dibentuk dengan menggunakan *single index models* maka ada beberapa tahap dalam proses pembentukan *portfolio*. (a) Penentuan populasi dari *market* LQ 45: Dikarenakan setiap periode (6 bulan) terjadi perubahan anggota emiten yang bergabung dalam *market* LQ 45, maka penelitian ini harus menentukan saham mana saja yang digunakan dalam populasi penelitian pada periode Februari 2011 hingga Januari 2015. Disini saham-saham yang dipilih adalah saham-saham yang secara konsisten masuk ke dalam anggota *market* LQ 45. Selama periode penelitian terdapat delapan kali periode perubahan pada anggota *market* LQ 45, sehingga saham yang masuk dalam populasi penelitian adalah saham yang memiliki jumlah kesertaan selama delapan periode tersebut; (b) Pengukuran kinerja (*return*): pengukuran *return* saham/market ini dilakukan pada periode Februari 2011 hingga Januari 2013. Kemudian setelah mendapatkan besar *return* secara harian, maka dihitung rata-rata *return* hariannya; (c) Pengukuran besar beta dan alpha setiap saham menggunakan rumus *single index*; (d) Pembentukan garis *capital market line* (CML): Sebelum membentuk garis CML maka dibentuk sebuah kurva yang menggambarkan kumpulan kinerja saham-saham yang sudah dihitung dengan *single index models*, dimana sumbu x menggambarkan besar resiko (beta) dan sumbu y adalah rata-rata besar *return* saham yang dihitung

dengan menggunakan *single index models*. Pembentukan garis SML (*securities Market line*) ini didapat dari kurva CAPM dimana garis ini menghubungkan antara titik terluar dari kurva yang dihubungkan dengan titik resiko sistematis; (e) Penentuan saham-saham yang masuk saham *portfolio*: Saham yang masuk kedalam *portfolio* adalah saham-saham yang mendekati garis SML. Untuk mengetahui seberapa dekat saham terhadap garis SML maka perlu dihitung rasio antara resiko dan *return* saham tersebut. Dimana semakin besar rasio ini (mendekati nilai 1) maka saham tersebut menghasilkan *return* yang besar dengan resiko yang kecil; (f) Pengukuran fundamental analisis: Setelah mengetahui saham yang masuk kedalam sebuah *portfolio*, kemudian ditelaah secara singkat kondisi keuangan yang dimiliki emiten-emiten yang masuk dalam *portfolio* dengan beberapa analisis perhitungan fundamental yang meliputi *revenue growth*, *earning per share*, *earning per share growth rasio*, *price earning rasio*, *price book value*, *debt rasio*, dan *net profit margin*. Analisis ini hanya merupakan pelengkap untuk penguatan argument penelitian; (g) Pengujian *portfolio*: Pengujian *portfolio* adalah salah satu cara evaluasi *trading strategy* yang diperlukan untuk mereduksi kegagalan dari *portfolio* yang dibentuk dengan metode *single index model*. Adapun pengujian yang dilakukan menggunakan metode pengujian *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen alpha*.

Untuk mengetahui apakah *return portfolio* yang telah dibentuk dapat mengalahkan *return* pasar maka perlu disusun rancangan uji hipotesis. Dimana uji hipotesis yang dipakai adalah *t-test* Anova (parametric), dengan membandingkan *return portfolio* dengan *return* pasar (LQ 45) pada periode 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015. Uji t dilakukan untuk melihat seberapa signifikan besar optimal *return portfolio* yang sudah dibentuk melalui *single index model* dengan *return* pasar (LQ 45). Uji t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi dari hasil uji- t dengan α . Jika nilai t

hitung>nilai t-tabel, yaitu jika nilai signifikan<0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara besar *return* yang

dibentuk dengan *single index model* dengan *return* pasar (LQ 45).

Tabel 1
Obyek Saham Teraktif dan Rata-Rata SBI Periode 2011-2015

Rank	Saham	FREQ	Rank	Saham	FREQ	Periode	BI Rate	Periode	BI Rate
1	AALI	8	24	ASRI	7	4-Feb-11	6.75%	7-Mar-13	5.75%
2	ADRO	8	25	EXCL	7	4-Mar-11	6.75%	11-Apr-13	5.75%
3	ASII	8	26	HRUM	7	12-Apr-11	6.75%	14-May-13	5.75%
4	BBCA	8	27	ICBP	7	12-May-11	6.75%	13-Jun-13	6,00%
5	BBNI	8	28	INCO	7	9-Jun-11	6.75%	11-Jul-13	6.50%
6	BBRI	8	29	ANTM	6	12-Jul-11	6.75%	15-Aug-13	6.50%
7	BDMN	8	30	BBTN	6	9-Aug-11	6.75%	29-Aug-13	7.00%
8	BMRI	8	31	BSDE	6	8-Sep-11	6.75%	12-Sep-13	7.25%
9	CPIN	8	32	BUMI	6	11-Oct-11	6.50%	8-Oct-13	7.25%
10	UNVR	8	33	AKRA	5	10-Nov-11	6,00%	12-Nov-13	7.50%
11	INTP	8	34	INDY	5	8-Dec-11	6,00%	12-Dec-13	7.50%
12	ITMG	8	35	MNCN	4	12-Jan-12	6,00%	9-Jan-14	7.50%
13	JSMR	8	36	BJBR	4	9-Feb-12	5.75%	13-Feb-14	7.50%
14	KLBF	8	37	ELTY	4	8-Mar-12	5.75%	13-Mar-14	7.50%
15	LPKR	8	38	ENRG	4	12-Apr-12	5.75%	8-Apr-14	7.50%
16	LSIP	8	39	SMCB	4	10-May-12	5.75%	8-May-14	7.50%
17	PGAS	8	40	TINS	4	12-Jun-12	5.75%	12-Jun-14	7.50%
18	PTBA	8	41	BKSL	4	12-Jul-12	5.75%	10-Jul-14	7.50%
19	SMGR	8	42	BMTR	4	9-Aug-12	5.75%	15-Aug-14	7.50%
20	TLKM	8	43	PWON	3	13-Sep-12	5.75%	11-Sep-14	7.50%
21	UNTR	8	44	WIKA	3	11-Oct-12	5.75%	7-Oct-14	7.50%
22	GGRM	8	45	SSIA	3	8-Nov-12	5.75%	13-Nov-14	7.50%
23	INDF	8				11-Dec-12	5.75%	18-Nov-14	7.75%
						10-Jan-13	5.75%	11-Dec-14	7.75%
						12-Feb-13	5.75%	15-Jan-15	7.75%
						Rata-Rata			6.64%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Obyek dan Data Penelitian

Membentuk *portfolio* optimal adalah membentuk sebuah susunan sekuritas yang memberikan *expected return* optimal untuk tingkat resiko tertentu, sehingga *expected return* dan resiko adalah faktor yang dipertimbangkan *investor* dalam melakukan sebuah investasi.

Penelitian ini memberikan gambaran beberapa jenis *portfolio* yang dibentuk dengan metode *single index model* dengan menggunakan beberapa jenis data pe-

nyusun (data harian/mingguan/bulanan) yang dalam proses pemilihan saham dilakukan dengan pendekatan rasio *expected return* terhadap resiko/beta dan pendekatan ERB (*excess return to beta*) sebagai tambahan perbandingan. Tahap pertama dalam penyusunan *portfolio* dimulai dengan menentukan obyek penelitian, dimana sekuritas penyusun *portfolio* optimal ini tersusun dari obyek penelitian. Obyek penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah semua sekuritas yang masuk kedalam indeks LQ45 pada periode penelitian (Februari 2011 hingga

Januari 2015). Alasan memilih obyek penelitian indeks LQ 45 adalah karena sekuritas-sekuritas yang tersusun dari indeks LQ 45 ini memiliki *liquiditas* harga yang baik yang mana akan memberikan potensi *return* yang lebih cepat untuk para *investor*. Pada tabel 1 dijelaskan bahwa setiap enam bulan sekali terjadi perubahan saham-saham pembentuk indeks LQ 45, maka untuk itu perlu diseleksi untuk menentukan saham-saham pembentuk indeks LQ 45 di periode penelitian. Pendekatan seleksi saham-saham pembentuk indeks LQ 45 ini dilakukan dengan cara menghitung frekuensi terbanyak saham-saham yang masuk indeks LQ 45 selama delapan periode. Pada tabel 2 ditampilkan 45 saham teraktif yang masuk kedalam indeks LQ 45 pada periode penelitian, dimana untuk obyek penelitian yang digunakan adalah saham-saham non keuangan.

Perhitungan *expected return* menggunakan metode *single index model* maka salah satu faktor penyusunnya adalah *risk free rate*, dalam hal ini penelitian menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai *variable risk free rate*. Rata-rata besaran *risk free rate* yang dipakai dalam perhitungan pembentukan *portfolio* adalah sebesar 0,0252% untuk data harian yang didapatkan dengan membagi rata-rata suku bunga Bank Indonesia setahun dengan 243 (rata-rata jumlah data harian pada periode penelitian), 0,118% untuk data mingguan yang didapatkan dengan membagi rata-rata suku bunga Bank Indonesia setahun dengan 52 pekan, dan 0,51% untuk data Bulanan yang didapatkan dengan membagi rata-rata suku bunga Bank Indonesia setahun dengan 12 bulan. Jumlah saham penyusun *portfolio* dipengaruhi oleh tingkat agresifitas dari *portfolio* tersebut, semakin agresif maka jumlah saham penyusun *port-*

folio optimal akan semakin sedikit. Untuk jenis *portfolio* yang bersifat *agresif* susunan saham-saham dalam *portfolio* yang dibentuk dengan data harian atau mingguan tidak memiliki kesamaan dengan susunan saham-saham dalam *portfolio* yang dibentuk dengan data bulanan, hal ini terlihat pada *portfolio* A dan *portfolio* A1 yang sama-sama tersusun dari saham BMTR, SSIA, dan MNCN tetapi ketiga saham ini tidak masuk kedalam susunan saham pembentuk *portfolio* A2. Dimana jika menggunakan data bulanan untuk Saham BMTR, dan MNCN hanya masuk kedalam *portfolio* bersifat *moderate* dan untuk saham SSIA hanya bisa masuk kedalam *portfolio* yang bersifat *conservative*. Hal ini disebabkan ada dua faktor yaitu penentuan besar rasio *expected return* terhadap resiko/beta yang bersifat subyektif dan faktor kedua adalah rata-rata kinerja *return* saham SSIA untuk bulanan dibanding resiko/betanya tidak bagus dibanding rata-rata kinerja *return* saham SSIA untuk harian atau mingguan dibanding resiko/betanya.

Tabel 1 menggambarkan saham-saham yang menjadi obyek penelitian serta besar variabel suku bunga acuan yang nantinya digunakan sebagai *risk free rate*. Saham-saham yang menjadi obyek penelitian adalah saham teraktif pada periode 2011-2015 di dalam indeks LQ 45, sedangkan besar suku bunga acuan rata-rata adalah sebesar 6,64% per tahun yang nantinya dikonversi menjadi 0,0252% untuk data harian, 0,118% untuk data mingguan, dan 0,51% untuk data bulanan.

Perhitungan Return

Hasil perhitungan saham individu dan *market* tampak pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Hasil perhitungan tersebut didapat dari hasil perhitungan geometrik dan regresi

sederhana dengan menggunakan tiga jenis data, yaitu dengan data harian, mingguan, dan bulanan. Dari hasil hitungan tampak

bahwa *return* dari *market* sebesar 0,047% untuk data harian, 0,21% untuk data mingguan, dan 0.89% untuk data bulanan.

Tabel 2
Pembagian *Portfolio* Harian

No	SAHAM	X	Y	Return/ Risk	Portofolio
1	BMTR	0.647	0.23%	0.35%	A (0.3% < P) <i>agresif</i>
2	SSIA	1.089	0.34%	0.31%	
3	MNCN	0.687	0.21%	0.30%	
4	WIKA	0.752	0.21%	0.28%	B (0.20% < P) moderate
5	AKRA	0.893	0.23%	0.26%	
6	TLKM	0.640	0.14%	0.22%	
7	ASRI	1.097	0.24%	0.22%	
8	KLBF	0.912	0.18%	0.20%	
9	JSMR	0.662	0.13%	0.20%	
10	ICBP	0.634	0.12%	0.19%	C (0.10% < P) conservative
11	BKSL	1.060	0.19%	0.18%	
12	ASII	1.115	0.19%	0.17%	
13	SMGR	0.903	0.15%	0.17%	
14	LPKR	0.883	0.13%	0.14%	
15	UNVR	0.649	0.09%	0.14%	
16	CPIN	1.343	0.18%	0.14%	
17	BSDE	1.051	0.13%	0.13%	
18	SMCB	0.814	0.10%	0.12%	
19	GGRM	0.798	0.08%	0.10%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel 2 di atas terbentuk 3 jenis *portfolio* optimal berdasarkan tingkat rasio *expected return* terhadap resiko (beta). Penilaian dengan cara melihat perbandingan antara *expected return* terhadap resiko (beta) diharapkan mampu mengetahui kinerja *return* suatu saham terhadap resiko pasar, yaitu *portfolio* A dengan rasio diatas 0,3% yang terbentuk dari saham BMTR, SSIA, dan MNCN, sedangkan *portfolio* B dengan rasio diatas 0,2% yang terbentuk dari saham BMTR, SSIA, MNCN, WIKA, AKRA, TLKM, ASRI, KLBF, dan JSMR. *Portfolio* ketiga adalah *portfolio* C dengan rasio diatas 0,1% yang terbentuk dari saham BMTR, SSIA, MNCN, WIKA, AKRA, TLKM, ASRI, KLBF, JSMR, ICBP, BKSL, ASII, SMGR, LPKR,

UNVR, CPIN, BSDE, SMCB, dan GGRM. Besar rasio *expected return* terhadap resiko (beta) ini menggambarkan tingkat *agresif* dari *portfolio* yang dibentuk, dimana semakin besar rasionya maka semakin *agresif portfolio* tersebut.

Susunan saham pembentuk *portfolio* optimal yang sudah dibentuk pada periode observasi (Februari 2011 hingga Januari 2013) di atas dengan menggunakan pendekatan proporsi pembobotan sederhana (*Equality Weighted*) disetiap saham yang membentuk *portfolio* optimal kemudian dilakukan perhitungan *return*, resiko, dan varian kesalahan residu *portfolio* optimal pada periode pengujian (Februari 2013 hingga Januari 2015).

Tabel 3
Perhitungan Kinerja *Portfolio* Harian

Variabel	RF	Portfolio Harian		
		A	B	C
Treynor		-0,023%	0,025%	0,007%
Sharpe	0,0252%	-1,120%	1,478%	0,433%
Jensen Alpha		-0,00040	0,00015	-0,00004

Tabel 4
Pembagian *Portfolio* Mingguan

No	SAHAM	X	Y	Return/ Risk	Portofolio
1	TLKM	0.406	0.67%	1.65%	A1 (1% < P) <i>agresif</i>
2	BMTR	0.709	1.13%	1.59%	
3	JSMR	0.426	0.57%	1.35%	
4	SSIA	1.247	1.52%	1.22%	
5	AKRA	1.054	1.12%	1.06%	
6	MNCN	0.968	1.01%	1.05%	B1 (0.75% < P) moderate
7	WIKA	1.044	1.02%	0.98%	
8	ASII	1.057	0.98%	0.93%	
9	KLBF	1.024	0.84%	0.82%	C1 (0.5% < P) conservative
10	ASRI	1.396	1.10%	0.79%	
11	UNVR	0.550	0.43%	0.78%	
12	ICBP	0.761	0.60%	0.78%	
13	SMGR	0.914	0.68%	0.75%	
14	BKSL	1.459	0.92%	0.63%	
15	LPKR	0.972	0.58%	0.59%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel 3 diatas terbentuk 3 jenis *portfolio* optimal berdasarkan tingkat rasio *expected return* terhadap resiko (beta) yang dinilai dengan cara melihat perbandingan antara *expected return* terhadap resiko/beta, yaitu *portfolio* A1 dengan rasio diatas 1% yang terbentuk dari saham TLKM, BMTR, JSMR, SSIA, AKRA, dan MNCN, sedangkan *portfolio* B1 dengan rasio diatas 0,75% yang terbentuk dari saham TLKM, BMTR, JSMR, SSIA, AKRA, MNCN, WIKA, ASII, KLBF, ASRI, UNVR, ICBP, dan SMGR. *Portfolio* ketiga adalah *portfolio* C1 dengan rasio diatas 0,5% yang terbentuk dari saham TLKM, BMTR, JSMR, SSIA, AKRA, MNCN, WIKA, ASII, KLBF, ASRI, UNVR, ICBP, SMGR, BKSL, dan LPKR. Besar rasio *expected return* terhadap resiko (beta) ini menggambarkan tingkat *agresif* dari *portfolio* yang dibentuk,

dimana semakin besar rasionya maka semakin *agresif portfolio* tersebut. Susunan saham pembentuk *portfolio* optimal yang sudah dibentuk pada periode observasi (Februari 2011 hingga Januari 2013) diatas dengan menggunakan pendekatan proporsi pembobotan sederhana (*Equality Weighted*) disetiap saham yang membentuk *portfolio* optimal kemudian dilakukan perhitungan *return*, resiko, dan varian kesalahan residu *portfolio* optimal pada periode pengujian (Februari 2013 hingga Januari 2015).

Penentuan Saham *Portfolio* Optimal

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah bahwa *portfolio* optimal terbentuk dari sekumpulan saham yang memiliki kinerja baik, sehingga penentuan saham-saham yang masuk ke dalam *portfolio* didasarkan

Tabel 5
Perhitungan Kinerja *Portfolio* Mingguan

Variabel	RF	Portfolio Mingguan		
		A1	B1	C1
Treynor		0,037%	0,111%	0,041%
Sharpe	0,118%	1,003%	3,356%	1,207%
Jensen Alpha		-0,00016	0,00068	-0,00011

atas besar nilai rasio antara *return* dan beta.

Tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 menggambarkan pembagian *portfolio* berdasarkan nilai rasio tersebut. Pembagian *portfolio* dibagi menjadi tiga jenis model, yaitu *portfolio* yang bersifat *agresif*, *moderate*, dan

conservative, dimana nilai rasio yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan data pembentuk *portfolio* tersebut (harian, mingguan, bulanan). Semakin *agresif* sifat *portfolio* tersebut maka jumlah saham pembentuk *portfolio* tersebut semakin sedikit.

Tabel 6
Pembagian *Portfolio* Bulanan

No	SAHAM	X	Y	Return/ Risk	Portfolio
1	UNVR	0.149	1.87%	12.50%	
2	EXCL	0.116	0.75%	6.48%	A2 (6% < P) agresif
3	JSMR	0.443	2.79%	6.30%	
4	TLKM	0.433	2.69%	6.20%	
5	MNCN	0.822	4.79%	5.83%	B2 (4% < P) moderate
6	BMTR	0.954	5.24%	5.49%	
7	ASII	0.848	4.21%	4.96%	
8	KLBF	0.779	3.62%	4.65%	C2 (3% < P) conservative
9	GGRM	0.455	1.97%	4.33%	
10	ASRI	1.103	4.12%	3.73%	
11	ICBP	0.713	2.60%	3.65%	
12	WIKA	1.144	4.16%	3.64%	
13	SSIA	1.697	5.84%	3.44%	
14	SMGR	0.992	3.22%	3.25%	
15	AKRA	1.619	5.23%	3.23%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel 6 diatas terbentuk 3 jenis *portfolio* optimal berdasarkan tingkat rasio *expected return* terhadap resiko (beta) yang dinilai dengan cara melihat perbandingan antara *expected return* terhadap resiko/beta, yaitu *portfolio* A2 dengan rasio diatas 6% yang terbentuk dari saham UNVR, EXCL, JSMR, dan TLKM, sedangkan *portfolio* B2 dengan rasio diatas 4% yang terbentuk dari saham UNVR, EXCL, JSMR, TLKM, MNCN,

BMTR, ASII, KLBF, dan GGRM. *Portfolio* ketiga adalah *portfolio* C2 dengan rasio diatas 3% yang terbentuk dari saham UNVR, EXCL, JSMR, TLKM, MNCN, BMTR, ASII, KLBF, GGRM, ASRI, ICBP, WIKA, SSIA, SMGR, dan AKRA. Besar rasio *expected return* terhadap resiko (beta) ini menggambarkan tingkat *agresif* dari *portfolio* yang dibentuk, dimana semakin besar rasionya maka semakin *agresif* *portfolio* tersebut.

Susunan saham pembentuk *portfolio* optimal yang sudah dibentuk pada periode observasi (Februari 2011 hingga Januari 2013) diatas dengan menggunakan pendekatan proporsi pembobotan sederhana (*Equality Weighted*) disetiap saham yang membentuk *portfolio* optimal kemudian dilakukan perhitungan *return*, resiko, dan varian kesalahan residu *portfolio* optimal pada periode pengujian (Februari 2013 hingga Januari 2015).

Hasil Pengujian dan Pemilihan *Portfolio* Terbaik

Setelah membentuk *portfolio* optimal maka tahap selanjutnya adalah Pengujian *portfolio* sebagai salah satu cara evaluasi *trading strategy* yang diperlukan untuk mereduksi kegagalan serta mengetahui optimasi dari *portfolio* yang dibentuk. Pengujian dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kinerja *portfolio* selama masa pengujian, be-

Tabel 7
Perhitungan Kinerja *Portfolio* Bulanan

Variabel	RF	Portfolio Bulanan		
		A2	B2	C2
Treynor		1,972%	0,590%	0,337%
Sharpe	0,510%	24,749%	9,489%	6,536%
Jensen Alpha		0,00805	0,00245	0,00142

rikut adalah perhitungan pengujian *portfolio* dengan metode *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen alpha*.

Dari hasil pembagian saham yang sudah dilakukan pada periode observasi 2011-2013 maka dengan pembobotan sederhana setiap saham penyusun *portfolio* memiliki besar proposi yang sama maka dihitung *return* dan beta *portfolio* setiap *portfolio* di atas pada periode pengujian 2013-2015. Sebagai tambahan pembanding di penelitian ini disertakan *portfolio* yang dibentuk dengan menggunakan pendekatan ERB (*excess return to beta*) yaitu pada *portfolio* X (menggunakan data harian), *portfolio* Y (menggunakan data mingguan), dan *portfolio* Z (menggunakan data bulanan). ERB merupakan kelebihan *return* relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan dengan Beta dan C* adalah nilai cut off rate tertinggi, (Jogiyanto, 2003: 255).

Data yang dipakai adalah data *return* harian/mingguan/bulanan *market*, *portfolio* A, *portfolio* B, *portfolio* C, *portfolio* A1, *portfolio* B1, *portfolio* C1, *portfolio* A2, *portfolio* B2, dan *portfolio* C1 selama masa pengujian. Adapun data tambahan yang digunakan sebagai pembanding tambahan maka dalam tabel diatas disertakan data *return market* Index

Harga Saham Gabungan (IHSG) serta hasil *return portfolio* yang dihasilkan dari *portfolio* yang dibentuk dengan menggunakan pendekatan ERB (*excess return to beta*) yaitu pada *portfolio* X (menggunakan data harian), *portfolio* Y (menggunakan data mingguan), dan *portfolio* Z (menggunakan data bulanan).

Selain menghitung besar *return* dan beta *portfolio* dipenelitian ini juga melakukan Pengujian *portfolio* sebagai salah satu cara evaluasi *trading strategy* yang diperlukan untuk mereduksi kegagalan serta mengetahui optimasi dari *portfolio* yang dibentuk. Pengujian dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kinerja *portfolio* selama masa pengujian, dan perhitungan pengujian *portfolio* yang digunakan adalah dengan metode evaluasi *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen alpha*. Untuk mengetahui optimalitas *portfolio* yang sudah dibentuk di atas maka akan dilakukan pengujian secara statistik, pengujian statistik yang dilakukan adalah uji beda dengan nol dan uji beda dengan *market*. Uji ini untuk mengetahui seberapa signifikan besar optimal *return portfolio* yang sudah dibentuk dapat mengalahkan pasar pada periode pengujian (Februari 2013 hingga Januari 2015).

Tabel 8
Hasil Uji Beda Dengan Nol

Data Uji	N	Mean	Std Dev	Sig (1-Tailed)
IHSG- H	484	0,03%	1,14%	0,006**
LQ 45-H	484	0,04%	1,41%	0,008**
RP A	484	-0,002%	2,42%	0,09*
RP B	484	0,05%	1,82%	0,088*
RP C	484	0,03%	1,65%	0,026**
RP X	484	0,04%	1,62%	0,032**
IHSG- M	104	0,16%	2,34%	0,006**
LQ 45-M	104	0,17%	3,03%	0,016**
RP A1	104	0,16%	4,06%	0,088*
RP B1	104	0,24%	3,71%	0,096*
RP C1	104	0,16%	3,77%	0,062*
RP Y	104	0,21%	3,50%	0,06*
IHSG-B	23	0,43%	0,73%	1,34
LQ 45-B	23	0,72%	0,94%	0,908
RP A2	23	1,41%	0,76%	0,152
RP B2	23	0,88%	0,82%	0,59
RP C2	23	0,87%	1,16%	0,918
RP Z	23	0,95%	1,12%	0,818

Keterangan: simbol * menggambarkan tingkat signifikansi dibawah 10%, simbol ** menggambarkan tingkat signifikansi dibawah 5%.

Rancangan uji yang dipakai memiliki dugaan awal bahwa rata-rata *return portfolio* yang dihasilkan tidak memiliki nilai sama dengan nol dan bahwa rata-rata *return portfolio* yang dihasilkan tidak sama besar dengan besar rata-rata *return market* (LQ 45). Melihat hasil penelitian sebelumnya Clitnis (2010) yang mengatakan bahwa semakin banyak saham penyusun dari *portfolio* yang disusun dengan metode *single index model* maka risiko *portfolio* akan semakin kecil, hal ini tidak sejalan dari hasil pengolahan data. Pembentukan *portfolio* dengan data mingguan pada *portfolio* A1 yang memiliki enam saham penyusun memiliki beta sebesar 1,11 tidak jauh beda besar dibanding *portfolio* B1 yang memiliki tiga belas saham penyusun dengan nilai beta sebesar 1,12. Hal serupa terjadi pada pembentukan *portfolio* dengan data bulanan, dimana semakin banyak saham penyusunnya maka resikonya akan semakin besar.

Jumlah saham yang penyusun *portfolio* dipengaruhi oleh tingkat agresifitas dari *portfolio* tersebut, semakin agresif maka jumlah saham penyusun *portfolio* optimal akan semakin sedikit. Untuk jenis *portfolio* yang bersifat agresif susunan saham-saham dalam *portfolio* yang dibentuk dengan data harian atau mingguan tidak memiliki kesamaan dengan susunan saham-saham dalam *portfolio* yang dibentuk dengan data bulanan, hal ini terlihat pada *portfolio* A dan *portfolio* A1 yang sama-sama tersusun dari saham BMTR, SSIA, dan MNCN tetapi ketiga saham ini tidak masuk kedalam susunan saham pembentuk *portfolio* A2. Bila menggunakan data bulanan untuk Saham BMTR, dan MNCN hanya masuk kedalam *portfolio* bersifat moderate dan untuk saham SSIA hanya bisa masuk kedalam *portfolio* yang bersifat conservative. Hal ini disebabkan ada dua faktor yaitu penentuan besar rasio *expected return* terhadap risiko/beta yang bersifat subyektif

dan faktor kedua adalah rata-rata kinerja *return* saham SSIA untuk bulanan dibanding resiko/betanya tidak bagus dibanding rata-rata kinerja *return* saham SSIA untuk harian atau mingguan dibanding resiko/betanya. *Portfolio* yang terbentuk dari data harian, *portfolio* B memiliki rata-rata *return portfolio* yang paling besar yaitu sebesar 0,052% jauh lebih besar dibanding *return market* IHSG atau LQ 45 dengan resiko/beta sebesar 1,07, dimana dengan nilai resiko yang mendekati nilai 1 maka *portfolio* ini cenderung bersifat normal. Dilihat dari rasio *expected return portfolio* terhadap resiko/beta *portfolio* B yang hanya sebesar 0,049% tidak berbeda jauh dibanding *returnnya*, secara matematis *portfolio* ini kecenderungan menjadi sebagai *portfolio* optimal.

Portfolio yang terbentuk dari data mingguan, *portfolio* B1 memiliki rata-rata *return portfolio* yang paling besar yaitu sebesar 0,242% jauh lebih besar dibanding *return market* IHSG atau LQ 45 dengan resiko/beta sebesar 1,12, dimana dengan nilai resiko/beta ini tidak jauh berbeda dengan *portfolio* A1 dan C1, sehingga jika dilihat dari rasio *expected return portfolio* terhadap resiko/beta *portfolio* B1 memiliki nilai yang terbesar yaitu sebesar 0,216% tidak berbeda jauh dibanding *returnnya*, secara matematis *portfolio* ini kecenderungan menjadi *portfolio* optimal. *Portfolio* yang terbentuk dari data bulanan, *portfolio* A2 yang bersifat *agresif* memiliki rata-rata *return portfolio* yang paling besar yaitu sebesar 1,408% jauh lebih besar dibanding *return market* IHSG atau LQ 45 dengan resiko/beta sebesar 0,46, dimana dengan nilai resiko/beta ini berbeda jauh dengan *portfolio* B2 dan C2, sehingga jika dilihat dari rasio *expected return portfolio* terhadap resiko/beta *portfolio* A2 memiliki nilai yang terbesar yaitu sebesar 3,091% jauh lebih besar dibanding *returnnya* secara matematis *portfolio* ini dikatakan sebagai *portfolio* optimal.

Untuk pembentukan *portfolio* dengan data mingguan pada *portfolio* A1 yang memiliki enam saham penyusun memiliki

beta sebesar 1,11 tidak jauh beda besar dibanding *portfolio* B1 yang memiliki tiga belas saham penyusun dengan nilai beta sebesar 1,12. Hal serupa terjadi pada pembentukan *portfolio* dengan data bulanan, semakin banyak saham penyusunnya maka risikonya akan semakin besar. *Portfolio* A2, *portfolio* B2, dan *portfolio* C2 memiliki jumlah penyusun sebanyak empat, sembilan, dan lima belas sedangkan dilihat dari nilai betanya sebesar 0,46; 0,64; dan 1,08. Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan ada perbedaan obyek pasar.

Hasil seleksi yang tampak pada tabel 8 hanya tiga *portfolio* yang memiliki kriteria *portfolio* optimal, yaitu *portfolio* X, *portfolio* B1, dan *portfolio* Y, dan di antara ketiga *portfolio* ini *portfolio* B1 memiliki kinerja dan rasio antara *return* dan beta yang paling baik di antara ketiganya, sehingga *portfolio* paling optimal yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah *portfolio* B1 yaitu *portfolio* yang tersusun dari data *return* mingguan saham-saham dalam indeks LQ 45 pada periode Februari 2011 hingga Januari 2013 yang memiliki rasio *expected return* terhadap resiko/beta sebesar 0,75% dengan pendekatan pembobotan *equality weighted*. Adapun *portfolio* ini tersusun dari saham TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), BMTR (PT Global Mediacom Tbk), JSMR (PT Jasa Marga Tbk), SSIA (PT Surya Semesta Internusa Tbk), AKRA (PT AKR Corporindo Tbk), MNCN (PT Media Nusantara Citra Tbk), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), ASII (PT Astra International Tbk), KLBF (PT Kalbe Farma Tbk), ASRI (PT Alam Sutera Realty Tbk), UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk), ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) memiliki *return portfolio* mingguan sebesar 0,242% dengan nilai beta sebesar 1,122. *Portfolio* ini hanya mampu digunakan selama enam bulan saja. Nilai kapitalisasi *portfolio* B1 memiliki kapitalisasi di pasar sebesar sembilan ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah atau sebesar 22,71% dari total kapitalisasi modal di pasar modal Indonesia.

Adapun keterbatasan penelitian ini yang mengasumsikan bahwa *portfolio* optimal tersusun dari beberapa sekuritas yang memiliki kinerja yang baik, maka untuk menghitung besar *return portfolio* dan resiko/beta pada periode pengujian (Februari 2013 hingga Januari 2015), digunakan pembobotan dana pada setiap saham pembentuk *portfolio* optimal pada penelitian ini menggunakan pendekatan sederhana yaitu pembobotan proposional disetiap saham yang masuk kedalam *portfolio* (*Equality Weighted*), dimana setiap saham memiliki proposional bobot yang sama. Besar *return portfolio* optimal didapat dari hasil penjumlahan dari rata-rata *expected return* setiap saham pembentuk *portfolio* optimal dikalikan dengan proposi bobotnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan, pembahasan hasil penelitian serta uji hipotesis pada bagian sebelumnya, kemudian diakhiri dengan rekomendasi berdasarkan hasil simpulan sehingga diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembentukan *portfolio* di pasar modal Indonesia. Ada beberapa simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Besar *return* saham akan selalu diikuti dengan peningkatan resiko/beta, sehingga pengukuran baik buruknya saham didekati dengan pendekatan perbandingan *return* dan resiko/beta.; (2) Menilik dari hasil penelitian Clitnis (2010) yang mengatakan bahwa semakin banyak saham penyusun *portfolio* dengan *single index model* maka resiko *portfolio* akan semakin kecil tidak terjadi sepenuhnya pada pembentukan *portfolio* di pasar modal Indonesia; (3) Dari hasil uji hipotesis beda dengan nol serta uji hipotesis beda dengan market dengan nilai signifikansi sebesar 95% dipembentukan *portfolio* dengan obyek saham-saham di pasar modal Indonesia pada periode Februari 2011 hingga Januari 2013 memberi hasil gambaran beberapa *portfolio* optimal yang sudah dibentuk dengan *single*

index model seperti *portfolio X*, *portfolio B1*, dan *portfolio Y*; (4) *Portfolio* paling optimal yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah *portfolio B1* yaitu *portfolio* yang tersusun dari data *return* mingguan saham-saham dalam indeks LQ 45 pada periode Februari 2011 hingga Januari 2013 yang memiliki rasio *expected return* terhadap resiko/beta sebesar 0,75% dengan pendekatan pembobotan *equality weighted*. Adapun *portfolio* ini tersusun dari saham TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), BMTR (PT Global Mediacom Tbk), JSMR (PT Jasa Marga Tbk), SSIA (PT Surya Semesta Internusa Tbk), AKRA (PT AKR Corporindo Tbk), MNCN (PT Media Nusantara Citra Tbk), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), ASII (PT Astra International Tbk), KLBF (PT Kalbe Farma Tbk), ASRI (PT Alam Sutera Realty Tbk), UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk), ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) memiliki *return portfolio* mingguan sebesar 0,242% dengan nilai beta sebesar 1,122. *Portfolio* ini hanya mampu digunakan selama enam bulan saja. Nilai kapitalisasinya *portfolio B1* memiliki kapitalisasi di pasar sebesar sembilan ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah atau sebesar 22,71% dari total kapitalisasi modal di pasar modal Indonesia.

Setelah menemukan *portfolio* optimal dengan menggunakan metode *single index model* pada periode penelitian Februari 2011 hingga Januari 2015 bagi *investor* yang akan melakukan pembentukan *portfolio* optimal pada sejumlah sekuritas di pasar modal Indonesia maka direkomendasikan agar membentuk sebuah *portfolio* yang tersusun dari sekumpulan sekuritas yang memiliki rasio *expected return* terhadap resiko diatas 0,75 dimana *portfolio* tersebut hanya dapat digunakan selama periode enam bulan saja. Penelitian ini hanya memasukkan variabel Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) sebagai salah satu variabel luar, maka bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa, maka diharapkan mampu menggunakan metodologi yang berbeda sehingga penelitian ini dapat memberikan

salah satu masukan alternatif terbaik bagi *investor* untuk melakukan pembentukan *portfolio* yang optimal. Selain dapat menggunakan metodologi yang berbeda dapat juga memasukkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi pergerakan saham di pasar modal Indonesia, seperti variabel nilai kurs mata uang, tingkat inflasi, harga instrumen investasi lain, serta beberapa variabel lain yang dapat dimasukkan dalam penelitian selanjutnya. Dilihat dari waktu optimasi dari sebuah *portfolio* penelitian selanjutnya diharapkan dapat memamparkan optimasi dari waktu periode uji terhadap *portfolio* yang sudah dibentuk dengan lebih detail, sehingga bagi *investor* dapat mengetahui gambaran seberapa lama kemampuan sebuah *portfolio* mampu mengalahkan *market*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang A., J. Chen dan Y. Xing. 2006. Downside Risk. *Review of Financial Studies* 19(4). 1191-1239.
- Ang A., W. Goetzmann dan S. Schaefer. 2009. Evaluation of Active Management of the Norwegian GPF. Norway: Ministry of Finance.
- Asness, C. S., T. J. Moskowitz dan L. H Pedersen. 2013. Value and Momentum Every where. *Journal of Finance* 68(3). 929-985.
- Baker M., B. Bradley dan Taliaferro R. 2014. The Low-Risk Anomaly: A Decomposition into Micro and Macro. *Financial Analysts Journal* 70(2). 43-58.
- Barras L., O. Scaillet dan R. Wermers. 2010. False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas. *Journal of Finance* 65(1). 179-216.
- Blitz D. C. dan Van Vliet P. 2011. Benchmarking Low-Volatility Strategies. *Journal of Index Investing* 2(1). 44-49.
- Bruder B. dan N. Gaussel. 2011. Risk-Return Analysis of Dynamic Investment Strategies. Lyxor White Paper Series 7. www.lyxor.com.
- Cazalet Z. dan T. Roncalli. 2014. Style Analysis and Mutual Fund Performance Measurement Revisited. Lyxor Research Paper.
- Chitnis, A. 2010. Optimized two portfolio using single index model. *World Journal of Social Sciences*, vol 3: 75-87.
- Chui A. C., Titman S. and K. J. Wei. 2010. Individualism and Momentum Around The World. *Journal of Finance* 65(1). 361-392.
- Fama, E. F. 1991. *Efficient Capital Market II*. *Journal of finance* 56(5): 1575-1617.
- Fama, E. F. dan K. R. French. 2004. The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. *Journal of Economic Perspectives* 18: 25-46.
- Gitman, L. J. 2006. *Principles of Managerial Finance, seventeenth edition*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Jogiyanto, H. 2000. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kedua, Penebit BPFE. Yogyakarta.
- Kam, K. 2006. Portfolio Selection Methods: An Empirical Investigation. *Thesis unpublished*. University of California: Los Angeles.
- Markowitz, H. M. 1959. *Portfolio Selection: Efficient Diversification Of Investment*. Cowles Foundation: New Haven.
- Michael, M. and B. D. Veiga. 2005. *Single Index and Portfolio Models for Forecasting Value-at-Risk Thresholds*. School of Economics and Commerce. Australia.
- Reilly, F. K. and K. C. Brown. 2003. *Investment Analysis & Portfolio Management. Seventh Edition*. South Western a division of Thomson Learning Ohio, USA.
- Rudiyanto, D. 2003. Analisis dan Seleksi Saham Dalam Rangka Pembentukan dan Pemilihan Portofolio Saham Yang Optimal. *Thesis*. Program Magister Manajemen UMM, tidak dipublikasikan.
- Umanto, E. 2008. Analisis dan Penilaian Kinerja Portofolio Optimal Saham-saham LQ-45. *Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 15: 178-187.

- Widyantini, R. 2005. Single Index Model and Constant Correlation for Optimal Portofolio: Analisa Saham di Bursa Efek Jakarta, *Thesis*. Program Pasca Sarjana FEUI, tidak dipublikasikan.
- Yasmana, G. I. 2003. Pembentukan Portofolio Yang Optimal Pada Beberapa Saham yang Tercatat di BEJ (Studi Kasus Pada Saham-Saham Yang Termasuk Dalam LQ-45 Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal). *Journal Undergraduate Theses From JPITUMM*.

Kata	Halaman
<i>Tax Amnesty</i>	415
<i>Single Case Study</i>	415
Wajib Pajak	419
Komitmen	429
SPT	431
Kualitas Audit	434
<i>Bond Rating</i>	435
Peringkat Obligasi	435
<i>Good Corporate Governance</i>	436
Umur Obligasi	440
<i>Balanced Scorecard</i>	455
AHP	455
Kinerja	456
Perspektif	461
Bmt-Ugt	462
<i>Locus Of Control</i>	473
Tekanan Anggaran Waktu	475
Komitmen Profesional	475
Perilaku <i>Disfungsional</i> Auditor	477
Populasi	477
Portofolio Optimal	492
Risiko	491
Return	495
Model Single Index	493
Pasar Modal	494
CAPM	495
<i>Belief-Adjustment Model</i>	511
Efek Urutan	512
<i>Framing</i>	513
Gaya Kognitif	513
Koperasi	528
Praktik Akuntansi Kreatif	528
Menaikkan Laba	531
Menurunkan Laba	538
Perataan Laba	538
